

# Ketertinggalan dalam Kemakmuran

## Tantangan Kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Widjajanti Isdijoso

Mayang Rizky

Veto Tyas Indrio

Ana Rosidha Tamyis

\*Dokumen ini telah disetujui untuk pratinjau dalam jaringan, tetapi belum melewati proses *copyediting* dan *proofreading* sehingga dapat menyebabkan perbedaan antara versi ini dan versi final. Bila Anda mengutip dokumen ini, indikasikan sebagai "draf".

**LAPORAN PENELITIAN SMERU**

**Ketertinggalan dalam Kemakmuran  
Tantangan Kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan  
Kepulauan**

Widjajanti Isdijoso

Mayang Rizky

Veto Tyas Indrio

Ana Rosidha Tamyis

**The SMERU Research Institute**

**Agustus 2019**

# TIM PENELITIAN

## **Peneliti SMERU**

Widjajanti Isdijoso

Mayang Rizky

Veto Tyas Indrio

Ana Rosidha Tamyis

## **Peneliti Daerah**

Andi Kasirang T. Baso



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi SMERU tidak boleh diunggah dalam jaringan (daring) dan konten daring hanya bisa dipublikasikan melalui tautan ke situs web SMERU.

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Studi dalam publikasi ini sebagian besar menggunakan metode wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Semua informasi terkait direkam dan disimpan di kantor SMERU.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, hubungi kami melalui nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat surel [smeru@smeru.or.id](mailto:smeru@smeru.or.id); atau kunjungi situs web [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id).

Foto Sampul: Widjajanti Isdijoso

## UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini dapat diselesaikan berkat dukungan berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada *Knowledge Sector Initiative* (KSI) yang telah memfasilitasi pelaksanaan kajian ini. Ucapan terimakasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), terutama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) atas dukungan selama kegiatan pengumpulan data di lapangan dan diseminasi hasil kajian ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih, kami sampaikan pula kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Pusat Statistik (BPS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perangkat desa, masyarakat dan berbagai pihak di Kabupaten Pangkep yang telah berkontribusi memberikan informasi berharga sehingga kajian ini terlaksana dengan baik.

## Keteringgalan dalam Kemakmuran: Tantangan Kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Widjajanti Isdijoso, Mayang Rizky, Veto Tyas Indrio, dan Ana Rosidha Tamyis

Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) kontradiktif dengan pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita Pangkep yang merupakan salah satu tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi ini melatarbelakangi perlunya kajian untuk memahami kondisi kemiskinan di Pangkep dalam rangka mencari alternatif kebijakan pengurangan kemiskinan. Metodologi yang digunakan adalah memadukan analisis deskriptif terhadap sejumlah data sekunder mengenai kondisi kemiskinan di Pangkep dengan analisis data kualitatif terhadap data primer yang diperoleh dari wawancara dan diskusi dengan berbagai pihak di Pangkep. Kajian ini menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Pangkep terutama berasal dari kontribusi industri pengolahan, khususnya semen. Sementara sumber penghidupan mayoritas penduduk adalah sektor pertanian yang memberikan rata-rata upah paling sedikit dibandingkan sektor kerja lainnya. Pendidikan mayoritas penduduk Pangkep, termasuk kelompok miskin dan rentan terkategori rendah, sehingga tidak dapat bekerja pada sektor industri dan jasa yang tumbuh seiring dengan pertumbuhan industri semen. Kendati partisipasi kerja perempuan terus meningkat namun masih tetap lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan keluar dari angkatan kerja terutama karena mengurus rumah tangga dan sebagian kecil karena pendidikan. Kondisi ini berkebalikan dengan laki-laki. Pangkep juga dihadapkan pada persoalan pengangguran pada kelompok usia muda yang kendati tingkat pendidikannya sudah lebih meningkat namun masih belum mampu bersaing dalam dunia kerja. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah dan non pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat namun masih dihadapkan pada kendala teknis maupun non teknis. Kajian ini merekomendasikan beberapa upaya pengurangan kemiskinan dalam jangka panjang, menengah dan pendek, diantaranya melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup, penciptaan lapangan kerja, regulasi afirmatif untuk penanggulangan kemiskinan serta keterpaduan antara program bantuan sosial dan peningkatan pendapatan.

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran kelompok muda, partisipasi kerja perempuan, kualitas sumber daya manusia

# DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR KOTAK	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	viii
RANGKUMAN EKSEKUTIF	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Pendekatan dan Metodologi	1
1.4 Sistematika Laporan	2
II. GAMBARAN UMUM DAN PROFIL SOSIAL EKONOMI KABUPATEN PANGKEP	3
2.1 Gambaran Umum Kabupaten Pangkep	3
2.2 Profil Sosial Ekonomi Kabupaten Pangkep	4
2.3 Profil Kesehatan Kabupaten Pangkep	14
2.4 Profil Tenaga Kerja Kabupaten Pangkep	20
2.5 Profil Rumah Tangga dan Akses terhadap Air serta Sanitasi Layak	27
III. KONDISI KEMISKINAN DI KABUPATEN PANGKEP	31
3.1 Tren dan Pola Distribusi Pengeluaran Masyarakat	31
3.2 Karakteristik Kemiskinan di Kabupaten	32
3.3 Karakteristik Kemiskinan di Beberapa Wilayah	35
IV. TINJUAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM	47
4.1 Kebijakan	47
4.2 Program	50
4.3 Tantangan Program	57
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Rekomendasi Kebijakan	61
DAFTAR ACUAN	63
LAMPIRAN	65

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kecamatan dan Luas Wilayah	3
Tabel 2. Struktur Penduduk, Rasio Ketergantungan, dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Pangkep 2013-2017	7
Tabel 3. Ijazah Tertinggi Menurut Jenis Kelamin dan Usia (2017)	11
Tabel 4. Indikator Kesehatan (2017)	19
Tabel 5. Angkatan Kerja Penduduk >15 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Usia (2017)	21
Tabel 6. Penduduk >15 Tahun yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin, Usia, dan Pendidikan (2017)	22
Tabel 7. Penduduk >15 Tahun yang Menganggur Menurut Jenis Kelamin, Usia, dan Pendidikan (2017)	26
Tabel 8. Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga dari Penduduk 20% Terbawah menurut Kecamatan, 2015	37
Tabel 9. Klasifikasi Kesejahteraan Masyarakat Kel. Mattiro Sompe, Kec. Liukang Tupabbiring	39
Tabel 10. Klasifikasi Kesejahteraan Masyarakat Kel. Kassi, Kec. Balocci.	42
Tabel 11. Klasifikasi Kesejahteraan Masyarakat Desa Kanaungan, Kec. Labakkang.	45
Tabel 12. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Kemiskinan Untuk Penentuan Prioritas Program pada RPJMD Pangkep 2016-2021	47
Tabel 13. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Pangkep	48
Tabel 14. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkep Tahun 2018	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Rangkaian Analisis dalam Kajian Kemiskinan di Pangkep	2
Gambar 2. PDRB dan Pertumbuhan PDRB (Konstan 2010)	4
Gambar 3. PDRB Menurut Lapangan Usaha 2015-2017	5
Gambar 4. PDRB Menurut Pengeluaran 2013-2017	6
Gambar 5. PDRB per Kapita (Tahun Dasar 2010)	6
Gambar 6. Piramida Penduduk Kabupaten Pangkep 2017	7
Gambar 7. Penduduk Kabupaten Pangkep Menurut Status Perkawinan	8
Gambar 8. Kepemilikan Akta Lahir Kabupaten Pangkep	9
Gambar 9. Alasan Penduduk 0-17 Tahun Tidak Memiliki Akta Lahir (2016)	10
Gambar 10. Status Pendidikan Penduduk Kabupaten Pangkep (2017)	10
Gambar 11. Ijazah Tertinggi Penduduk Kabupaten Pangkep	11



Gambar 12. Alasan Tidak/Belum Pernah Bersekolah Penduduk Usia 5-24 Tahun (2017)	12
Gambar 13. Ijazah Tertinggi Menurut Kelompok Pengeluaran (2017)	13
Gambar 14. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pangkep	13
Gambar 15. Persentase Pengetahuan Rumah Tangga Tentang Keberadaan Fasilitas Kesehatan (2013)	14
Gambar 16. Waktu Tempuh Menuju Fasilitas Kesehatan (2013)	15
Gambar 17. Prevalensi Status Gizi Balita (2013)	15
Gambar 18. Jaminan Kesehatan yang Dimiliki (2017)	16
Gambar 19. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Dalam Sebulan Terakhir	17
Gambar 20. Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Setahun Terakhir	17
Gambar 21. Penduduk Berusia $\geq 15$ Tahun yang Merokok Tembakau	17
Gambar 22. Penduduk Berusia $\geq 15$ Tahun yang Merokok Tembakau Menurut Kelompok Pengeluaran (2017)	18
Gambar 23. Tempat Melahirkan Perempuan yang Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun Kabupaten Pangkep (2017)	18
Gambar 24. Penolong Melahirkan Perempuan yang Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Pangkep (2017)	19
Gambar 26. TPAK dan Penduduk $>15$ Tahun yang Keluar dari Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin	20
Gambar 27. Alasan Keluar dari Angkatan Kerja Penduduk $>15$ Tahun Menurut Jenis Kelamin (2017)	21
Gambar 28. Kesempatan Kerja Penduduk $>15$ Tahun Menurut Jenis Kelamin	22
Gambar 29. Penduduk $>15$ Tahun yang Bekerja Menurut Ijazah Tertinggi	23
Gambar 30. Penduduk $>15$ Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	23
Gambar 31. Penduduk $>15$ Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan	24
Gambar 32. Upah Penduduk $>15$ Tahun yang Bekerja (2017)	24
Gambar 33. Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Berusia $>15$ Tahun Kabupaten Pangkep Menurut Jenis Kelamin	25
Gambar 34. Penduduk $>15$ Tahun yang Menganggur Menurut Usia dan Ijazah Tertinggi (2017)	26
Gambar 35. Profil Rumah Tangga Kabupaten Pangkep (2017)	27
Gambar 36. Akses Rumah Tangga Terhadap Air Layak di Kabupaten Pangkep	28
Gambar 37. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Layak Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Pangkep (2017)	28
Gambar 38. Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Pangkep	29
Gambar 39. Persentase Rumah tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Pangkep (2017)	30
Gambar 40. Tren Kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2004-2018	31
Gambar 41. Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2015.	32

Gambar 42. Piramida Penduduk 20% Terbawah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2011 dan 2015	33
Gambar 43. Pendidikan Penduduk 20% Terbawah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2011 dan 2015.	33
Gambar 44. Pekerjaan Penduduk 20% Terbawah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2011 dan 2015.	34
Gambar 45. Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2015.	35
Gambar 46. Tingkat Kemiskinan Kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2010 dan 2015.	36
Gambar 47. Piramida, Pendidikan, dan Pekerjaan Penduduk 20% Terbawah Kec. Liukang Tupabbiring, 2015	38
Gambar 48. Piramida, Pendidikan, dan Pekerjaan Penduduk 20% Terbawah Kec. Balocci, 2015.	41
Gambar 49. Piramida, Pendidikan, dan Pekerjaan Penduduk 20% Terbawah Kec. Labakkang, 2015.	44
Gambar 50. Integrasi Program Bantuan Sosial Menurut Kelompok Pengeluaran (2017)	51
Gambar 51. Distribusi Program Bantuan Sosial Menurut Kelompok Pengeluaran (2017)	51
Gambar 52. Cakupan Program Bantuan Sosial Menurut Kelompok Pengeluaran (2017)	52

## DAFTAR KOTAK

Kotak 1 Pendataan Kebutuhan Pangan Non Pangan Rumah Tangga Miskin Kabupaten Pangkep Tahun 2018	55
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Gambar A1. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pangkep Menurut Lapangan Usaha	66
Lampiran 2 Tabel A1. Rata-rata PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota (2013- 2017)	67
Lampiran 3 Gambar A2. IPM (Angka Harapan Hidup)	68
Lampiran 4 Gambar A3. IPM (Harapan Lama Sekolah)	69
Lampiran 5 Gambar A 1. IPM (Rata-rata Lama Sekolah)	70
Lampiran 6 Gambar A 2. IPM (Pengeluaran Per kapita)	71
Lampiran 7 Gambar A 3. Perilaku Hidup Sehat (2013)	72
Lampiran 8 Gambar A 4. Perilaku Sedentari	73

Lampiran 9	Gambar A 5. Penduduk yang Pernah Memiliki Keluhan Kesehatan Dalam Sebulan Terakhir Kabupaten Pangkep (2017)	74
Lampiran 10	Gambar A9. Alasan Tidak Berobat Kabupaten Pangkep 2017	75
Lampiran 11	Gambar A 6. Tempat Melahirkan Perempuan yang Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Pangkep (2017)	76
Lampiran 12	Gambar A 7. Penolong Proses Melahirkan Perempuan yang Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Pangkep (2017)	77
Lampiran 13	Tabel A2. Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan Kabupaten Pangkep (2017)	78
Lampiran 14	Gambar A12. Bagan Tenaga Kerja Indonesia	79
Lampiran 15	Gambar A13. Rata-rata Lama Bekerja Menurut Jenis Kelamin (2017)	80
Lampiran 16	Gambar A14. Rata-rata Lama Bekerja Menurut Jenis Lapangan Usaha	81
Lampiran 17	Tabel A3. Gambaran Umum Rumah Tangga Kabupaten Pangkep (2013 dan 2017)	82
Lampiran 18	Gambar A15. Persebaran Kemiskinan di Tingkat Desa (2015)	83
Lampiran 19	Gambar A16. Karakteristik Penduduk 20% Terendah menurut Kecamatan (2015)	84

## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

Bappeda	Badan Perencanaan Daerah
BDT	Basis Data Terpadu
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPS	Badan Pusat Statistik
BSA	Balai Sakinah Aisyiyah
BUEKA	Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah
Bumdes	Badan Usaha Milik Desa
CSR	Corporate Social Responsibility
FGD	Focus Grup Discussion
GK	Garis Kemiskinan
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
KIP	Kartu Indonesia Pintar
KIS	Kartu Indonesia Sehat
KOMPAK	Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia
KPM	Keluarga Penerima Manfaat
KUBE	Kelompok Usaha Bersama
Lansia	Lanjut Usia
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MAMPU	Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
NIK	Nomer Induk Kependudukan
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
Pangkep	Pangkajene dan Kepulauan
PDRB	Pendapatan Domestik Regional Bruto
PIP	Program Indonesia Pintar
PIRT	Pengurusan Izin Pangan Industri Rumah Tangga
PKH	Program Keluarga Harapan
PMKS	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PPLS	Pendataan Program Perlindungan Sosial
Rastra	Beras Sejahtera
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RPJMD	Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RTM	Rumah Tangga Miskin
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SD	Sekolah Dasar
SDGs	Sustainable Development Goals
SDM	Sumber Daya Manusia
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMP	Sekolah Menengah Pertama
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
UEP	Usaha Ekonomi Produktif
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah

# RANGKUMAN EKSEKUTIF

## Latar Belakang dan Tujuan Studi

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) adalah salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Disisi lain pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita Pangkep merupakan salah satu yang tertinggi di Sulawesi Selatan. Kondisi ini menjadi fenomena yang kontradiktif dan menggerakkan berbagai pihak untuk berupaya memahami kondisi kemiskinan di Pangkep dan berupaya mencari upaya terobosan untuk mengurangi kemiskinan di Pangkep. Secara umum kajian ini ditujukan untuk memahami kondisi kemiskinan di Kabupaten Pangkep, dalam rangka mencari alternatif kebijakan pengurangan kemiskinan.

## Metodologi

Kajian dilakukan dengan menganalisis kondisi kemiskinan dan kebijakan untuk menyusun alternatif kebijakan pengurangan kemiskinan. Kajian ini dilakukan dengan menggabungkan:

- (i) analisis statistik deskriptif menggunakan data yang dikumpulkan dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Peta Kemiskinan dan Penghidupan yang disusun SMERU, dan data mikro dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 dan Basis Data Terpadu (BDT) 2015, serta dokumen perencanaan Pemerintah daerah (Pemda) Pangkep serta laporan penelitian yang relevan.
- (ii) analisis terhadap data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan diskusi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Pemda Pangkep, BPS kabupaten, berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan program yang didanai donor, pemerintah kelurahan/desa serta masyarakat di tiga desa/kelurahan yang mewakili tipologi penghidupan masyarakat Pangkep. Kelurahan/desa dan kecamatan sampel yang dipilih yaitu Kelurahan Mattiro Sompe, Kecamatan Liukang Tupabbiring; Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci; dan Desa Kanaungan, Kecamatan Labakkang. Selain ketiga desa/kelurahan tersebut, tim peneliti juga melakukan wawancara dan pengamatan lapangan ke Desa Mattaro Adae, Kecamatan Liukang Tupabbiring. Pemilihan desa/kelurahan dan kecamatan sampel didasarkan pada pertimbangan adanya tiga tipologi utama penghidupan masyarakat di Kabupaten Pangkep, yaitu daerah kepulauan, pesisir, dan dataran tinggi.

Persiapan kajian mulai dilakukan pada Mei 2018 dan diskusi-diskusi awal dilakukan pada Juli 2018. Pengolahan data-data sekunder dilakukan pada Agustus-Oktober 2018. Sedangkan wawancara, FGD, dan kunjungan ke desa/kelurahan sampel dilakukan pada Oktober 2018.

## Gambaran Umum dan Profil Sosial Ekonomi Kabupaten Pangkep

Kabupaten Pangkep memiliki wilayah di daratan dan kepulauan. Dari 13 kecamatan, terdapat 4 kecamatan yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan. Besarnya wilayah laut di Kabupaten Pangkep menyebabkan sulitnya akses beberapa kecamatan dari dan ke ibukota kabupaten yang berada di pulau utama.

## Profil Ekonomi

Perekonomian di Kabupaten Pangkep dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017) terus tumbuh diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini tercermin dari nilai PDRB Kabupaten Pangkep yang secara konsisten terus mengalami peningkatan dengan tahun dasar 2010. Meski sempat terjadi pelambatan pada 2015 dan 2017, namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkep masih berada di atas rata-rata nasional yang hanya berkisar pada angka 5%. Pada sisi lapangan usaha, lebih dari 50% sumber penghasilan daerah Kabupaten Pangkep berasal dari industri pengolahan. Adanya industri pengolahan semen di daerah ini memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perputaran roda ekonomi. Pada sisi pengeluaran, selama 5 tahun terakhir, proporsi terbesar PDRB berasal dari kelompok ekspor-impor dan konsumsi rumah tangga. Tingginya proporsi ekspor-impor terhadap PDRB ini juga dipengaruhi oleh industri pengolahan semen di Kabupaten Pangkep. Tumbuhnya nilai PDRB Pangkep tiap tahun memberikan dampak positif terhadap PDRB per kapita Kabupaten Pangkep yang relatif tinggi bahkan diatas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Pangkep juga memiliki kondisi perekonomian yang lebih baik dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini nampak dari pertumbuhan ekonomi, rata-rata nilai PDRB dan PDRB per kapita Kabupaten Pangkep dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan.

## Profil Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pangkep terus mengalami peningkatan tiap tahun. Pada tahun 2018, jumlah penduduk Pangkep telah tumbuh sebesar 4.25% dibanding tahun 2013. Mayoritas penduduk tinggal di perdesaan. Berdasarkan usia, dalam kurun waktu 2013-2017, penduduk Kabupaten Pangkep paling banyak adalah kelompok penduduk anak dan pemuda (0-29 tahun), diikuti penduduk dewasa (30-50 tahun) dan terakhir kelompok lanjut usia (>50 tahun). Sementara secara konsisten, proporsi usia produktif di Kabupaten Pangkep dalam 5 tahun tersebut memiliki *share* 60% dari jumlah total penduduk.

Berdasarkan jenis kelamin, terlihat selisih yang tidak begitu besar antara jumlah perempuan dan laki-laki sepanjang kurun waktu 2013-2017. Mayoritas kepala keluarga di Pangkep adalah laki-laki. Berdasarkan status pernikahan, hampir setengah penduduk Kabupaten Pangkep berstatus belum kawin dan hampir setengahnya lagi berstatus kawin, hanya sedikit dari penduduk Kabupaten Pangkep yang cerai mati dan cerai hidup. Hal ini wajar mengingat lebih dari 50% penduduk Pangkep berstatus anak dan pemuda (usia 0-29 tahun). Pernikahan dini masih menjadi persoalan di Pangkep. Berdasarkan data BPS, tercatat ditemukan 45.32% penduduk yang usia menikah pertamanya berada di rentang 10 – 20 tahun. Dari sisi dokumen kependudukan, pada 2017, sebagian besar penduduk (97,11%) sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sementara, proporsi anak usia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta lahir terus menurun dalam waktu 5 tahun terakhir (2013-2017).

## Profil Pendidikan

Pada lima tahun terakhir (2013-2017), lebih dari 60% dari penduduk Pangkep yang pernah bersekolah (masih bersekolah dan tidak pernah bersekolah lagi) memiliki ijazah Sekolah Dasar (SD)/sederajat atau belum memiliki ijazah. Meski demikian, proporsi jumlah penduduk dengan ijazah tertinggi menengah keatas (Sekolah Menengah Atas (SMA) dan universitas) juga cukup tinggi yaitu lebih dari 20%.

Berdasarkan jenis kelamin, pendidikan laki-laki masih relatif sedikit lebih baik dibandingkan dengan perempuan. Berdasarkan usia, penduduk dengan usia >50 tahun mayoritas berpendidikan rendah.

Proporsi penduduk dengan ijazah tertinggi SD/ sederajat atau belum memiliki ijazah sedikit lebih tinggi di kelompok usia 0-29 tahun dikarenakan pada kelompok usia ini terdapat penduduk yang masih bersekolah. Proporsi penduduk usia 30-50 tahun yang menyelesaikan pendidikan menengah keatas adalah yang paling besar dibandingkan kelompok umur lainnya. Penduduk dengan status pendidikan tidak/ belum pernah bersekolah dan tidak bersekolah pada kelompok usia sekolah (5-24 tahun) memilih tidak melanjutkan pendidikannya dengan beberapa alasan, seperti tidak memiliki biaya yang cukup untuk bersekolah, merasa malu dengan kemampuan ekonomi keluarganya, menikah, serta berbagai alasan lainnya.

## Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten Pangkep memiliki capaian IPM yang secara konsisten berada di bawah rata-rata nasional dan provinsi. Kabupaten Pangkep sudah memiliki nilai yang cukup baik pada indikator pengeluaran per kapita, nilainya berada di atas rata-rata nasional dan provinsi. Namun untuk indikator lainnya seperti angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah masih berada di bawah rata-rata nasional dan provinsi. Indikator harapan hidup merupakan yang paling rendah diantara indikator lainnya. Hal ini menandakan perlunya perbaikan di sektor kesehatan masyarakat.

## Profil Kesehatan

Berdasarkan data riset kesehatan dasar (riskesdas), fasilitas Puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah adalah fasilitas kesehatan (faskes) yang paling banyak diketahui keberadaannya oleh masyarakat Pangkep. Namun keberadaan faskes tersebut nampaknya relatif jauh dari tempat tinggal jika dilihat dari lamanya waktu tempuh yang diperlukan untuk dapat mengaksesnya dibandingkan dengan rata-rata nasional. Data riskesdas juga mengungkapkan bahwa persentase rumah tangga di Kabupaten Pangkep dengan perilaku hidup sehat, relatif masih berada sedikit dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan namun masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional kecuali untuk perilaku benar dalam mencuci tangan. Hal menarik lainnya pada profil kesehatan adalah tingginya perilaku sedentari  $\geq 6$  jam, dimana persentase Kabupaten Pangkep berada di atas rata-rata provinsi dan nasional.

Pada aspek prevalensi status gizi balita, tinggi badan terhadap umur (TB/U) perlu mendapat perhatian karena status TB/U sangat pendek berada di atas rata-rata nasional dan provinsi. Sebaliknya prevalensi balita sangat kurus di Kabupaten Pangkep masih relatif lebih baik dibandingkan dengan nasional dan provinsi. Pada aspek jaminan kesehatan, sebagian besar penduduk Kabupaten Pangkep (72.97%) setidaknya memiliki satu jaminan kesehatan. Pada aspek konsumsi rokok, persentase perokok tembakau paling banyak ditemukan pada kelompok pengeluaran menengah dan tinggi. Sedangkan tingkat konsumsi rokok terendah ada pada penduduk kelompok pengeluaran terendah.

Terkait tempat melahirkan bagi perempuan usia 15-49 tahun, pada 2017, proses persalinan paling banyak dilakukan di rumah sakit (24.53%) dan rumah (20.67%). Meski persalinan banyak dilakukan di rumah, namun tenaga penolong proses melahirkan masih di dominasi oleh para tenaga kesehatan (97,72%). Secara umum, didasarkan pada beberapa indikator kesehatan yang ditetapkan BPS, khusus untuk indikator keluhan kesehatan, berobat jalan, dan rawat inap persentase Pangkep masih dibawah rata-rata provinsi dan nasional sedangkan penolong proses melahirkan oleh tenaga kesehatan terlihat sudah baik di angka 97.72%.

## Profil Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada 2017, sebagian besar perempuan (80,48%) memilih keluar dari angkatan kerja karena mengurus



rumah tangga dan hanya sebagian kecil (13,76%) yang keluar karena alasan pendidikan/sekolah. Kondisi ini berkebalikan dengan laki-laki yang justru sebagian besar keluar dari angkatan kerja karena pendidikan. Dilihat dari karakteristik angkatan kerja, baik pada laki-laki maupun perempuan, proporsi terbesar berdasarkan usia adalah pada penduduk usia dewasa (30-50 tahun) sedangkan menurut pendidikan adalah kelompok pendidikan SD/ sederajat atau belum memiliki ijazah.

Pada 2017, diantara angkatan kerja terdapat 92.95% yang berstatus bekerja, dimana kesempatan kerja laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Namun tidak ada perbedaan besar dari pola karakteristik penduduk berusia >15 tahun yang bekerja menurut jenis kelamin, yaitu baik pada laki-laki maupun perempuan sebagian besar penduduk yang bekerja merupakan kelompok usia 30-50 tahun (dewasa), memiliki ijazah tertinggi SD/ sederajat atau belum memiliki ijazah dan bekerja selama >35 jam/minggu. Berdasarkan lapangan usaha, sebagian besar penduduk >15 tahun bekerja pada sektor pertanian yang merupakan sektor dengan rata-rata upah paling sedikit dibandingkan sektor kerja lainnya.

Meskipun sebagian besar angkatan kerja di Pangkep berstatus bekerja, namun sebagian kecil terdapat yang menganggur. Sepanjang 2013-2017, secara konsisten Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan di Kabupaten Pangkep konsisten selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Namun tidak ada perbedaan struktur penduduk yang menganggur berdasarkan jenis kelamin, yaitu penduduk yang menganggur paling banyak ditemukan pada usia 15-29 tahun (anak dan pemuda) dan kelompok yang memiliki ijazah tertinggi >SMP/ sederajat.

## Profil Rumah Tangga dan Akses terhadap Air serta Sanitasi Layak

Hasil survei BPS memperlihatkan bahwa pada 2017 di Kabupaten Pangkep, terdapat 94.86% rumah tangga yang memiliki atap terluas yang terbuat dari seng, 53.00% rumah tangga tinggal di rumah dengan lantai terluas terbuat dari kayu/papan, dan 31.33% diantaranya tinggal di rumah dengan dinding yang terbuat dari tembok. Selain itu di Kabupaten Pangkep, terdapat 85.10% keluarga tinggal di bangunan milik sendiri, lebih dari itu 94.58% rumah tangga mengaku menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan utama dan 91.65% rumah tangga menggunakan gas elpiji 3kg sebagai bahan bakar utama dalam memasak.

Pada tahun 2013 dan 2014 Kabupaten Pangkep memiliki persentase akses terhadap air layak yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasional dan provinsi. Pada 2016, akses terhadap air layak mengalami penurunan dan kemudian meningkat lagi pada tahun berikutnya. Pada 2017, akses air layak di Kabupaten Pangkep berada diatas angka nasional namun masih berada dibawah angka provinsi. Berdasarkan kelompok pengeluaran, rumah tangga pada kelompok pengeluaran pertama (pengeluaran terendah) lebih sulit mendapat akses air layak dibandingkan rumah tangga pada kelompok lainnya.

Pada indikator akses sanitasi layak, Kabupaten Pangkep berada di atas rata-rata nasional pada 2013 dan 2014, namun mengalami penurunan hingga di bawah rata-rata nasional pada tahun 2015. Angka ini mengalami proses kenaikan kembali dan mendekati rata-rata provinsi di tahun 2017. Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, konsisten memiliki persentase rumah tangga yang mengakses sanitasi layak paling tinggi di semua tahun sepanjang 2013-2017 di bandingkan dengan nasional dan Kabupaten Pangkep. Sebagaimana pada kondisi akses terhadap air layak, kelompok pengeluaran terendah lebih sulit mendapat akses sanitasi layak dibandingkan rumah tangga pada kelompok pengeluaran lainnya.

# Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Pangkep

## Tren dan Pola Distribusi Pengeluaran Masyarakat

Dibandingkan dengan kabupaten lain, Pangkep termasuk salah satu kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang tingkat kemiskinannya paling tinggi, bergantian dengan Jeneponto. Sepanjang 2010-2017, tingkat kemiskinan Pangkep lebih tinggi dibandingkan Jeneponto. Baru pada Maret 2018 Pangkep menempati posisi kedua terbawah. Namun demikian, sumbangan Pangkep terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan, masih berada di bawah kota/kabupaten lain yang relatif padat penduduknya, seperti Kota Makassar dan Kabupaten Bone. Secara relatif, kondisi kemiskinan masyarakat dapat dilihat melalui pola distribusi pengeluaran masyarakat. Sekitar 49,703 jiwa dari penduduk Pangkep yang termasuk dalam 40% kelompok penduduk terbawah di seluruh Indonesia dan Pangkep hidup di bawah garis kemiskinan (GK). Kondisi tersebut, mengindikasikan adanya kerentanan pada 40% masyarakat terbawah. Jika terjadi guncangan yang menyebabkan perubahan negatif pada pola pengeluaran dan peningkatan garis kemiskinan, maka tingkat kemiskinan akan naik signifikan.

## Karakteristik Kemiskinan di Kabupaten

Bonus demografi di kelompok penduduk miskin terhambat karena tingginya proporsi penduduk miskin usia produktif sepanjang 2011-2015. Terjadi pula pergeseran sebaran penduduk miskin di Pangkep menurut tingkat pendidikan. Penduduk miskin yang menamatkan SMP serta SMA pada kurun waktu 2011-2015 meningkat, sebaliknya terjadi penurunan penduduk miskin yang tamatan SD dan tidak menyelesaikan SD. Ini memperlihatkan adanya perbaikan di sektor pendidikan, sekaligus perlunya memberikan perhatian pada kemiskinan di kelompok anak dan anak muda. Pada penyerapan tenaga kerja, nampak bahwa dibandingkan pada 2011, pada 2015 telah terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja kelompok miskin pada sektor pertanian, sedangkan pada sektor industri dan jasa justru terjadi peningkatan. Namun demikian, masih diperlukan dukungan bagi pengembangan pada usaha mikro dan kecil bagi penduduk miskin, mengingat sebagian besar penduduk miskin masih tergantung pada industri pengolahan skala mikro dan kecil serta jasa informal yang rentan terhadap guncangan dan ketat dalam hal persaingan, serta rendahnya akses terhadap sumber permodalan dan informasi.

## Karakteristik Kemiskinan di Beberapa Wilayah

Berdasarkan wilayah, di Pangkep terdapat hubungan negatif antara jumlah penduduk termiskin dengan tingkat kemiskinan yaitu desa/kelurahan yang penduduk miskinnya relatif tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang relatif rendah. Kondisi ini erat kaitannya dengan jumlah penduduk yang menempati suatu desa/kelurahan. Desa/kelurahan yang penduduknya relatif banyak cenderung memiliki tingkat kemiskinan rendah namun jumlah penduduk miskinnya tinggi.

## Tinjauan Kebijakan dan Program

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan pembangunan daerah Pangkep yang diidentifikasi pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkep 2016-2021. Pelaksanaan RPJMD setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Baik pada RKPD 2016, 2017 maupun 2018, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah.

Program penanggulangan kemiskinan dan atau peningkatan kesejahteraan di Pangkep terdiri dari program nasional, daerah, program dari lembaga donor yang dilaksanakan oleh lembaga swadaya

masyarakat (LSM) dan program pada skema tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR). Analisis data sekunder terhadap data tiga program bantuan sosial (bansos) yaitu program Beras Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Susenas 2017 memperlihatkan bahwa di Pangkep, kelompok dengan pengeluaran terendah memperoleh persentase kombinasi tiga program paling tinggi. Namun kesalahan target bansos masih tetap ditemukan karena masih ada keluarga dari kelompok pengeluaran menengah kebawah dan menengah yang masih mendapat kombinasi tiga program bansos. Dari berbagai program unggulan daerah, hanya ditemukan satu program yang memanfaatkan Basis Data Terpadu (BDT) 2015 sebagai sumber verifikasi data bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program yaitu program bedah rumah. Program-program lainnya lebih ditujukan bagi peningkatan akses layanan publik bagi seluruh masyarakat. Pada program peningkatan kesejahteraan yang dilaksanakan OPD, umumnya tidak ada penekanan khusus bahwa program ditujukan untuk kelompok miskin dengan kriteria kemiskinan tertentu. Beberapa program memang mensyaratkan penerima manfaat adalah petani kecil/nelayan kecil/wirausaha kecil. Pada kondisi ini memang ada peluang bahwa penerima manfaat adalah masyarakat miskin, meskipun bukan berarti yang paling miskin dalam masyarakat. Program dari lembaga donor yang dilaksanakan oleh LSM umumnya berupa peningkatan akses terhadap layanan dasar baik pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun identitas hukum. Program yang dilaksanakan ditujukan bagi kelompok masyarakat tertentu termasuk kelompok miskin. Sementara program CSR umumnya berfokus pada kelompok masyarakat yang paling berdekatan/berada pada lingkungan operasi perusahaan/lembaga. Bentuk kegiatannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kajian ini juga menemukan bahwa terdapat upaya Pemda Pangkep untuk memperbaiki data rumah tangga miskin melalui survei pendataan kebutuhan pangan dan non pangan rumah tangga miskin dan pemutakhiran BDT pada 2018.

Berdasarkan wawancara dan diskusi dengan beberapa pihak terkait, kajian ini mengidentifikasi beberapa tantangan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan secara khusus maupun program peningkatan kesejahteraan secara umum. Antara lain keterbatasan anggaran program, terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia untuk pelaksanaan program, belum memadainya data terpadu kemiskinan yang dapat diakses dalam rangka penanggulangan kemiskinan, belum adanya regulasi afirmatif yang mengatur mengenai upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten Pangkep, pola pikir masyarakat dan pelaksana program yang menghambat program penanggulangan kemiskinan dan kendala geografis.

## Rekomendasi Kebijakan

Kajian ini merekomendasikan sejumlah terobosan pengurangan kemiskinan. Dalam jangka panjang, upaya peningkatan sumberdaya manusia, akan menjadi kunci pengurangan kemiskinan. Hal ini perlu diupayakan tidak hanya dengan meningkatkan akses kepada fasilitas pendidikan dan penurunan biaya pendidikan, namun juga dengan menangani berbagai hambatan sosial budaya yang menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam jangka panjang dan menengah, kualitas lingkungan hidup perlu diperhatikan untuk memastikan kesinambungan mata pencaharian, khususnya di sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tumpuan penghidupan bagi sebagian besar masyarakat terutama masyarakat miskin. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk menciptakan lapangan kerja baru dan sebisa mungkin meningkatkan aktivitas perekonomian daerah agar peredaran uang tidak keluar ke daerah lain. Hal penting lainnya adalah perlu ada regulasi afirmatif dalam kerangka penanggulangan kemiskinan untuk memastikan berbagai upaya pengentasan kemiskinan dijalankan secara lebih fokus dan terarah. Pada jangka menengah dan pendek diperlukan keterpaduan program bantuan sosial dan program peningkatan pendapatan agar mampu meningkatkan pendapatan penduduk miskin secara signifikan.

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Ketika Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dinyatakan sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), banyak pihak merasa terpukul dan meragukan data-data yang digunakan untuk menentukan peringkat tersebut karena beranggapan bahwa masyarakat Pangkep tidak ada atau tidak banyak yang miskin. Kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita Pangkep merupakan salah satu yang tertinggi di Sulsel juga menjadi fenomena yang kontradiktif. Namun penobatan Pangkep sebagai kabupaten termiskin ini telah menggerakkan berbagai pihak untuk berupaya memahami kondisi kemiskinan di Pangkep, dan berupaya mencari upaya terobosan untuk mengurangi kemiskinan di Pangkep.

Laporan ini disusun oleh tim peneliti SMERU Research Institute atas permintaan Balitbangda Kabupaten Pangkep, yang merasa membutuhkan analisis kemiskinan secara holistik dalam upaya untuk dapat memberikan masukan kebijakan bagi Pemda.

## 1.2 Tujuan

Secara umum kajian ini ditujukan untuk memahami kondisi kemiskinan di Kabupaten Pangkep, dalam rangka mencari alternatif kebijakan pengurangan kemiskinan. Secara lebih spesifik, kajian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan daerah, khususnya yang terkait dengan kemiskinan?
2. Bagaimana profil penduduk miskin dan rentan miskin?
3. Faktor-faktor apa yang memengaruhi dinamika kemiskinan?
4. Kebijakan dan program apa yang telah dilakukan dalam upaya mengurangi kemiskinan dan bagaimana efektivitasnya?

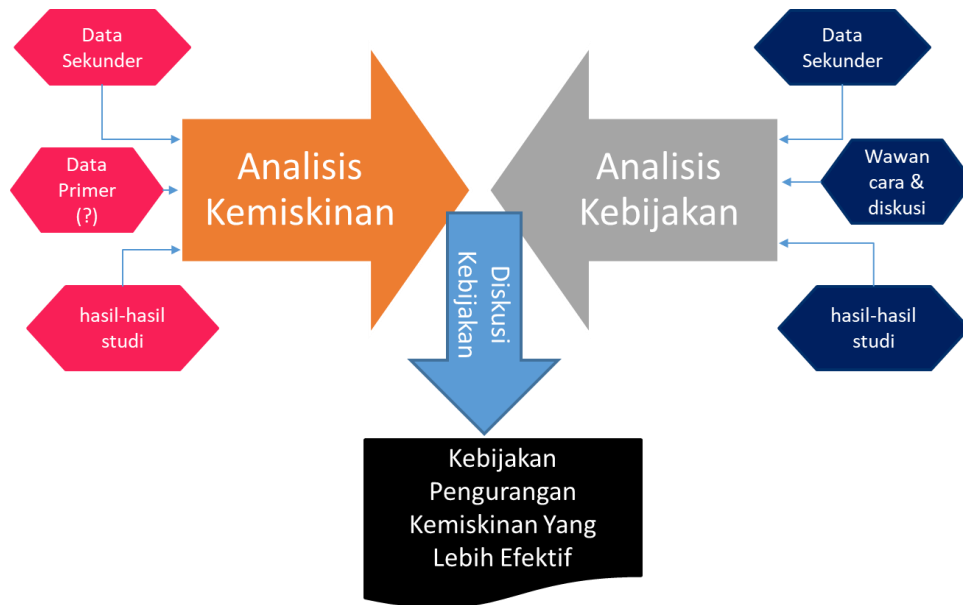
Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, diharapkan dapat disusun rekomendasi kebijakan penanggulangan yang lebih komprehensif.

## 1.3 Pendekatan dan Metodologi

Kajian ini dilakukan dengan menggabungkan analisis statistik diskriptif menggunakan data-data sekunder, kajian dokumen-dokumen terkait, dan analisis berdasarkan data kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara dan diskusi terarah (FGD). Secara garis besar, dalam kajian ini dilakukan analisis kondisi kemiskinan dan analisis kebijakan; dan keduanya diarahkan untuk menyusun alternatif kebijakan pengurangan kemiskinan.

Data sekunder yang dijadikan bahan analisis meliputi data makro perekonomian yang dikumpulkan dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), data dari Peta Kemiskinan dan Penghidupan yang disusun SMERU, dan data mikro dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 dan Basis Data Terpadu (BDT) 2015. Dokumen yang dikaji meliputi berbagai dokumen perencanaan Pemerintah Daerah (Pemda) Pangkep dan laporan penelitian yang relevan. Adapun data kualitatif dikumpulkan melalui

wawancara dan diskusi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda Pangkep, BPS Kabupaten, berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan program yang didanai donor, pemerintah kelurahan/desa serta masyarakat di tiga desa/kelurahan – yaitu: Kelurahan Mattiro Sompe, Kecamatan Liukang Tupabbiring; Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci; dan Desa Kanaungan, Kecamatan Labakkang. Selain ketiga desa/kelurahan tersebut, tim peneliti juga melakukan wawancara dan pengamatan lapangan ke Desa Mattaro Adae, Kecamatan Liukang Tupabbiring. Pemilihan desa/kelurahan sampel tersebut didasarkan pada pertimbangan adanya tiga tipologi utama kehidupan masyarakat di Kabupaten Pangkep, yaitu daerah kepulauan, pesisir, dan dataran tinggi.



**Gambar 1. Skema Rangkaian Analisis dalam Kajian Kemiskinan di Pangkep**

Persiapan kajian ini mulai dilakukan pada Mei 2018 dan diskusi-diskusi awal dilakukan pada Juli 2018. Pengolahan data-data sekunder dilakukan pada Agustus-Oktober 2018. Sedangkan wawancara, FGD, dan kunjungan ke desa/kelurahan sampel dilakukan pada Oktober 2018.

## 1.4 Sistematika Laporan

Laporan ini terdiri dari lima bab. Bab pertama berisi latar belakang, tujuan, pendekatan dan metodologi serta sistematika laporan. Bab kedua menyajikan gambaran umum kondisi sosial-ekonomi di Kabupaten Pangkep, yang antara lain menyoroti gambaran umum, profil sosial, kesehatan, tenaga kerja, rumah tangga, akses terhadap air dan sanitasi yang layak di Pangkep. Bab ketiga secara khusus menyoroti kondisi penduduk miskin, termasuk tren dan pola distribusi pengeluaran masyarakat, beserta karakteristik kemiskinan di Pangkep. Bab keempat memaparkan kebijakan dan program yang terkait dengan upaya pengurangan kemiskinan dan tantangannya. Bab kelima menyajikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

## II. GAMBARAN UMUM DAN PROFIL SOSIAL EKONOMI KABUPATEN PANGKEP

### 2.1 Gambaran Umum Kabupaten Pangkep

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Pangkajene. Secara geografis terletak pada 11.00' bujur timur dan 040.40'-080.00' lintang selatan dengan total luas wilayah 1112.29 km<sup>2</sup>. Secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Barru di sebelah Utara, Kabupaten Maros di sebelah Selatan, Kabupaten Bone di sebelah Timur dan Pulau Kalimantan, Jawa, Madura, Nusa Tenggara, serta Bali di sebelah selatan. Di tahun 2017 Kabupaten Pangkep memiliki total 13 Kecamatan dan 103 Desa/Kelurahan dengan kecamatan terluas Bolocci (12.90%) dan Liukang Tangaya (10.79%). Kabupaten Pangkep adalah salah satu kabupaten istimewa yang tidak hanya memiliki wilayah daratan melainkan juga daerah kepulauan. Oleh karena itu terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten Pangkep yang berbatasan langsung dengan laut seperti Kecamatan Liukang Tangaya, Kalmas, Tupabbiring, dan Tupabbiring Utara. Kecamatan-kecamatan ini memiliki luas wilayah laut yang dominan dibandingkan daratan, terutama untuk Kecamatan Liukang Tupabbiring dan Tupabbiring Utara yang hampir 96% wilayah administratifnya berada di laut seperti yang tersaji di Tabel 1. Besarnya wilayah laut di Kabupaten Pangkep menyebabkan sulitnya akses beberapa kecamatan ke ibukota kabupaten yang berada di pulau utama (Pulau Sulawesi). Kecamatan dengan jarak terjauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Liukang Tangaya (219.29 km) yang dekat dengan Pulau Kalimantan dan Kecamatan Liukang Kalmas (209.21 km) yang dekat dengan Pulau Nusa Tenggara

**Tabel 1. Kecamatan dan Luas Wilayah**

Kecamatan	Daratan		Lautan		Total	
	Luas km <sup>2</sup>	Persen	Luas km <sup>2</sup>	Persen	Luas km <sup>2</sup>	Persen
Liukang Tangaya	47.71	39.76%	72.29	60.24%	120	10.79%
Liukang Kalmas	35.89	39.22%	55.61	60.78%	91.5	8.23%
Liukang Tupabbiring	2.03	3.73%	52.41	96.27%	54.44	4.89%
Liukang Tupabbiring Utara	2.8	3.27%	82.76	96.73%	85.56	7.69%
Pangkajene	47.39	100.00%	0	0.00%	47.39	4.26%
Minasatene	76.48	100.00%	0	0.00%	76.48	6.88%
Bolocci	143.48	100.00%	0	0.00%	143.48	12.90%
Tondong Tallasa	111.2	100.00%	0	0.00%	111.2	10.00%
Bungoro	90.12	100.00%	0	0.00%	90.12	8.10%
Labakkang	97.48	99.00%	0.98	1.00%	98.46	8.85%
Ma'rang	75.12	99.87%	0.1	0.13%	75.22	6.76%
Segeri	78.28	100.00%	0	0.00%	78.28	7.04%
Mandalle	40.16	100.00%	0	0.00%	40.16	3.61%
<b>Kabupaten Pangkep</b>	<b>848.14</b>	<b>76.25%</b>	<b>264.15</b>	<b>23.75%</b>	<b>1112.29</b>	<b>100%</b>

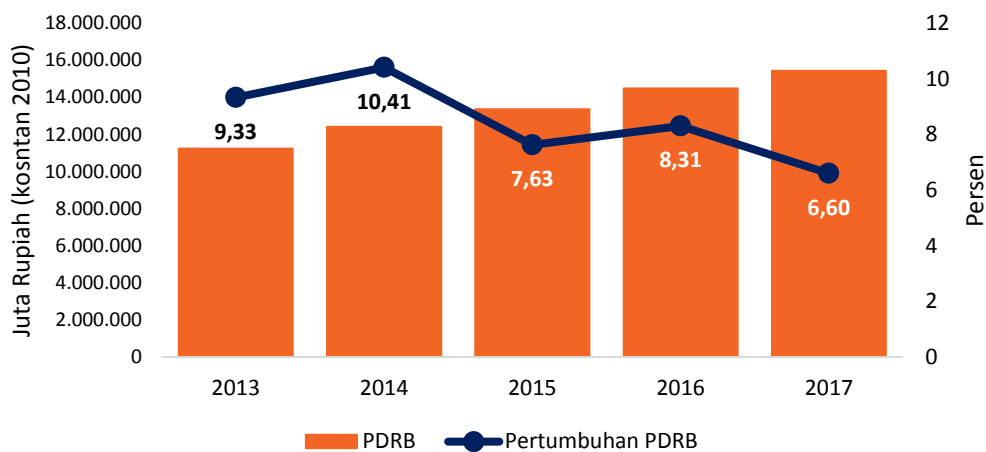
Sumber: BPS (Pangkajene dan Kepulauan dalam angka, 2018)

## 2.2 Profil Sosial Ekonomi Kabupaten Pangkep

Pada bagian ini akan dibahas setiap aspek sosial ekonomi yang ada di Kabupaten Pangkep meliputi profil ekonomi, individu, keluarga, dan tenaga kerja

### 2.2.1 Profil Ekonomi

Pada dasarnya perekonomian di Kabupaten Pangkep dalam lima tahun terakhir (2013-2017) terus tumbuh diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya berkisar diangka 5%. Hal ini juga tercermin dengan sangat baik pada Gambar 2 dimana nilai PDRB Kabupaten Pangkep secara konsisten terus mengalami peningkatan dengan tahun dasar 2010. Namun demikian, dalam kurun waktu yang sama pula pertumbuhan ekonominya tidak jarang mengalami perlambatan, misalnya pada tahun 2015 dan 2017 terlihat nyata perlambatan pertumbuhannya. Meski mengalami perlambatan namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkep masih berada di atas rata-rata nasional.

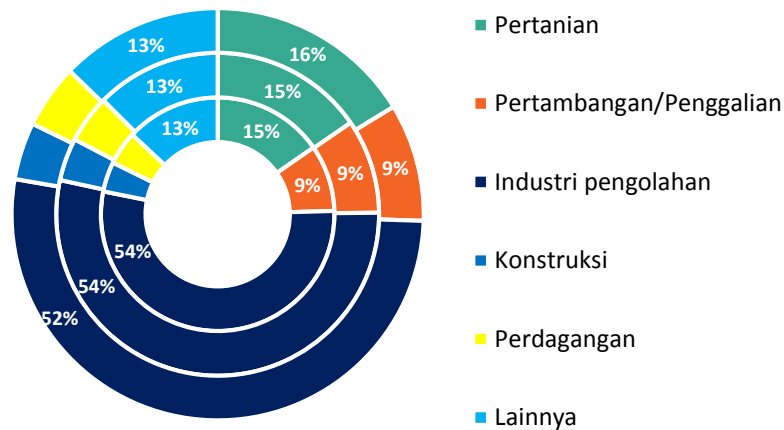


**Gambar 2. PDRB dan Pertumbuhan PDRB (Konstan 2010)**

Sumber: BPS (data diolah)

Sedangkan dari sisi lapangan usaha, Kabupaten Pangkep memiliki lapangan usaha yang pada industri pengolahan, pertanian, pertambangan/penggalan, konstruksi, dan perdagangan dimana lebih dari 50% sumber penghasilan daerah Kabupaten Pangkep ada di industri pengolahan. Adanya industri pengolahan semen di daerah ini memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perputaran roda ekonomi di Kabupaten Pangkep. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya sumbangan proporsi dari sisi lapangan usaha industri pengolahan. Dampak lain dari besarnya *share* industri pengolahan terhadap PDRB adalah tingginya sensitivitas pertumbuhan industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkep. Dua variable ini memiliki trend yang sama dalam kurun waktu 5 tahun terakhir seperti yang dapat dilihat pada Lampiran 1. Sedangkan untuk lapangan usaha lain seperti sektor pertanian dan pertambangan/penggalan juga memiliki pengaruh yang cukup besar, meski tidak sebesar industri pengolahan dengan masing masing proporsi 16.27% dan 9.24% pada tahun 2017. Hal ini dapat dilihat dengan lebih jelas pada Gambar 3 sebagai berikut





**Gambar 3. PDRB Menurut Lapangan Usaha 2015-2017**

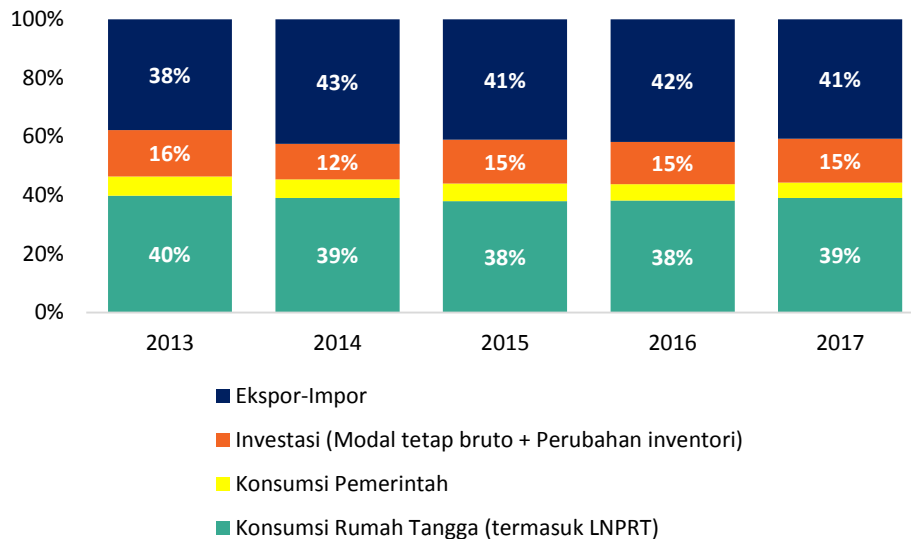
Sumber: BPS (data diolah)

Selanjutnya melihat PDRB Kabupaten Pangkep dari sisi pengeluaran. Dari Gambar 4 terlihat jelas bahwa proporsi terbesar PDRB berasal dari kelompok ekspor-impor dan konsumsi rumah tangga konsisten selama 3 tahun terakhir. Sedangkan konsumsi pemerintah memiliki share pengeluaran terhadap PDRB paling kecil diantara kelompok pengeluaran lainnya. Tingginya proporsi ekspor-impor terhadap PDRB ini juga dipengaruhi oleh industri pengolahan semen yang berada di Kabupaten Pangkep. Banyaknya semen hasil olahan yang dihasilkan oleh pabrik semen ini dapat menjadi sumber penghasilan yang tinggi melalui penjualan ke luar wilayah administratif Kabupaten Pangkep

Selain itu, tumbuhnya nilai PDRB Kabupaten Pangkep tiap tahunnya memberikan dampak positif terhadap indikator ekonomi lainnya, sebagai contoh nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat pendapatan masing-masing penduduk suatu wilayah dalam satu periode tertentu. Semakin tinggi nilainya semakin tinggi pula perkiraan pendapatan penduduk dalam periode tersebut. Khusus untuk Kabupaten Pangkep nilai PDRB per kapitanya relatif tinggi bahkan diatas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk melihat perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Pangkep dapat dilihat pada Gambar 5.

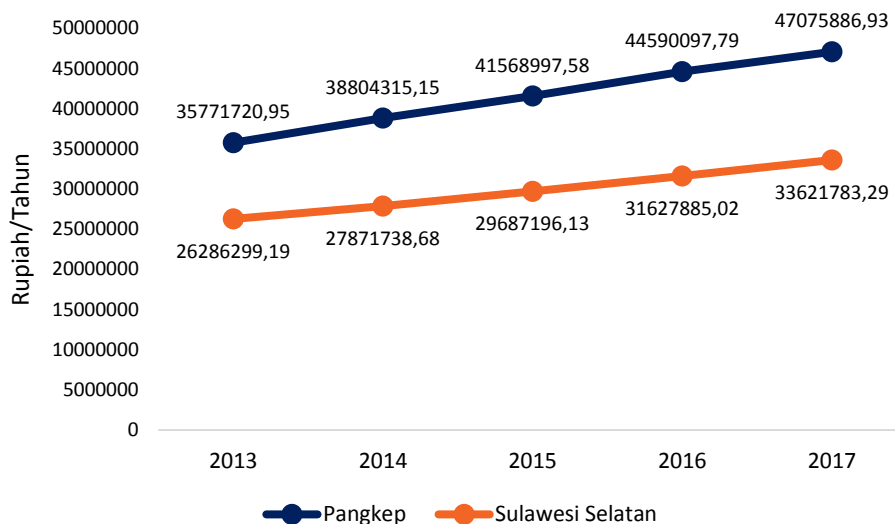
Kabupaten Pangkep juga memiliki kondisi perekonomian yang lebih baik dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dilihat dari capaian peringkat yang dimiliki dalam periode lima tahun terakhir. Sebagai contoh pertumbuhan ekonomi misalnya. Secara peringkat rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkep berada di posisi ke dua (8.46%) setelah Kabupaten Talakar. Sedangkan dari *size* ekonomi, PDRB Kabupaten Pangkep ada di peringkat ke empat setelah Kota Makassar, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya untuk PDRB per kapita Kabupaten Pangkep berada di posisi ke tiga setelah Kota Makassar dan Kabupaten Luwu Timur. Hal ini dapat dilihat lebih jelas pada lampiran 2.





**Gambar 4. PDRB Menurut Pengeluaran 2013-2017**

Sumber: BPS (data diolah)



**Gambar 5. PDRB per Kapita (Tahun Dasar 2010)**

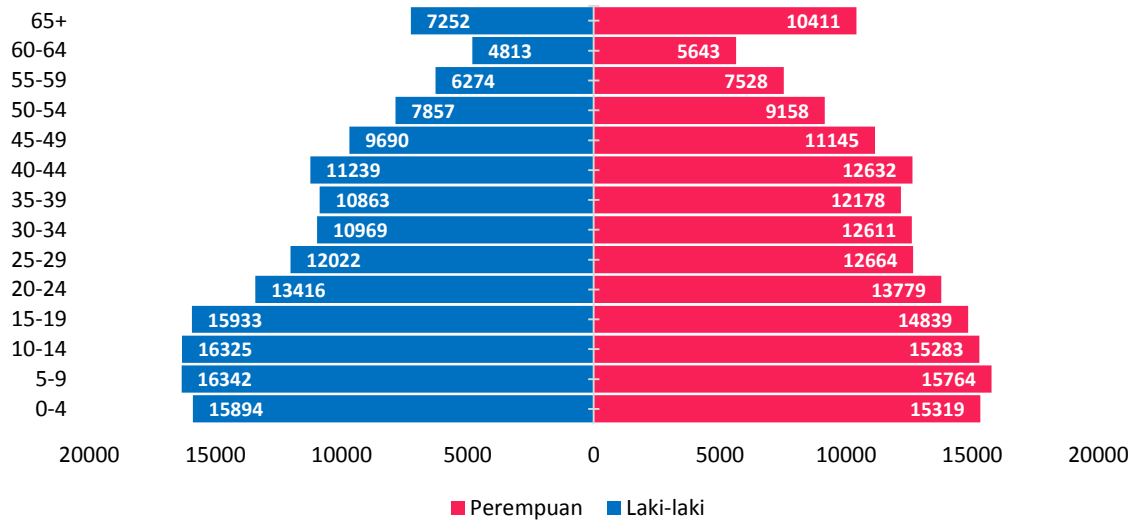
Sumber: BPS (data diolah)

## 2.2.2 Profil Penduduk Kabupaten Pangkep

### a) Gambaran Umum penduduk Kabupaten Pangkep

Jumlah penduduk Kabupaten Pangkep terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sebagai contoh, pada tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Pangkep sebesar 314466 jiwa dan bertambah menjadi 327843 jiwa di tahun 2018 atau tumbuh sebesar 4.25% dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Mayoritas penduduk di Kabupaten Pangkep tinggal di perdesaan mirip dengan beberapa karakteristik kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan lainnya. Misalnya pada tahun 2017 tercatat sebanyak 80.14% penduduk Kabupaten Pangkep yang tinggal di wilayah dengan karakteristik perdesaan, sedangkan 24.11% sisanya tinggal di wilayah dengan karakteristik perkotaan. Selanjutnya untuk struktur penduduk, berdasarkan usia, penduduk Kabupaten Pangkep

yang paling banyak ada pada kelompok penduduk anak dan pemuda (0-29 tahun) diikuti dengan kelompok penduduk dewasa (30-50 tahun) dan terakhir kelompok penduduk lanjut usia (lansia) (>50 tahun). Sebagai contoh, pada tahun 2017 terdapat 54.17% penduduk anak dan pemuda, 27.86% penduduk dewasa, dan 17.98% sisanya adalah penduduk lansia.



**Gambar 6. Piramida Penduduk Kabupaten Pangkep 2017**

Sumber: Susenas BPS (data diolah)

Di sisi lain struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan selisih yang tidak begitu besar. Misalnya pada tahun 2017 proporsi penduduk dengan jenis kelamin perempuan adalah 51.54% sedangkan laki-laki 48.46% dengan rasio jenis kelamin 94.04. Rasio jenis kelamin adalah indikator yang menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk perempuan pada satu daerah di suatu periode tertentu, biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 perempuan. Rasio jenis kelamin 94.04 artinya untuk 100 perempuan di Kabupaten Pangkep di tahun 2017 terdapat 94 laki-laki. Hal ini menyebabkan piramida penduduk Kabupaten Pangkep di tahun 2017 berimbang antara sisi kiri dan sisi kanan dan sedikit mengembung di bagian bawah seperti yang terlihat di Gambar 6

**Tabel 2. Struktur Penduduk, Rasio Ketergantungan, dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Pangkep 2013-2017**

Kategori	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Anak dan Pemuda (0-29 tahun)	56.88%	55.69%	54.99%	54.66%	54.17%
Dewasa (30-50 tahun)	27.63%	28.03%	28.08%	28.02%	27.86%
Lansia (>50 tahun)	15.49%	16.28%	16.92%	17.32%	17.98%
Usia Produktif	63.55%	64.62%	64.55%	64.58%	65.66%
Usia Non-produktif	36.45%	35.38%	35.45%	35.42%	34.34%
Rasio Ketergantungan	57.35	54.74	54.91	54.85	52.31
Rasio Jenis Kelamin	92.81	93.29	93.36	93.66	94.04

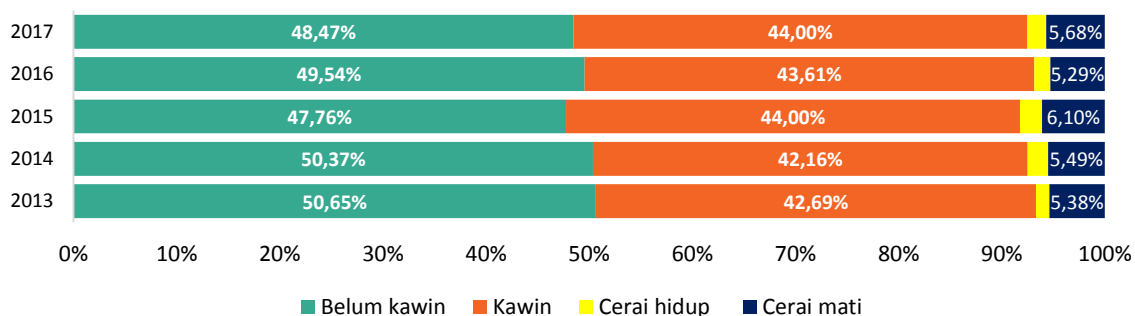
Sumber: Susenas BPS (data diolah)

Struktur penduduk berdasarkan usia juga dapat dilihat lebih jelas di Tabel 2. Lebih dari itu, pada tabel 2 juga terdapat proporsi penduduk produktif dan non produktif serta rasio ketergantungan. Secara konsisten proporsi usia produktif di Kabupaten Pangkep dalam lima tahun memiliki share 60% dari jumlah total penduduk, hal ini sejalan dengan nilai rasio ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Pangkep yang terus turun dari 57.35 di tahun 2013 menjadi 52.31 di tahun 2017. Nilai rasio ketergantungan ini mengukur beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan sudah tidak produktif lagi. Semakin rendah nilai rasio ketergantungan semakin baik artinya. Sebagai contoh nilai rasio ketergantungan kabupaten Pangkep pada tahun 2017 adalah 52.31. Hal ini berarti setiap 100 orang penduduk berusia produktif harus menanggung 52 orang penduduk yang belum atau tidak produktif lagi.

Berdasarkan data BPS, rasio ketergantungan Kabupaten Pangkep pada tahun 2015 masih lebih tinggi dibandingkan rasio ketergantungan Provinsi Sulawesi Selatan (52.9) dan nasional (48.6). Namun apabila kita melihat trend lima tahun terakhir sebagaimana disajikan di tabel 2 terlihat tanda penurunan yang konsisten dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa Kabupaten Pangkep masih dalam posisi menikmati bonus demografi dimana penduduk usia produktifnya lebih banyak dibandingkan penduduk non-produktif dan masih akan terus berkurang hingga nanti mencapai titik minimumnya. Namun demikian diperlukan usaha maksimal dari pemerintah agar bonus demografi ini dapat dimanfaatkan dengan baik, diantaranya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan agar mereka siap dalam menghadapi pasar tenaga kerja. Kegagalan memanfaatkan bonus demografi dapat berakibat fatal bagi pemerintah karena kedepannya mereka harus menanggung jumlah penduduk dengan usia non-produktif yang lebih banyak.

#### b) Status Perkawinan dan Dokumen Pribadi

Mayoritas penduduk Kabupaten Pangkep memiliki kepala keluarga dengan jenis kelamin laki-laki. Pada tahun 2017 misalnya, hampir 86.53% penduduknya memiliki kepala keluarga laki-laki dan 13.47% sisanya memiliki kepala keluarga perempuan. Jika melihat dari sisi status pernikahan hampir setengah penduduk Kabupaten Pangkep berstatus belum kawin dan hampir setengahnya lagi berstatus kawin, hanya sedikit dari penduduk Kabupaten Pangkep yang cerai mati dan cerai hidup. Hal ini dapat dilihat lebih jelas pada Gambar 7. Tingginya jumlah penduduk yang berstatus belum kawin adalah wajar mengingat lebih dari 50% jumlah penduduk Kabupaten Pangkep berstatus anak dan pemuda atau berusia 0-29 tahun. Dari mereka yang pernah kawin, masih banyak ditemukan penduduk Kabupaten Pangkep yang menikah muda. Pada tahun 2017, berdasarkan survei oleh BPS, ditemukan 45.32% penduduk Kabupaten Pangkep yang usia menikah pertamanya berada di rentang 10 – 20 tahun, kemudian 48.41% diantaranya menikah pertama di rentang usia 21-30 tahun dan 6.26% sisanya di rentang usia >30 tahun.



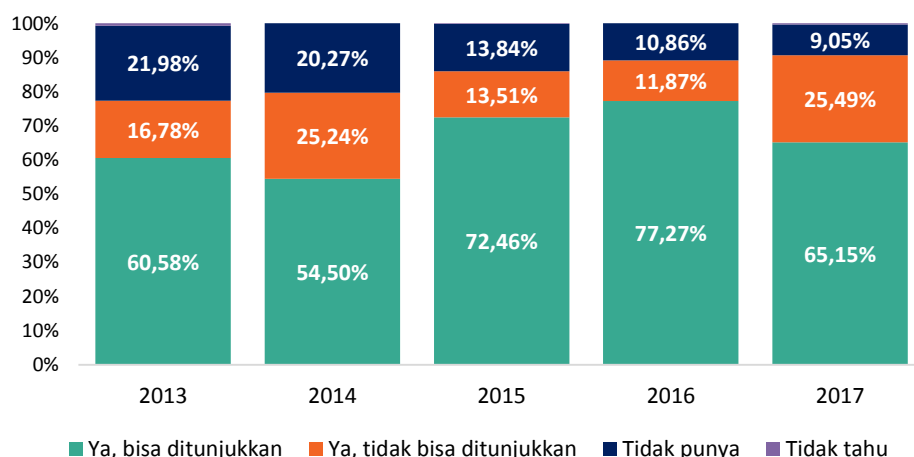
**Gambar 7. Penduduk Kabupaten Pangkep Menurut Status Perkawinan**

Sumber: Susenas BPS (data diolah)

Untuk dokumen pribadi seperti kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dari data survei BPS di tahun 2017 ditemukan bahwa 97.99% penduduk Kabupaten sudah memiliki NIK dan hanya 2.01% yang tidak memiliki NIK dengan rincian 97.11% penduduk laki-laki memiliki NIK dan 98.82% penduduk perempuan memiliki NIK. NIK adalah salah satu indikator penting dalam pencatatan kependudukan bagi suatu wilayah. Dari capaian data 2017 ini dapat kita simpulkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Pangkep setidaknya sudah memiliki NIK.

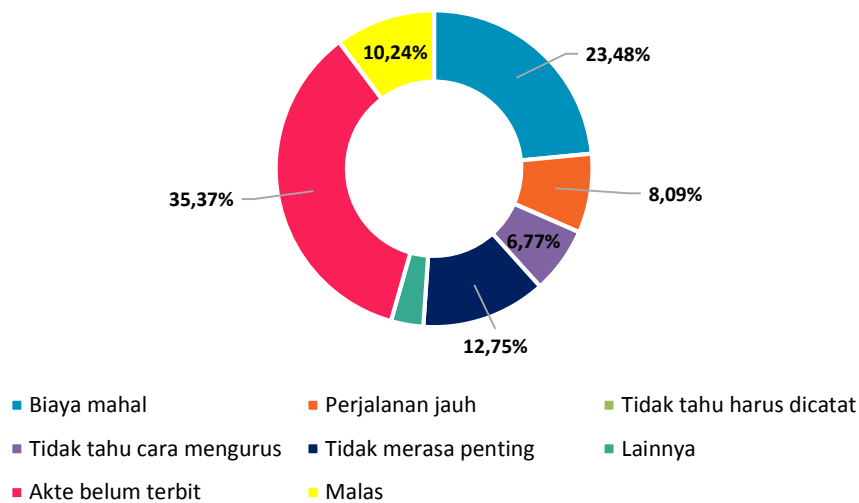
Sedangkan untuk kepemilikan akta lahir bagi anak berusia 0-17 tahun dapat kita lihat lebih jelas pada Gambar 8. Dari gambar tersebut, nampak jelas bahwa untuk anak berusia 0-17 tahun proporsi terbesarnya ada pada kelompok memiliki akta kelahiran dan bisa ditunjukkan konsisten untuk tiap tahun. Proporsi tertingginya ada di tahun 2016 (77.27%) yang kemudian turun menjadi 65.15% di tahun 2017. Sedangkan untuk proporsi kedua adalah memiliki akta namun tidak bisa ditunjukkan. Hal baik lainnya yang dapat dilihat dari Gambar 8 adalah proporsi anak berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta lahir terus menurun dalam periode 5 tahun terakhir. Berita ini tentu menjadi salah satu bukti dari peningkatan kesadaran penduduk Kabupaten Pangkep akan pentingnya akta lahir bagi anak – anak mereka terutama sebagai dokumen pribadi yang memiliki banyak manfaat kedepannya.

Meski mengalami trend penurunan semenjak lima tahun terakhir ini, kita masih dapat melihat alasan lebih jauh mengapa penduduk Kabupaten Pangkep berusia 0-17 tahun tidak memiliki akta lahir. Berdasarkan survei BPS di tahun 2016, ditemukan beberapa alasan mengapa orang tua anak tidak membuat akta lahir untuk anak – anak mereka. Adapun alasan – alasan orang tua tersebut antara tersaji pada Gambar 9. Alasan utama para penduduk berusia 0-17 tahun tidak memiliki akta lahir di tahun 2016 adalah akta belum terbit. Hal ini berarti orang tua sudah melakukan pengurusan pembuatan akta namun sampai dengan waktu survei dilakukan akta lahir tersebut belum selesai di proses. Namun demikian masih ada beberapa penduduk (23.48%) yang merasa tidak mampu mengurus akta lahir karena masalah biaya. Alasan berikutnya karena banyak orang tua yang merasa akta lahir tidak penting (12.75%) dan 10.24% diantaranya merasa malas mengurus akta lahir.



**Gambar 8. Kepemilikan Akta Lahir Kabupaten Pangkep**

Sumber: Susenas BPS (data diolah)

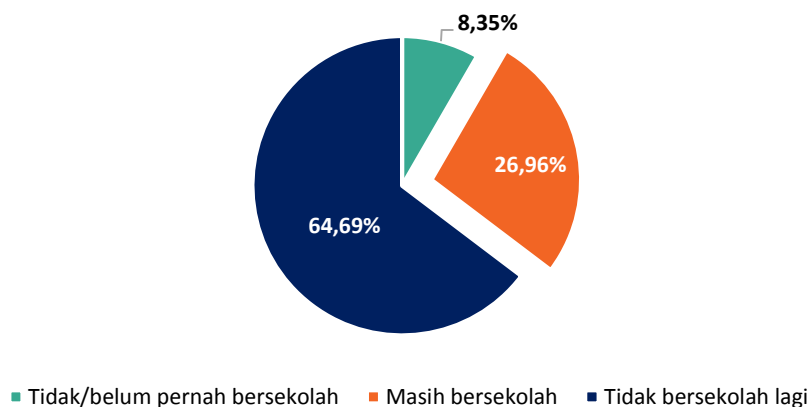


**Gambar 9. Alasan Penduduk 0-17 Tahun Tidak Memiliki Akta Lahir (2016)**

Sumber: Susenas BPS (data diolah)

### 2.2.3 Profil Pendidikan Penduduk Kabupaten Pangkep

Pada dasarnya, mayoritas penduduk Kabupaten Pangkep tidak bersekolah lagi. Hal ini tentu sangat wajar mengingat penduduk yang berusia sekolah (5-24 tahun) jumlahnya lebih sedikit dibandingkan penduduk yang berusia 25 tahun keatas. Berdasarkan Gambar 10, ditahun 2017 terdapat 64.69% penduduk Kabupaten Pangkep yang tidak bersekolah lagi, 26.96% yang sedang atau masih bersekolah dan 8.35% sisanya tidak/belum pernah bersekolah. Mereka yang ada pada kelompok tidak/belum pernah bersekolah termasuk diantaranya penduduk yang belum cukup usia untuk bersekolah

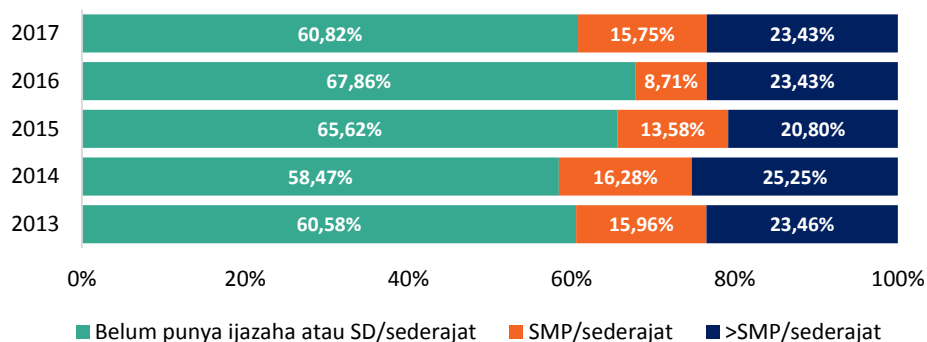


**Gambar 10. Status Pendidikan Penduduk Kabupaten Pangkep (2017)**

Sumber: Susenas BPS (data diolah)

Dari mereka yang pernah bersekolah (masih bersekolah dan tidak pernah bersekolah lagi) mayoritas penduduk Kabupaten Pangkep memiliki ijazah Sekolah Dasar (SD)/ sederajat atau belum memiliki ijazah. Proporsinya cukup besar di lima tahun belakang ini yaitu lebih dari 60%. Misalnya pada tahun 2017 ditemukan 60.82% penduduk Kabupaten Pangkep dengan pendidikan tertinggi SD/sederajat atau belum memiliki ijazah. Meski mayoritas penduduk Kabupaten Pangkep

berpendidikan rendah namun proporsi penduduk dengan ijazah tertinggi menengah keatas juga cukup tinggi yaitu lebih dari 20%. Sebagai contoh pada tahun 2017 ditemukan 23.43% penduduk Kabupaten Pangkep dengan ijazah tertinggi menengah ke atas (Sekolah Menengah Atas (SMA) dan universitas). Hal ini dapat dilihat lebih jelas pada Gambar 11.



**Gambar 11. Ijazah Tertinggi Penduduk Kabupaten Pangkep**

Sumber: Susenas BPS (data diolah)

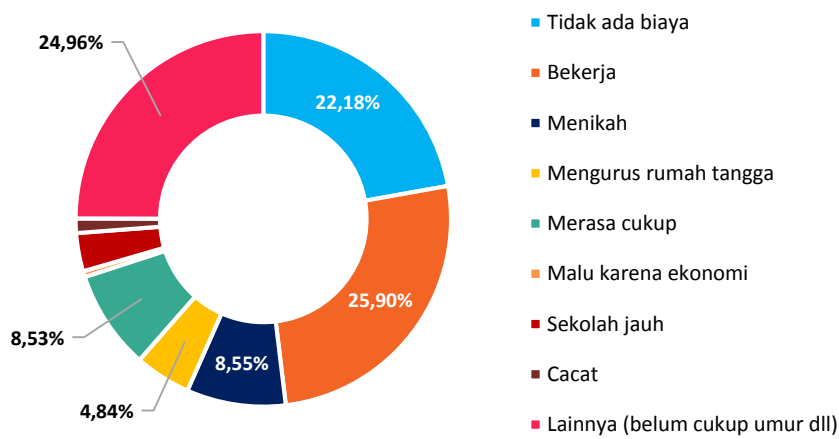
Sedangkan menurut jenis kelamin dapat dilihat bahwa pendidikan laki-laki masih relatif sedikit lebih baik dibandingkan dengan perempuan. Seperti yang tersaji di tabel 3 dimana proporsi laki-laki dengan ijazah tertinggi menengah ke atas lebih tinggi dibandingkan perempuan, serta proporsi laki-laki dengan ijazah tertinggi SD/ sederajat atau belum memiliki ijazah lebih kecil dibandingkan perempuan. Di sisi lain, berdasarkan usia nampak penduduk dengan usia >50 tahun mayoritas berpendidikan rendah. Hal ini tercermin dari proporsi ijazah tertinggi SD/ sederajat atau tidak memiliki ijazah sama sekali yang menyentuh angka 82.62%, sedangkan penduduk usia 0-29 tahun dan 30-50 tahun juga memiliki pendidikan dengan proporsi ijazah tertinggi paling tinggi di SD/ sederajat atau belum memiliki ijazah masing – masing 59.86% dan 61.74%. Proporsi penduduk dengan ijazah tertinggi SD/ sederajat atau belum memiliki ijazah sedikit lebih tinggi di kelompok usia 0-29 tahun dikarenakan pada kelompok usia ini terdapat penduduk yang masih bersekolah. Penduduk usia 30-50 tahun memiliki pendidikan terbaik relatif kelompok umur lainnya dengan proporsi ijazah tertinggi dengan pendidikan menengah keatas tertinggi di angka 30.16%

**Tabel 3. Ijazah Tertinggi Menurut Jenis Kelamin dan Usia (2017)**

Kategori	Belum punya ijazah atau SD/ sederajat	SMP/ sederajat	>SMP/ sederajat
Jenis kelamin			
Laki-laki	59.86%	15.86%	24.28%
Perempuan	61.74%	15.64%	22.62%
<b>Total</b>	<b>60.82%</b>	<b>15.75%</b>	<b>23.43%</b>
Usia			
0-29 tahun	58.52%	18.94%	22.55%
30-50 tahun	53.52%	16.33%	30.16%
>50 tahun	82.62%	4.87%	12.51%
<b>Total</b>	<b>60.82%</b>	<b>15.75%</b>	<b>23.43%</b>

Sumber: Susenas BPS (data diolah)

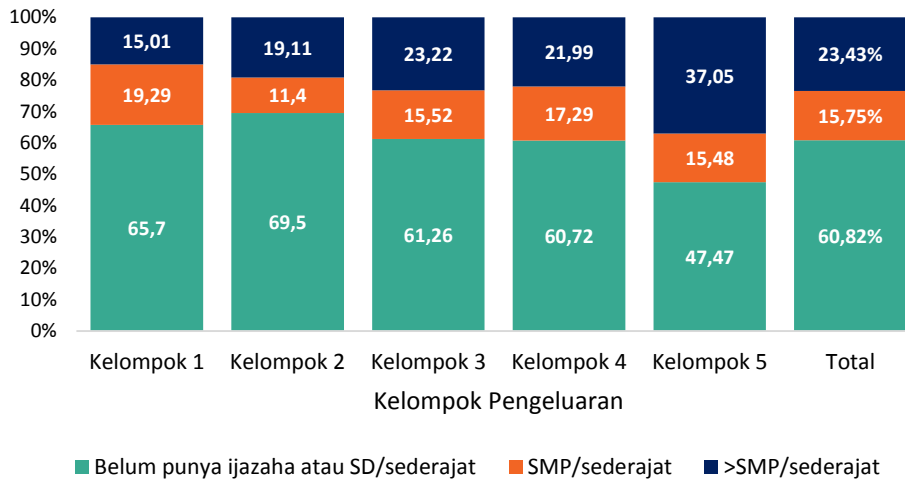
Penduduk dengan status pendidikan tidak/belum pernah bersekolah dan tidak bersekolah kelompok usia sekolah (5-24 tahun) memilih tidak melanjutkan pendidikannya dengan beberapa alasan. Menurut survei BPS pada tahun 2017 alasan terbanyak mengapa penduduk usia 5-24 tahun tidak melanjutkan pendidikan adalah karena alasan pekerjaan. Banyak dari penduduk usia 5-24 tahun yang putus sekolah dan lebih memilih untuk bekerja. Hal ini sejalan mengingat ada 22.18% (peringkat ke-3) anak yang putus sekolah dengan alasan tidak memiliki biaya yang cukup untuk bersekolah, 8.53% putus sekolah karena merasa cukup dengan pendidikannya. Sementara 24.96% menjawab alasan lainnya termasuk karena usia anak yang belum cukup umur. Disamping itu terdapat juga alasan lain seperti contohnya karena menikah. Ternyata 8.55% penduduk berusia 5-24 tahun putus sekolah karena menikah. Temuan ini serupa dengan permasalahan nikah muda sebelumnya dimana ditemukan 45.32% penduduk Kabupaten Pangkep yang usia menikah pertamanya berada di rentang 10 – 20 tahun.



**Gambar 12. Alasan Tidak/Belum Pernah Bersekolah Penduduk Usia 5-24 Tahun (2017)**

Sumber: Susenas BPS (data diolah)

Masih berbicara tentang pendidikan di Kabupaten Pangkep, jika kita membagi penduduk Kabupaten Pangkep menjadi lima kelompok menurut tingkat pengeluaran, maka kita akan mendapat kelompok pertama untuk kelompok dengan tingkat pengeluaran terendah. Selanjutnya kita akan mendapat kelompok ke dua dengan kelompok pengeluaran menengah kebawah dan kelompok ke tiga untuk kelompok pengeluaran menengah. Kelompok ke empat adalah kelompok dengan pengeluaran menengah keatas dan kelompok terakhir adalah kelompok ke lima dengan pengeluaran tertinggi. Dari Gambar 13 dapat kita lihat bahwa mayoritas kelompok memiliki proporsi pendidikan dengan ijazah tertinggi SD/ sederajat atau belum memiliki ijazah. Proporsi ini paling banyak ditemukan di kelompok kedua dan kelompok dengan tingkat pengeluaran terendah atau kelompok pertama. Selain memiliki proporsi tertinggi kedua (65.70%) untuk penduduk dengan ijazah tertinggi SD/ sederajat atau belum memiliki ijazah, kelompok pertama juga memiliki proporsi paling kecil untuk penduduk dengan ijazah tertinggi menengah keatas (15.01%). Berbanding terbalik dengan kelompok pengeluaran tertinggi dimana proporsi penduduk dengan ijazah tertinggi SD/ sederajat atau belum memiliki ijasahnya paling rendah (47.47%) dan proporsi penduduk dengan ijazah tertinggi menengah keatas paling besar (37.05%). Hal ini masih dapat dimaklumi mengingat kelompok dengan pengeluaran terendah sering diasosiasikan sebagai kelompok dengan penduduk termiskin dan kelompok dengan pengeluaran tertinggi sebagai kelompok dengan penduduk terkaya. Dalam kasus ini, setiap kelompok mewakili kurang lebih 20% dari total penduduk berusia 5 tahun keatas seperti yang tersaji digambar berikut.

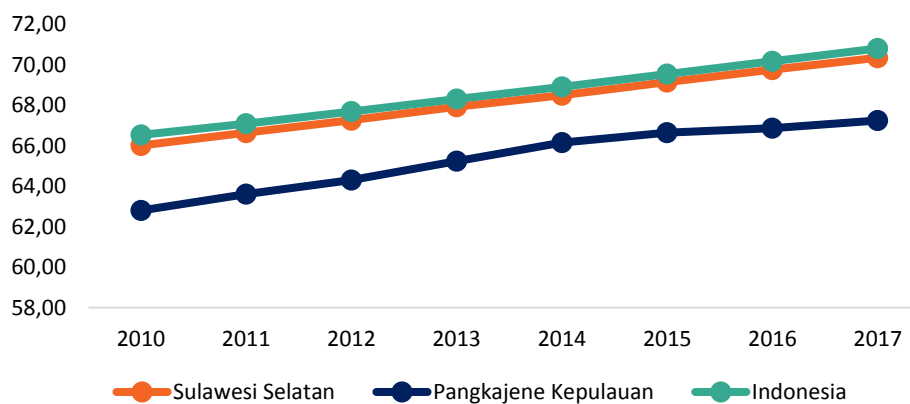


**Gambar 13. Ijazah Tertinggi Menurut Kelompok Pengeluaran (2017)**

Sumber: Susenas BPS (data diolah)

#### 2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangkep

Beberapa tahun kebelakang ini IPM sering dijadikan sebagai acuan atau indikator utama dalam menilai proses pembangunan manusia di suatu daerah pada satu waktu tertentu. Pada Gambar 14 terlihat capaian IPM untuk Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, dan rata-rata capaian nasional secara bersamaan. Kabupaten Pangkep memiliki capaian IPM yang secara konsisten berada di bawah rata-rata nasional dan provinsi. Selisihnya lumayan jauh dan terindikasi mulai mengalami perlambatan peningkatan sejak tahun 2015. Hal ini tentu menjadi kabar buruk bagi pemerintah Kabupaten Pangkep, sekaligus dapat menjadi sinyal utama untuk memperoleh perhatian khusus. Apabila di tinjau lebih lanjut Kabupaten Pangkep sudah memiliki nilai yang cukup baik pada indikator pengeluaran per kapita, nilainya berada di atas rata-rata nasional dan provinsi. Namun untuk tiga indikator lainnya seperti angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah masih berada di bawah rata-rata nasional dan provinsi. Dari tiga indikator yang masih dibawah rata-rata nasional dan provinsi, indikator angka harapan hidup adalah yang paling buruk, hal ini menandakan perlunya beberapa perbaikan di sektor kesehatan masyarakat. Gambar untuk tiap indikator IPM dapat dilihat di lampiran 3-6

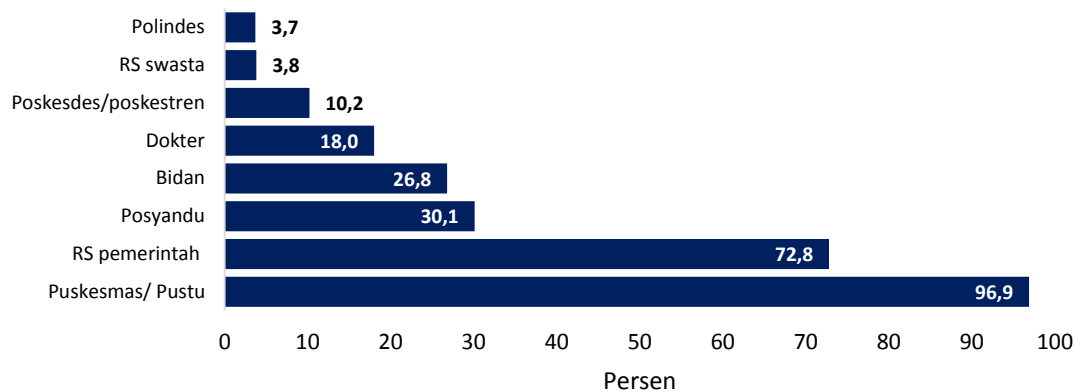


**Gambar 14. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pangkep**

Sumber: BPS



## 2.3 Profil Kesehatan Kabupaten Pangkep

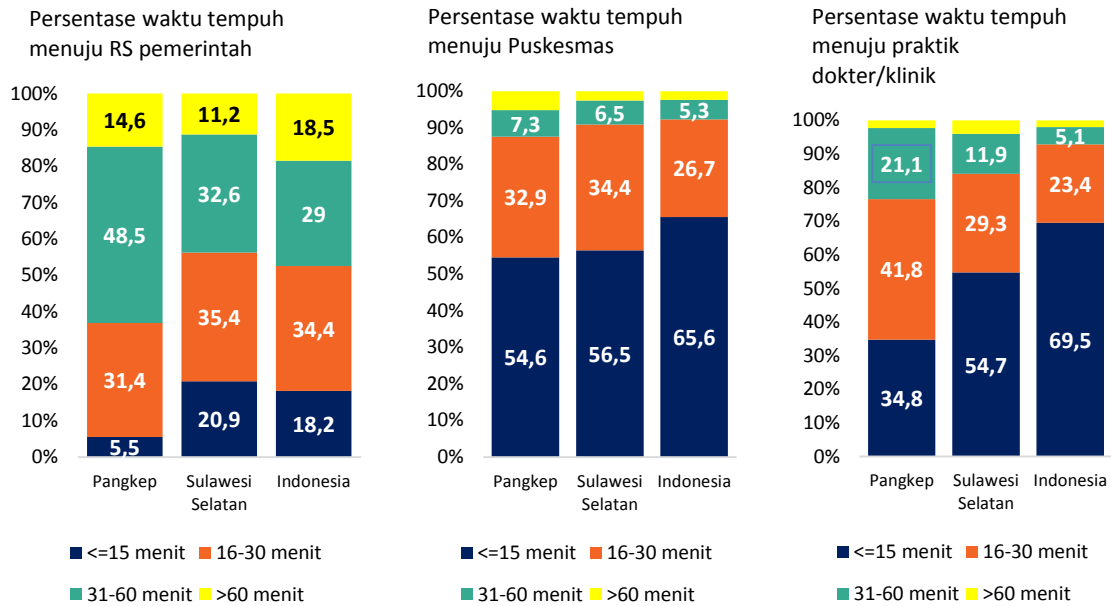


**Gambar 15. Persentase Pengetahuan Rumah Tangga Tentang Keberadaan Fasilitas Kesehatan (2013)**

Sumber: Riskesdas 2013

Pada bagian ini profil kesehatan Kabupaten Pangkep akan dibahas secara lebih dalam. Sebagian besar data yang digunakan bersumber dari data susenas yang diolah dan data riset kesehatan dasar (riskesdas) yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Pada gambar 15 dapat dilihat persentase pengetahuan rumah tangga tentang keberadaan faskes (fasilitas kesehatan) pada tahun 2013. Puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah adalah salah satu faskes dengan persentase pengetahuan rumah tangga tertinggi yang ada di Kabupaten Pangkep, artinya sebagian besar rumah tangga yang di survei telah menyadari keberadaan fasilitas tersebut di masing-masing wilayahnya. Namun keberadaan fasilitas kesehatan ini relatif jauh jika dilihat dari lamanya waktu tempuh yang diperlukan untuk dapat mengaksesnya dibandingkan dengan rata-rata nasional. Pada gambar 16 mengenai waktu tempuh yang dibutuhkan untuk menuju RS pemerintah, puskesmas, dan praktik dokter dapat kita perhatikan bersama bahwa persentase rumah tangga yang membutuhkan waktu tempuh  $\leq 15$  menit untuk dapat mengakses faskes tersebut selalu lebih kecil dibandingkan dengan nasional. Dari ketiga faskes tersebut yang rata-rata waktu tempuhnya paling lama adalah RS pemerintah, hal ini bisa jadi karena kondisi geografis beberapa rumah tangga yang tinggal di luar pulau utama atau karena memang jumlah RS pemerintah yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah puskesmas dan praktik dokter/klinik. Pernyataan ini didukung oleh data podes 2014 dimana ditemukan jumlah rumah sakit Kabupaten Pangkep yang berjumlah 1 buah, 23 puskesmas serta 27 tempat praktik dokter (Lampiran 13 Tabel A2)

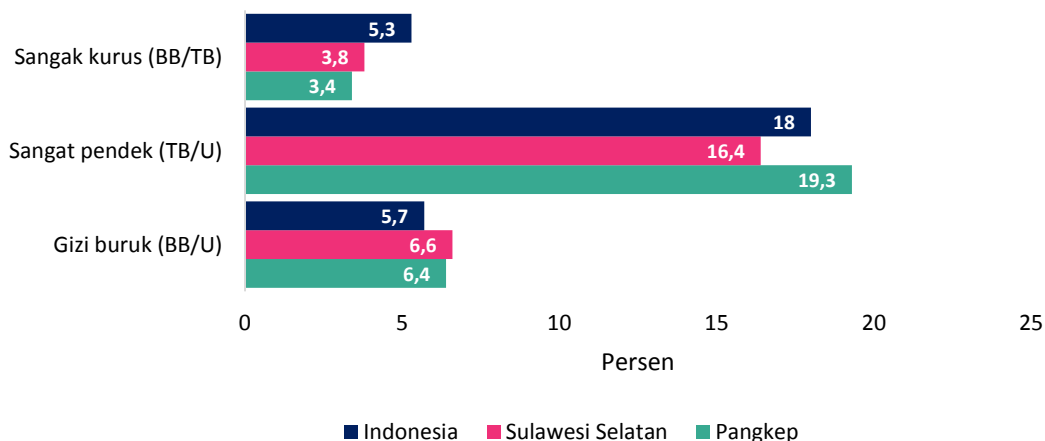
Selain waktu tempuh dan kesadaran rumah tangga terhadap faskes, didalam data riskesdas juga terdapat beberapa data kesehatan lainnya seperti data perilaku hidup sehat yang terlampir pada lampiran 7 gambar A6 tentang perilaku sehat Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan dan nasional. Pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa persentase rumah tangga dengan perilaku hidup sehat relatif masih berada sedikit dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan namun masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional kecuali untuk perilaku benar dalam mencuci tangan. Namun yang perlu mendapat perhatian lebih adalah data tentang perilaku sedentari pada lampiran 8 gambar A7 dimana persentase perilaku sedentari  $\geq 6$  jam Kabupaten Pangkep berada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Perilaku sedentari sendiri dapat diartikan sebagai perilaku duduk-duduk, berbaring, tetapi tidak sedang tidur baik di kantor, rumah, ataupun perjalanan, termasuk diantaranya waktu untuk berbincang-bincang, menonton dan bekerja



**Gambar 16. Waktu Tempuh Menuju Fasilitas Kesehatan (2013)**

Sumber : Riskesdas 2013

Selain itu data riskesdas juga dilengkapi dengan beberapa data unik seperti prevalensi status gizi balita. Data riskesdas membuat tiga klasifikasi status gizi balita, diantaranya status gizi berdasarkan berat badan terhadap umur (BB/U), tinggi badan terhadap umur (TB/U), dan berat badan terhadap tinggi badan (BB/TB). Dari tiga klasifikasi tersebut klasifikasi TB/U adalah yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Pangkep. Klasifikasi ini mencoba melihat gizi anak berdasarkan tinggi badan terhadap usianya dimana prevalensi balita yang memiliki status TB/U sangat pendek berada di atas rata-rata nasional dan provinsi. Sebaliknya prevalensi balita sangat kurus di Kabupaten Pangkep masih relatif lebih baik dibandingkan dengan nasional dan provinsi.

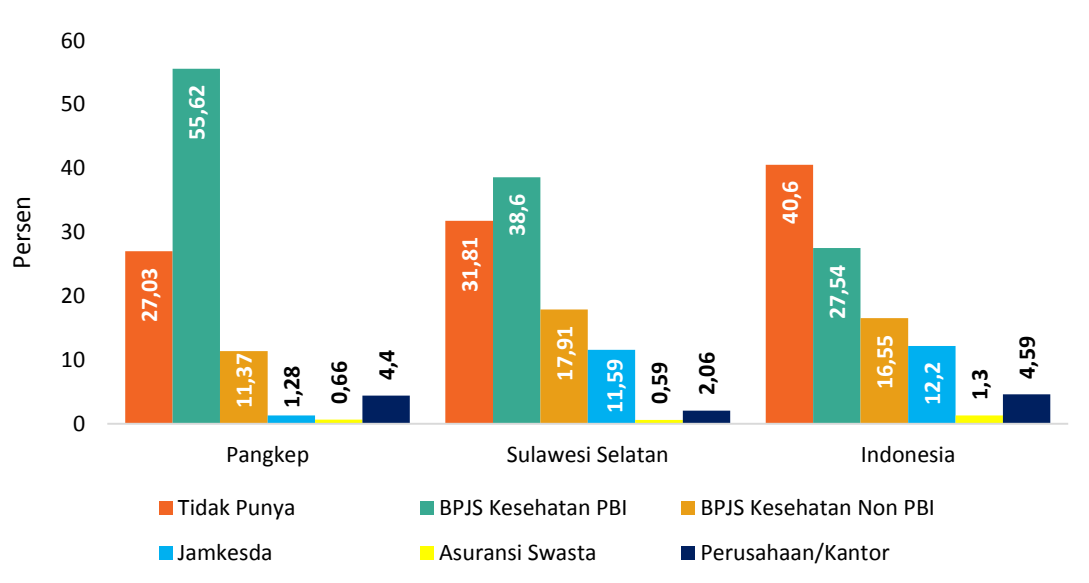


**Gambar 17. Prevalensi Status Gizi Balita (2013)**

Sumber : Riskesdas 2013

Data susenas yang di kumpulkan oleh BPS pada tahun 2017 tentang kepemilikan jaminan kesehatan ditampilkan pada gambar 18. Berdasarkan gambar tersebut terlihat jelas bahwa persentase penduduk yang sama sekali tidak memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Pangkep (27.03%) lebih

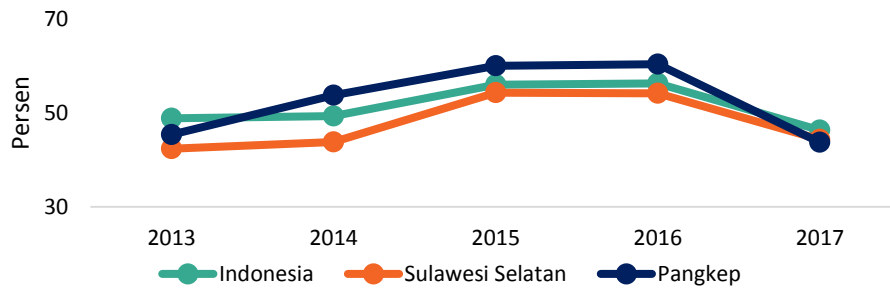
sedikit dibandingkan dengan rata-rata provinsi (31.81%) dan nasional (40.6%). Hal ini berarti 72.97% penduduk di kabupaten Pangkep setidaknya memiliki satu jaminan kesehatan. Tingginya angka ini disebabkan oleh besarnya persentase penduduk di Kabupaten Pangkep yang memiliki BPJS Kesehatan PBI (dua kali lipat persentase BPJS kesehatan PBI nasional). Sayangnya persentase BPJS Kesehatan non PBI dan kepemilikan Jamkesda di Kabupaten Pangkep masih relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional. Hal ini bisa dijadikan peluang bagi pemerintah Kabupaten Pangkep untuk semakin menurunkan jumlah penduduk yang sama sekali tidak memiliki jaminan kesehatan dengan cara mendorong masyarakat untuk ikut dalam BPJS kesehatan non PBI atau meningkatkan jangkauan penerima jamkesda



**Gambar 18. Jaminan Kesehatan yang Dimiliki (2017)**

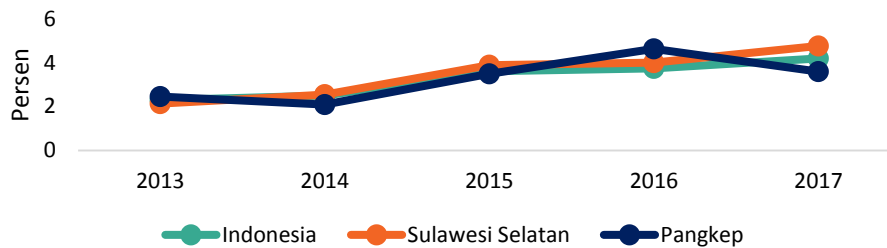
Sumber : Susenas BPS (Data diolah)

Jaminan kesehatan ini penting mengingat kesehatan sebagai salah satu modal utama dalam memutar roda perekonomian suatu wilayah. Karena penduduk yang sehat lebih mudah untuk menghasilkan pendapatan bagi keluarga besar dibandingkan penduduk yang sering mengalami gangguan kesehatan. Berdasarkan lampiran 9 gambar A8 tentang penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Pangkep konsisten memiliki persentase penduduk yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional, kendati demikian pada gambar 19 dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Pangkep paling banyak menggunakan fasilitas kesehatan untuk berobat jalan dalam kurun waktu 2014-2016 sebelum akhirnya turun pada tahun 2017, hal serupa dengan pola penduduk yang pernah menjalankan rawat inap dalam setahun terakhir dimana persentasenya terus naik dan mengalami titik puncak di tahun 2016 dan kemudian turun pada tahun 2017 (gambar 20). Tingginya angka jumlah penduduk yang mengakses fasilitas kesehatan ini dapat disebabkan oleh beberapa hal salah satunya karena kemudahan akses masyarakat dalam menjangkau fasilitas kesehatan



**Gambar 19. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Dalam Sebulan Terakhir**

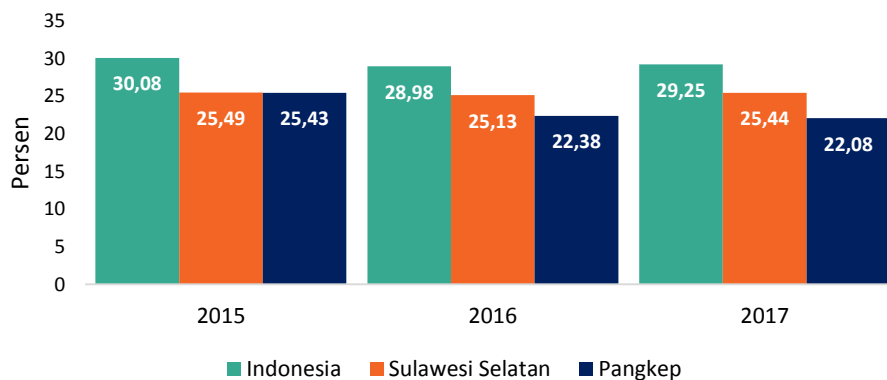
Sumber : Susenas BPS (Data diolah)



**Gambar 20. Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Setahun Terakhir**

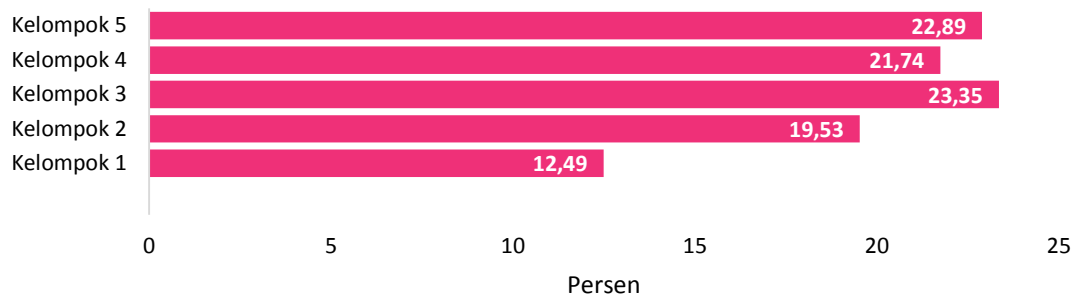
Sumber : Susenas BPS (Data diolah)

Beralih pada kebiasaan merokok, pada umumnya persentase penduduk berusia  $\geq 15$  tahun yang merokok tembakau di Kabupaten Pangkep terus mengalami penurunan. Selain itu nilainya juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional (gambar 21). Lebih lanjut pada gambar 22 kita juga dapat melihat persentase penduduk yang merokok tembakau di Kabupaten Pangkep menurut kelompok pengeluaran di tahun 2017. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa penduduk pada kelompok pertama adalah penduduk dengan jumlah konsumsi rokok paling kecil dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya. Persentase perokok tembakau paling banyak ditemukan di kelompok pengeluaran ke 3 dan 5 yaitu pada kelompok pengeluaran menengah dan tertinggi. Namun demikian jumlah rata-rata konsumsi batang rokok per minggu Kabupaten Pangkep (94 batang/minggu) masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata konsumsi batang rokok nasional (81 batang/minggu)



**Gambar 21. Penduduk Berusia  $\geq 15$  Tahun yang Merokok Tembakau**

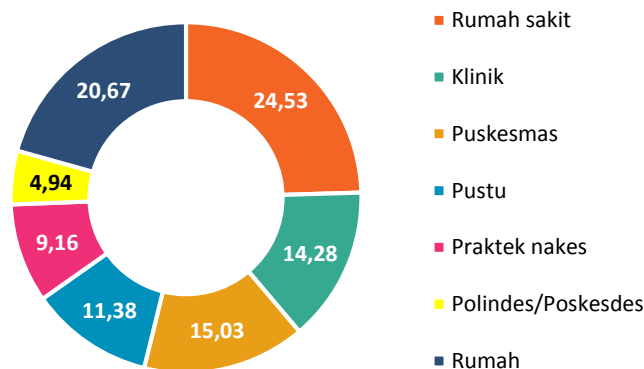
Sumber : Susenas BPS (Data diolah)



**Gambar 22. Penduduk Berusia  $\geq 15$  Tahun yang Merokok Tembakau Menurut Kelompok Pengeluaran (2017)**

Sumber : Susenas BPS (Data diolah)

Selanjutnya terkait keterangan melahirkan bagi perempuan yang pernah kawin berusia 15-49 tahun, khususnya keterangan terkait tempat melahirkan dan tenaga penolong proses melahirkan yang terakhir. Menurut data susenas yang dikumpulkan oleh BPS, pada tahun 2017 perempuan berusia 15-49 tahun yang pernah kawin di Kabupaten Pangkep melakukan proses persalinan paling banyak di rumah sakit (24.53%) dan rumah (20.67%). Selain itu terdapat juga pilihan lainnya seperti Klinik/Rumah bersalin (14.28%) serta puskesmas (15.03%), hanya sedikit saja yang proses melahirkan terakhirnya di Polindes/Poskesdes, hal ini dapat kita lihat lebih jelas pada gambar 23. Lebih lanjut melihat lokasi melahirkan menurut kelompok pengeluaran seperti yang tersaji pada lampiran 11 gambar A10 dimana kelompok pengeluaran yang paling banyak melakukan proses melahirkan terakhir di rumah adalah kelompok pengeluaran ke tiga, sedangkan kelompok pengeluaran ke lima paling banyak melahirkan di rumah sakit dan kelompok pengeluaran pertama di puskesmas.

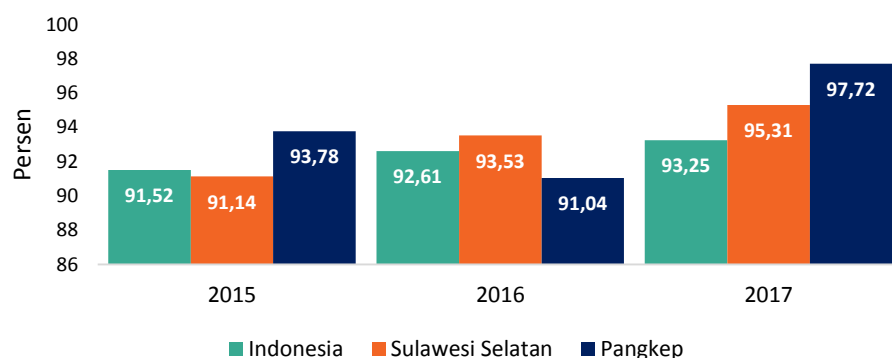


**Gambar 23. Tempat Melahirkan Perempuan yang Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun Kabupaten Pangkep (2017)**

Sumber : Susenas BPS (Data diolah)

Namun demikian, meski secara rata-rata perempuan di Kabupaten Pangkep banyak memilih melahirkan di rumah faktanya tenaga penolong proses melahirkan masih di dominasi oleh para tenaga kesehatan (dokter, dokter kandungan, dan bidan). Sebagai contoh pada tahun 2017 misalnya sebanyak 97.72% perempuan berusia 15-49 tahun di Kabupaten Pangkep mengaku proses melahirkan terakhirnya dibantu oleh tenaga kesehatan, khususnya oleh bidan, dimana pada tahun yang sama memiliki proporsi sebesar 80.70% dan konsisten di seluruh kelompok pengeluaran

(lampiran 12 gambar A11). Proporsi angka di tolong oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Pangkep ini konsisten lebih dari 90% dalam tiga tahun terakhir. Informasi terkait hal ini dapat kita lihat lebih lengkap pada gambar 24 sebagai berikut



**Gambar 24. Penolong Melahirkan Perempuan yang Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Pangkep (2017)**

Sumber : Susenas BPS (Data diolah)

Pada dasarnya BPS sudah memiliki beberapa indikator yang dapat dijadikan rujukan untuk menilai tingkat kesehatan suatu wilayah, beberapa indikator tersebut tersaji dalam tabel 4 dibawah dimana terdapat delapan indikator kesehatan untuk Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan Indonesia untuk tahun 2017. Khusus untuk indikator keluhan kesehatan, berobat jalan, dan rawat inap persentasenya masih dibawah rata-rata provinsi dan nasional sedangkan penolong proses melahirkan oleh tenaga kesehatan terlihat sudah baik di angka 97.72%. Lebih lengkapnya terkait indikator-indikator kesehatan tersebut tersaji sebagai berikut.

**Tabel 4. Indikator Kesehatan (2017)**

No.	Indikator Kesehatan	Indonesia	Sulawesi Selatan	Pangkep
1	Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebulan yang lalu ( <b>persen</b> )	28.62	24.7	23.37
2	Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan ( <b>persen</b> )	93.25	95.31	97.72
3	Rata-rata lama anak 2-4 tahun mendapat ASI ( <b>bulan</b> )	10.41	10.13	8.28
4	Rata-rata anak 2-4 tahun yang disusui dengan makanan tambahan ( <b>bulan</b> )	6.09	4.53	4.34
5	Rata2 anak 2-4 tahun yang disusui tanpa makanan tambahan ( <b>bulan</b> )	4.32	5.6	3.94
6	Persentase penduduk yang mengobati sendiri ( <b>persen</b> )	69.43	66.22	54.13
7	Persentase penduduk yang berobat jalan sebulan yang lalu ( <b>persen</b> )	46.32	44.32	43.69
8	Persentase penduduk yang rawat inap setahun terkahir ( <b>persen</b> )	4.19	4.76	3.6

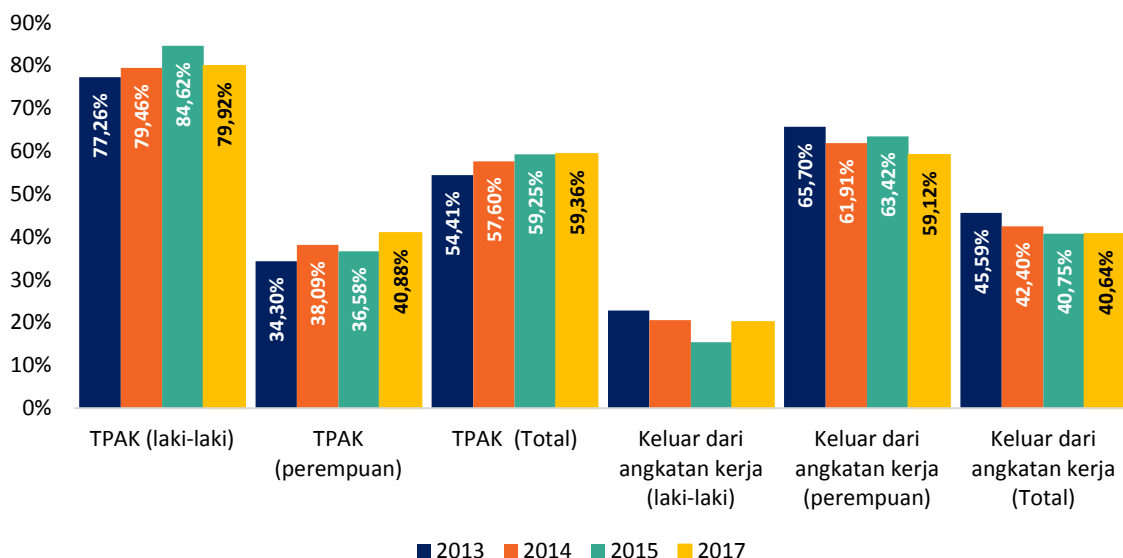
Sumber : Susenas BPS (Data diolah)

## 2.4 Profil Tenaga Kerja Kabupaten Pangkep

### 2.4.1 Profil Angkatan kerja

Pada dasarnya jumlah angkatan kerja Kabupaten Pangkep terus bertambah setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk produktif berusia 15 tahun keatas. Dalam ruang lingkup tenaga kerja sebenarnya penduduk usia produktif dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu mereka yang memilih masuk dalam angkatan kerja dan mereka yang secara sukarela keluar dari angkatan kerja karena beberapa alasan seperti mengurus rumah tangga, sekolah dan lain-lain. Persentase jumlah penduduk produktif yang masuk kedalam angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk sering kita dengar sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada Gambar 25 dapat sama-sama kita lihat TPAK Kabupaten Pangkep konsisten mengalami peningkatan dalam periode lima tahun kebelakang ini.<sup>1</sup> Hal ini sejalan jika melihat TPAK menurut jenis kelamin kecuali pada tahun 2017 yang menurun sedikit dibanding tahun sebelumnya. Pada Gambar 25 juga nampak jelas selisih TPAK laki-laki dan perempuan dimana TPAK laki-laki terlihat jelas lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Rendahnya jumlah TPAK perempuan dibandingkan laki-laki disebabkan oleh tingginya penduduk usia produktif perempuan yang memilih untuk tidak masuk dalam angkatan kerja. Hal ini juga tercermin pada Gambar 25 dimana persentase penduduk usia produktif perempuan yang keluar dari angkatan kerja jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dari Gambar 26 dapat dilihat bahwa di tahun 2017 mayoritas (80.48%) perempuan yang keluar dari angkatan kerja memiliki alasan mengurus rumah tangga, hanya 13.76% perempuan yang memiliki alasan pendidikan (bersekolah). Berbanding terbalik dengan laki-laki dimana jumlah kebanyakan dari mereka (47.16%) keluar dari angkatan kerja karena alasan pendidikan dan hanya 23.83% diantaranya karena alasan mengurus rumah tangga.



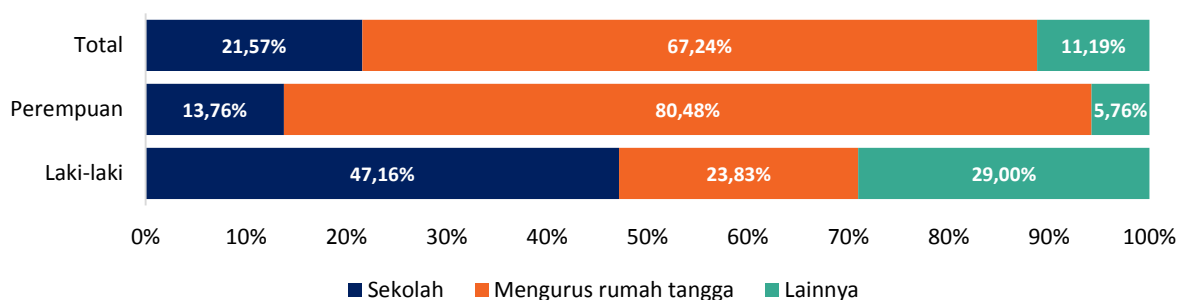
**Gambar 25. TPAK dan Penduduk >15 Tahun yang Keluar dari Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin**

Sumber: Sakernas BPS (data diolah)

<sup>1</sup>Data pada tahun 2016 tidak dapat ditayangkan karena indikasi kurangnya sampel pada sakernas 2016 oleh BPS untuk proyeksi Kabupaten/Kota

Kembali pada karakteristik angkatan kerja. Menurut survei BPS sebenarnya tidak ada perbedaan dari proporsi terbesar menurut usia dan pendidikan berdasarkan jenis kelamin. Pada tabel 5 dapat kita lihat bersama bahwa baik untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan proporsi terbesar untuk angkatan kerja menurut usia adalah pada penduduk usia dewasa (30-50 tahun) sedangkan menurut pendidikan ada sekitar 48.26% dan 45.17% masing – masing untuk laki-laki dan perempuan di kelompok pendidikan SD/ sederajat atau belum memiliki ijazah. Hal ini masih sejalan dengan temuan sebelumnya dimana 60.82% penduduk Kabupaten Pangkep yang pernah bersekolah berada pada kelompok pendidikan SD/ sederajat atau belum memiliki ijazah. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa angkatan kerja Pangkep paling banyak berasal dari penduduk dewasa dengan ijazah tertinggi SD/ sederajat atau belum memiliki ijazah

Sama halnya penduduk usia produktif yang dapat di bagi menjadi dua kolompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, angkatan kerja juga dapat dibagi menjadi dua kelompok menurut aktivitasnya, yaitu penduduk yang bekerja dan tidak bekerja atau menganggur. Untuk lebih jelasnya penduduk menurut klasifikasi dunia kerja dapat dilihat di lampiran 7 laporan ini. Khusus untuk kelompok penduduk yang bekerja dan menganggur akan dibahas secara lebih rinci dalam sub bab selanjutnya.



**Gambar 26. Alasan Keluar dari Angkatan Kerja Penduduk >15 Tahun Menurut Jenis Kelamin (2017)**

Sumber: Sakernas BPS (data diolah)

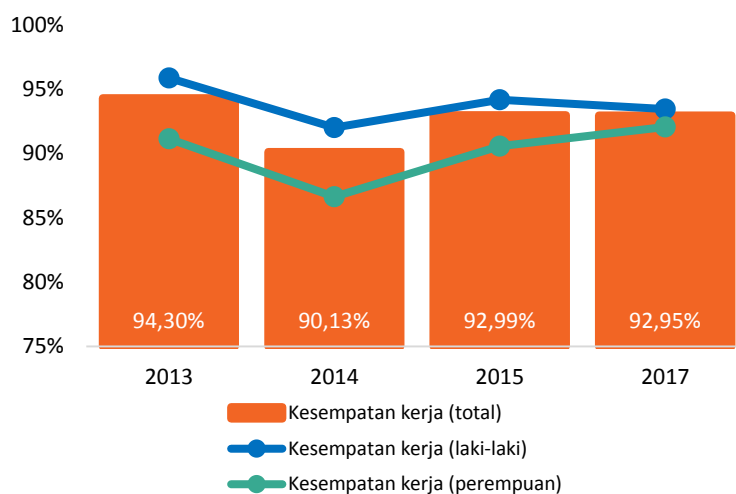
**Tabel 5. Angkatan Kerja Penduduk >15 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Usia (2017)**

Kategori	Laki-laki (%)	Prempuan (%)	Total (%)
<b>Usia</b>			
15-29 Tahun (Anak dan Pemuda)	29.87 %	29.80 %	29.85 %
30-50 Tahun (Dewasa)	51.81 %	54.35 %	52.74 %
>50 Tahun (Lansia)	18.32 %	15.85 %	17.42 %
<b>Pendidikan</b>			
SD/ sederajat atau Belum Memiliki Ijazah	48.26 %	45.17 %	47.14 %
SMP/ sederajat	15.7 %	16.41 %	15.96 %
>SMP/ sederajat	36.05 %	38.42 %	36.91 %

Sumber: Sakernas BPS (data diolah)



## 2.4.2 Profil Penduduk yang Bekerja



**Gambar 27. Kesempatan Kerja Penduduk >15 Tahun Menurut Jenis Kelamin**

Sumber: Sakernas BPS (data diolah)

Dalam kasus Kabupaten Pangkep di tahun 2017, persentase orang yang bekerja terhadap angkatan kerja lebih besar (92.95%) dibandingkan dengan persentase penduduk menganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja sering disebut sebagai kesempatan kerja. Meski jumlah penduduk yang bekerja dalam lima periode terakhir terus meningkat namun ternyata persentase kesempatan kerja sempat mengalami penurunan di tahun 2014 yang kemudian meningkat kembali di tahun 2015. Hal ini juga terjadi pada kesempatan kerja laki-laki dan perempuan, namun sebagaimana kita lihat di Gambar 27 kesempatan kerja laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan dengan kesempatan kerja perempuan konsisten untuk semua tahun. Khusus untuk kesempatan kerja laki-laki terjadi penurunan tingkat kesempatan kerja ditahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya.

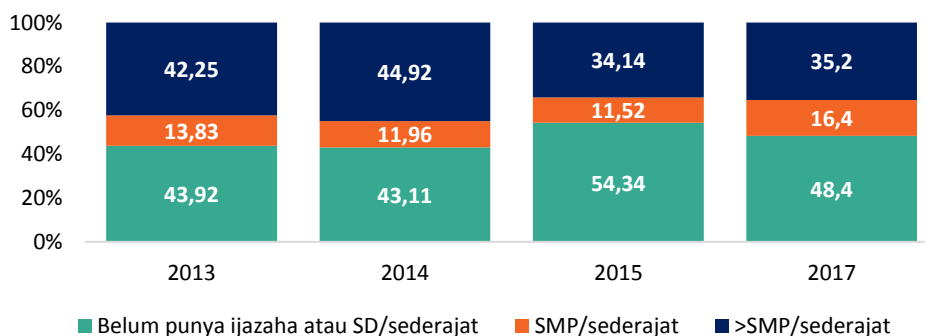
**Tabel 6. Penduduk >15 Tahun yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin, Usia, dan Pendidikan (2017)**

Kategori	Laki-laki (%)	Prempuan (%)	Total (%)
<b>Usia</b>			
15-29 Tahun (Anak dan Pemuda)	26.42 %	25.97 %	26.26 %
30-50 Tahun (Dewasa)	54.24 %	56.82 %	55.17 %
>50 Tahun (Lansia)	19.34 %	17.21 %	18.57 %
<b>Pendidikan</b>			
SD/ sederajat atau Belum Memiliki Ijazah	49.57 %	46.31 %	48.40 %
SMP/ sederajat	16.24 %	16.68 %	16.40 %
>SMP/ sederajat	34.19 %	37.00 %	35.20 %
<b>Waktu Kerja</b>			
0 Jam*	2.02 %	1.53 %	1.85 %
1-14 Jam	11.14 %	13.23 %	11.89 %
15-34 Jam	18.74 %	29.85 %	22.73 %
35+ Jam	68.11 %	55.39 %	63.54 %

Sumber: Sakernas BPS (data diolah)

\*Sementara tidak bekerja

Meski kesempatan kerja laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, namun tidak ada perbedaan besar dari pola karakteristik penduduk berusia >15 tahun yang bekerja menurut jenis kelamin. Sebagai contoh, berdasarkan usia baik laki-laki dan perempuan memiliki jumlah pekerja paling banyak di kelompok usia 30-50 tahun (dewasa). Sedangkan dari sisi pendidikan para pekerja ini paling banyak dijumpai memiliki ijazah tertinggi SD/ sederajat atau belum memiliki ijazah baik untuk laki-laki dan perempuan. Hal yang serupa juga terjadi pada rata-rata lama bekerja, keduanya memiliki persentase tertinggi pada kelompok lama bekerja >35 jam/minggu. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar penduduk Pangkep yang bekerja telah menjadi pekerja penuh waktu baik untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat lebih jelas pada tabel 6 diatas.



**Gambar 28. Penduduk >15 Tahun yang Bekerja Menurut Ijazah Tertinggi**

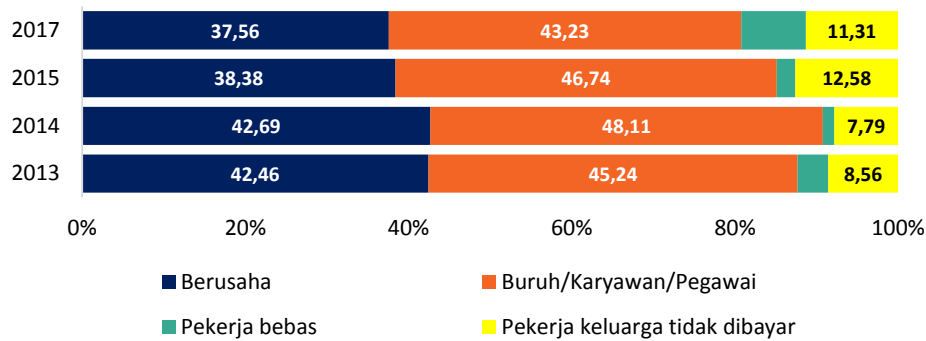
Sumber: Sakernas BPS (data diolah)

Meski tidak ada perbedaan yang menarik dari sisi gender, para penduduk yang bekerja di Kabupaten Pangkep memiliki hal yang dapat menjadi sorotan dari sisi pendidikan. Pada Gambar 28 diatas tersaji penduduk berusia >15 tahun yang bekerja menurut ijazah tertinggi dimana terlihat jelas bahwa pekerja dengan ijazah tertinggi SD/ sederajat atau belum punya ijazah menjadi yang paling tinggi konsisten di semua tahun. Namun hal yang paling menarik adalah komposisi pekerja dengan ijazah tertinggi >SMP/ sederajat dimana persentasenya sangat besar di tahun 2013 dan 2014 yang kemudian turun menjadi 34.14% di tahun 2015. Pada tahun ini terdapat sebuah guncangan di Kabupaten Pangkep yang memaksa pekerja dengan pendidikan >SMP/ sederajat berkurang. Anomali yang sama juga terjadi di persentase penduduk berusia >15 tahun yang bekerja menurut lapangan usaha dimana secara mendadak persentase sektor pertanian naik dari 23.73% menjadi 34.77% di tahun 2015. Tingginya persentase jumlah pekerja ini menjadikan sektor pertanian sebagai sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di tahun 2015 dan 2017



**Gambar 29. Penduduk >15 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha**

Sumber: Sakernas BPS (data diolah)

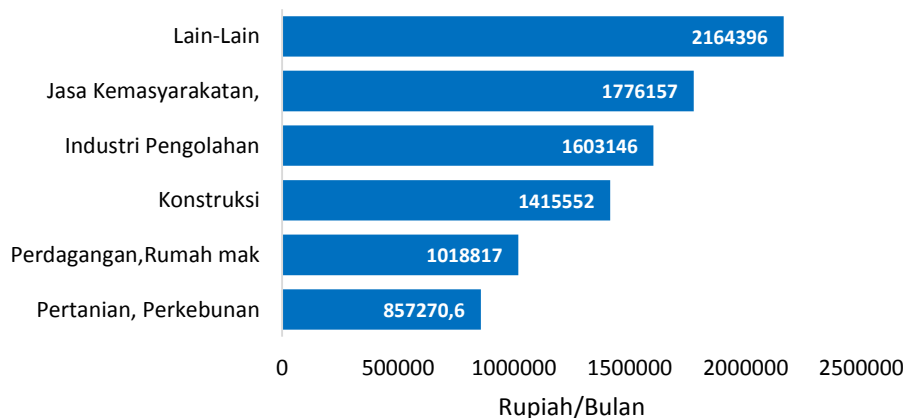


**Gambar 30. Penduduk >15 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan**

Sumber: Sakernas BPS (data diolah)

Guncangan tersebut juga dapat dilihat melalui status pekerja di Kabupaten Pangkep, dimana pada tahun 2015 terlihat pekerja dengan status bekerja berusaha (baik berusaha sendiri, dibantu pekerja dibayar atau dibantu pekerja tidak dibayar) mengalami penurunan persentase di tahun 2015. Sebagai gantinya pekerja dengan status pekerjaan pekerja bebas dan pekerja keluarga tidak dibayar meningkat dan persentasenya makin besar untuk pekerja bebas di tahun 2017. Hal ini dapat dilihat lebih jelas pada gambar diatas

Selanjutnya, berbicara tentang isu pekerja tentu tidak akan jauh dari isu upah yang diterima pekerja tersebut. Pada Gambar 31 terlampir data terkait rata-rata upah pekerja yang diterima menurut lapangan usaha atau sektor kerja dalam satu bulan di tahun 2017. Di tahun tersebut sektor kerja yang memiliki pendapatan dalam satu bulan paling sedikit adalah sektor pertanian disusul oleh perdagangan dan konstruksi. Meski sektor pertanian adalah sektor dengan jumlah pekerja paling banyak namun ternyata sektor tersebut memiliki rata-rata upah yang paling sedikit dibandingkan sektor kerja lainnya. Rendahnya penghasilan tersebut diduga akibat dari rendahnya rata-rata lama bekerja sektor pertanian relatif terhadap sektor kerja lainnya (lampiran 9). Sektor kerja yang menerima rata-rata upah tertinggi adalah sektor kerja pada kelompok lainnya, dimana pada sektor ini termasuk didalamnya sektor kerja lembaga keuangan dan pertambangan/penggalan. Dua sektor tersebut adalah sektor kerja yang memiliki rata-rata upah tertinggi di Kabupaten Pangkep pada tahun 2017.

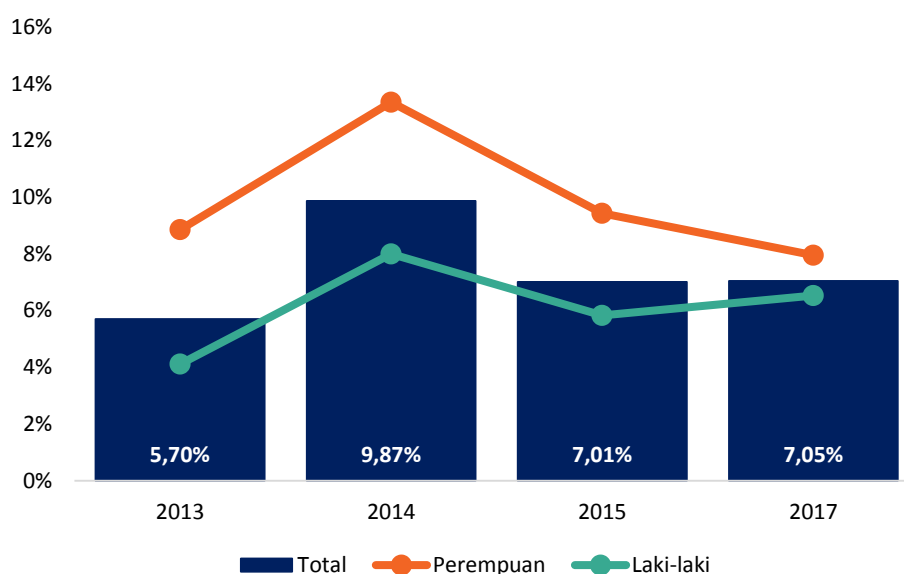


**Gambar 31. Upah Penduduk >15 Tahun yang Bekerja (2017)**

Sumber: Sakernas BPS (data diolah)

### 2.4.3 Profil Penduduk yang Menganggur

Pada sub-bab kali ini kita akan membahas profil singkat penduduk berusia >15 tahun yang masuk dalam angkatan kerja dan menganggur. Pada dasarnya persentase jumlah penduduk yang menganggur terhadap jumlah angkatan kerja lebih sering kita dengan dengan istilah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau lawan kata dari kesempatan kerja. Pada Gambar 32 di bawah dapat kita lihat bersama bahwa angka TPT Kabupaten Pangkep mengalami peningkatan di tahun 2014 yang kemudian turun kembali dan akhirnya menjadi 7.05% di tahun 2017. Angka ini termasuk tinggi, sebagai perbandingan di tahun 2017 nilai TPT Nasional adalah 5.50% dan Provinsi 5.61%. Dari gambar dibawah juga dapat kita lihat bahwa TPT perempuan di Kabupaten Pangkep konsisten selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki di semua tahun.



**Gambar 32. Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Berusia >15 Tahun Kabupaten Pangkep Menurut Jenis Kelamin**

Sumber: Sakernas BPS (data diolah)

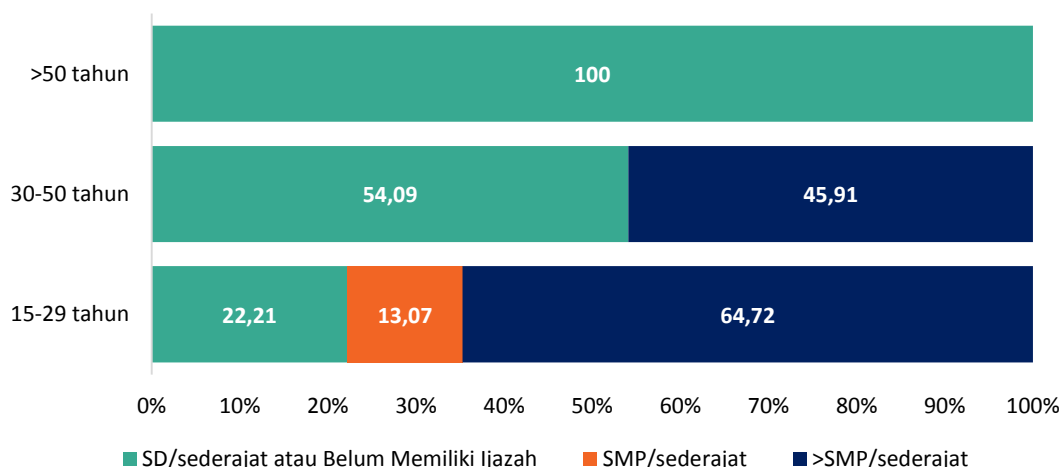
Selanjutnya, sama dengan pembahasan penduduk yang bekerja kali ini kita juga akan melihat karakteristik penduduk berusia >15 tahun yang menganggur menurut jenis kelamin. Sama seperti sebelumnya, tidak ada perbedaan dari struktur penduduk yang menganggur berdasarkan jenis kelamin. Penduduk yang menganggur paling banyak ditemukan pada usia 15-29 tahun (anak dan pemuda) baik pada laki-laki maupun perempuan. Angkanya cukup besar yaitu 79.18% dan 74.23% masing-masing untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Pangkep tengah mengalami fenomena pengangguran pemuda dimana penduduk yang menganggur di dominasi oleh para pemuda berusia kurang dari 30 tahun. Selanjutnya karakteristik menurut pendidikan terlihat jelas bahwa paling banyak penganggur ditemukan pada kelompok yang memiliki ijazah tertinggi >SMP/ sederajat, hal ini juga berlaku baik untuk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Pangkep pada tahun 2017. Untuk lebih jelasnya kita dapat menyimak tabel 7 berikut.

**Tabel 7. Penduduk >15 Tahun yang Mengganggu Menurut Jenis Kelamin, Usia, dan Pendidikan (2017)**

Kategori	Laki-laki (%)	Prempuan (%)	Total (%)
<b>Usia</b>			
15-29 Tahun (Anak dan Pemuda)	79.18%	74.23%	77.16%
30-50 Tahun (Dewasa)	17.11%	25.77%	20.65%
>50 Tahun (Lansia)	3.71%	0%	2.19%
<b>Pendidikan</b>			
SD/ sederajat atau Belum Memiliki Ijazah	29.51%	31.94%	30.50%
SMP/ sederajat	7.91%	13.22%	10.08%
>SMP/ sederajat	62.58%	54.84%	59.42%

Sumber: Sakernas BPS (data diolah)

Untuk melihat lebih dalam karakteristik penduduk yang mengganggu mari kita lihat gambar 33 dimana terdapat data yang menunjukkan penduduk berusia >15 tahun yang mengganggu menurut usia dan pendidikan. Sebelumnya kita mengetahui bahwa 77.16% penduduk yang mengganggu berada pada kelompok usia 15-29 tahun, dimana pada kelompok usia tersebut ternyata persentase ijazah tertingginya paling banyak ditemukan di kelompok >SMP/ sederajat (64.72%). Kelompok ini adalah kelompok dengan level pendidikan paling tinggi yang termasuk didalamnya SMA/ sederajat dan universitas, sehingga dapat kita simpulkan bahwa penduduk yang mengganggu di Kabupaten Pangkep pada tahun 2017 adalah penduduk di usia muda dengan pendidikan >SMP/ sederajat. Selanjutnya untuk kelompok usia yang lain persentase paling banyak masih dikuasai oleh kelompok pendidikan SD/ sederajat atau belum memiliki ijazah, bahkan untuk penduduk yang mengganggu berusia >50 tahun persentase untuk kelompok ini mencapai angka 100%.



**Gambar 33. Penduduk >15 Tahun yang Mengganggu Menurut Usia dan Ijazah Tertinggi (2017)**

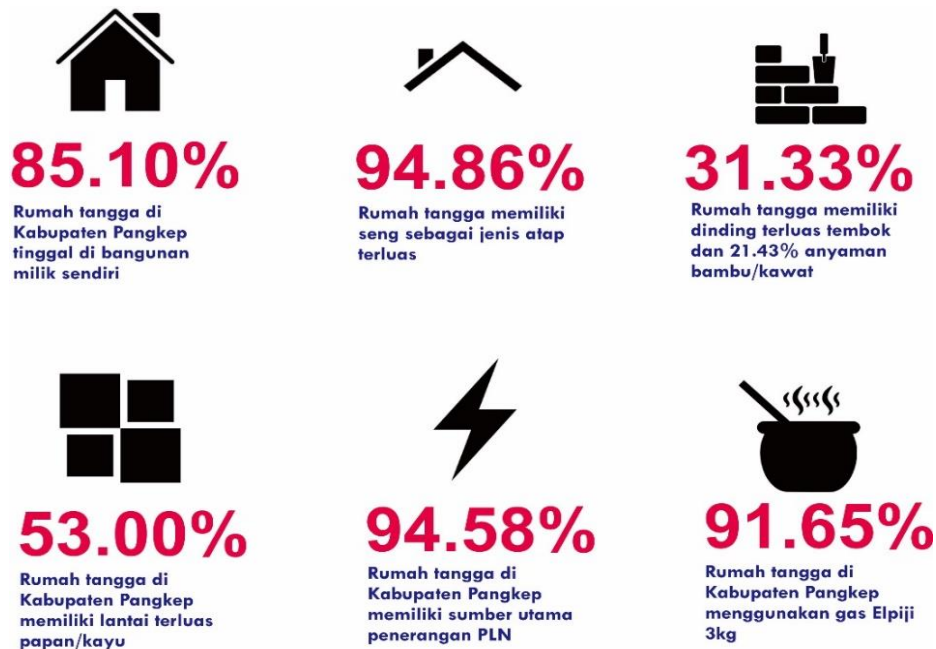
Sumber: Sakernas BPS (data diolah)

## 2.5 Profil Rumah Tangga dan Akses terhadap Air serta Sanitasi Layak

Pada sub bab ini kita akan membahas gambaran umum rumah tangga, air layak, sanitasi layak dan gambaran bantuan sosial di Kabupaten Pangkep

### 2.5.1 Gambaran Umum Rumah Tangga di Kabupaten Pangkep (2017)

Sebagai kabupaten yang memiliki banyak wilayah kepulauan, Kabupaten Pangkep tentunya memiliki karakteristik rumah tangga yang berbeda dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa kondisi perumahan rumah tangga dapat di lihat lebih jelas dalam Gambar 34 dibawah. Berdasarkan hasil survei oleh BPS di tahun 2017 ditemukan 94.86% rumah tangga yang memiliki atap terluas yang terbuat dari seng, 53.00% rumah tangga tinggal di rumah dengan lantai terluas terbuat dari kayu/papan, dan 31.33% diantaranya tinggal dirumah dengan dinding yang terbuat dari tembok. Khusus untuk dinding terluas rumah tangga di Kabupaten Pangkep memiliki variasi lainnya, selain dari tembok misalnya mereka juga tinggal di rumah dengan dinding terluas dari anyaman bambu/kawat. Pada dasarnya kondisi perumahan di Kabupaten Pangkep tidak bisa dikatakan jelek, hal ini dapat dilihat dari status kepemilikan bangunan tempat tinggal rumah tangganya dimana 85.10% keluarga tinggal di bangunan milik sendiri, lebih dari itu 94.58% rumah tangga di Kabupaten Pangkep juga mengaku menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan utama. Dari gambar dibawah juga dapat kita lihat bahwa 91.65% rumah tangga di Kabupaten Pangkep menggunakan gas elpiji 3kg sebagai bahan bakar utama dalam memasak. Hal ini menandakan bahwa pasokan listrik dan gas elpiji di Kabupaten Pangkep sudah dapat dinikmati oleh sebagian besar rumah tangga di kabupaten tersebut. Untuk melihat perbandingan kondisi rumah tangga Kabupaten Pangkep di tahun 2013 dan 2017 dapat dilihat lebih lanjut pada lampiran 17.

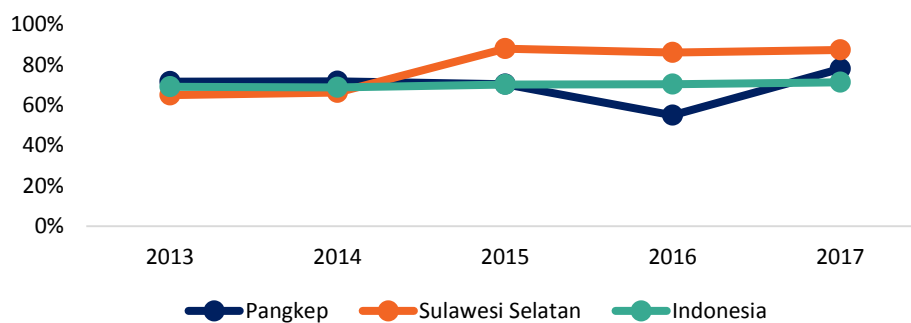


**Gambar 34. Profil Rumah Tangga Kabupaten Pangkep (2017)**

Sumber: Susenas BPS (data diolah)

## 2.5.2 Air layak Kabupaten Pangkep

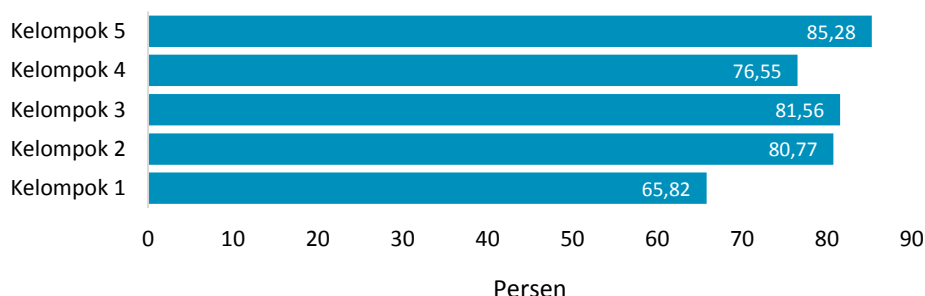
Dalam studi ini definisi rumah tangga dengan air layak adalah rumah tangga yang memiliki sumber air minum dari air ledeng, air hujan atau mata air dan sumur yang terlindung, sumur bor atau sumur pompa yang memiliki jarak minimal 10 m (meter) dari pembuangan kotoran, limbah, dan tinja. Tidak termasuk diantaranya air dalam kemasan, air isi ulang, dan air minum yang berasal dari sumur yang tidak terlindung. Selain itu, suatu rumah tangga juga dapat dikatakan memiliki akses air layak apabila memiliki sumber air mandi atau mencuci yang berasal dari air ledeng, sumur dan mata air terlindung, sumur bor atau sumur pompa serta air hujan. Definisi ini diambil dari BPS untuk melihat akses rumah tangga terhadap sumber air yang memiliki kualitas baik sehingga aman bagi masyarakat dan tidak menimbulkan berbagai macam penyakit.



**Gambar 35. Akses Rumah Tangga Terhadap Air Layak di Kabupaten Pangkep**

Sumber: Susenas BPS (data diolah)

Pada gambar diatas dapat kita lihat perkembangan akses rumah tangga terhadap air layak di Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, dan nasional. Pada tahun 2013 dan 2014 Kabupaten Pangkep memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi. Namun demikian angka ini terus menurun dan mencapai titik minimumnya di tahun 2016. Sementara itu persentase di tingkat provinsi terus membaik sedangkan nasional naik perlahan. Meski pada data terbaru di tahun 2017 Kabupaten Pangkep kembali membaik namun angkanya masih dibawah provinsi. Setidaknya untuk indikator akses air layak Kabupaten Pangkep sudah berada di atas nasional. Turunnya persentase di tahun 2016 bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah kekeringan yang menyebabkan sulitnya rumah tangga mengakses sumber – sumber air layak untuk mandi, mencuci atau minum ataupun sebab – sebab lainnya yang dapat merubah pola rumah tangga dalam mengakses air dalam rangka memenuhi kebutuhannya sehari – hari.



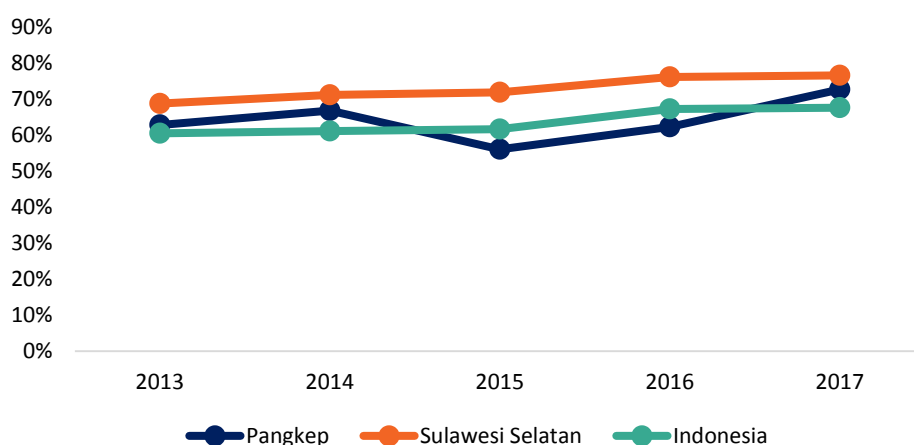
**Gambar 36. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Layak Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Pangkep (2017)**

Sumber: Susenas BPS (data diolah)

Lebih lanjut melihat akses rumah tangga terhadap air layak di Kabupaten Pangkep pada tahun 2017 berdasarkan kelompok pengeluaran. Hal ini dapat kita lihat lebih jelas pada gambar 36 dimana rumah tangga pada kelompok pengeluaran pertama yang memiliki persentase paling kecil diantara lima kelompok pengeluaran lainnya, sebaliknya kelompok rumah tangga pada kelompok ke lima adalah kelompok dengan persentase terbesar. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga pada kelompok pengeluaran pertama lebih sulit mendapat akses air layak dibandingkan rumah tangga pada kelompok lainnya. Hanya 65.82% rumah tangga yang mendapat akses air layak pada kelompok pengeluaran pertama di Kabupaten Pangkep pada tahun 2017 (85.28% untuk rumah tangga di kelompok pengeluaran ke 5). Semakin tinggi nilai persentase pada gambar tersebut menandakan semakin mudahnya rumah tangga pada suatu kelompok pengeluaran dalam memperoleh akses air layak di Kabupaten Pangkep.

### 2.5.3 Sanitasi Layak Kabupaten Pangkep

Selain akses pada air yang layak, akses rumah tangga pada sanitasi yang layak juga menjadi salah satu indikator yang dapat menentukan baik buruknya kondisi rumah tangga di suatu daerah. Dalam studi ini definisi sanitasi layak adalah rumah tangga yang memiliki kamar mandi sendiri atau digunakan bersamaan dengan anggota rumah tangga tertentu, memiliki kloset leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik atau sistem pengolahan air limbah agar memenuhi syarat kesehatan.



**Gambar 37. Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Pangkep**

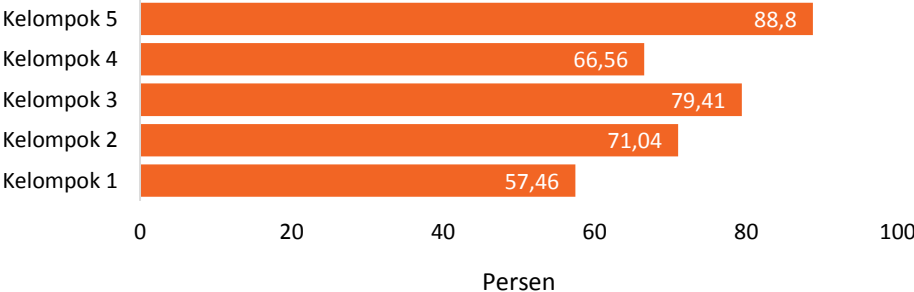
Sumber: Susenas BPS (data diolah)

Pada gambar diatas, tersaji kondisi akses rumah tangga terhadap sanitasi yang layak. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa Provinsi Sulawesi Selatan konsisten memiliki persentase rumah tangga yang mengakses sanitasi layak paling tinggi di semua tahun di bandingkan dengan nasional dan Kabupaten Pangkep. Kabupaten Pangkep sendiri juga berada di atas rata-rata nasional pada 2013 dan 2014, namun mengalami penurunan hingga di bawah rata-rata nasional pada tahun 2015. Lebih lanjut, angka ini mengalami proses kenaikan kembali dan mendekati rata-rata Provinsi di tahun 2017.

Selanjutnya pada akses sanitasi layak rumah tangga di Kabupaten Pangkep menurut kelompok pengeluaran. Sama seperti pembahasan sebelumnya, pada gambar 38 dapat kita lihat bersama bahwa kelompok pengeluaran pertama adalah kelompok dengan persentase paling kecil diantara kelompok pengeluaran lainnya sedangkan kelompok pengeluaran ke lima adalah kelompok dengan persentase paling besar. Semakin tinggi nilai persentase pada gambar tersebut menandakan semakin mudahnya rumah tangga pada suatu kelompok pengeluaran dalam memperoleh akses



sanitasi di Kabupaten Pangkep, sehingga dapat kita simpulkan bersama bahwa rumah tangga pada kelompok pengeluaran pertama adalah rumah tangga yang paling sulit dalam memperoleh akses sanitasi yang layak, hanya 57.46% rumah tangga pada kelompok tersebut yang dapat memperoleh akses pada sanitasi yang layak



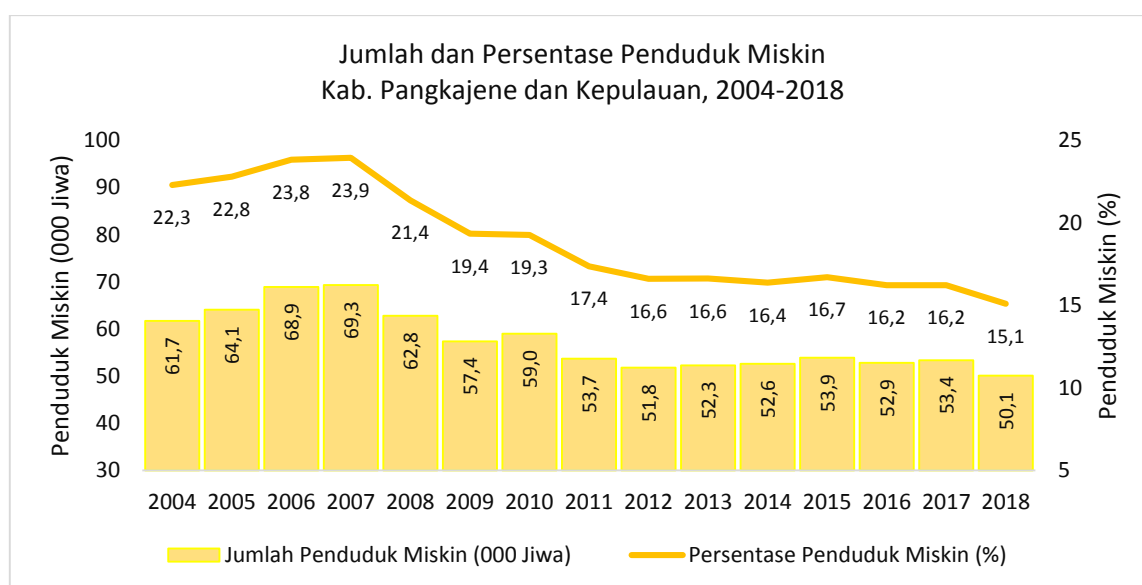
**Gambar 38. Persentase Rumah tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Pangkep (2017)**

Sumber: Susenas BPS (data diolah)

### III. KONDISI KEMISKINAN DI KABUPATEN PANGKEP

#### 3.1 Tren dan Pola Distribusi Pengeluaran Masyarakat

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) stagnan di sekitar angka 50-54 ribu jiwa sepanjang 2011-2018. Persentase penduduk miskin mengalami tren penurunan namun lajunya melambat di sekitar angka 15-17.5%. Sempat terjadi kenaikan 0.3% poin di tahun 2015 kemudian menurun kembali sebesar 0.5% poin di 2016. Tingkat kemiskinan tahun 2017 tetap di angka 16.2%, namun kemudian turun ke 15.1% di tahun 2018. Penurunan sebesar 7.3% poin ini mengindikasikan adanya penurunan jumlah penduduk miskin sebesar ±3,300 penduduk dalam waktu 2 tahun.



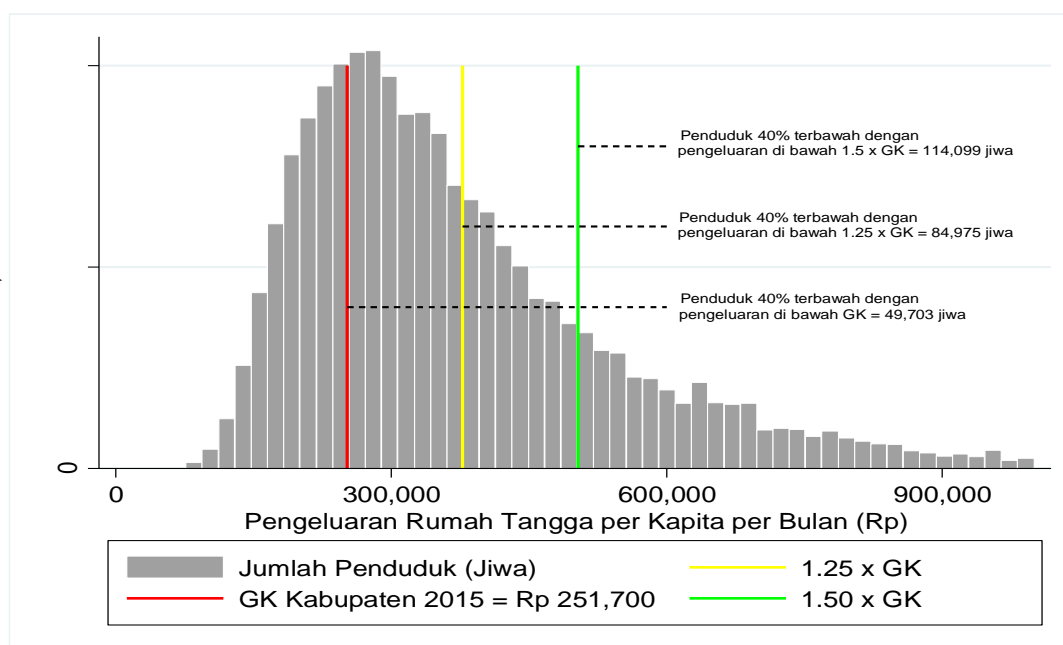
**Gambar 39 . Tren Kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2004-2018**

Sumber: Susenas (BPS).

Dibandingkan dengan kabupaten lain, Pangkep termasuk salah satu kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang tingkat kemiskinannya paling tinggi—secara bergantian dengan Jeneponto menempati peringkat pertama sebagai kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sulawesi Selatan. Sepanjang 2010-2017, tingkat kemiskinan Pangkep lebih tinggi dibandingkan Jeneponto. Baru pada Maret 2018 Pangkep menempati posisi kedua terbawah.<sup>2</sup> Sementara dari segi jumlah penduduk miskin, sumbangan Pangkep terhadap tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan (9.06%, Maret 2018) berada di bawah kabupaten/kota lain seperti Kabupaten Bone dan Kota Makassar yang relatif padat penduduknya. Dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi namun jumlah penduduk miskin yang relatif rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Sulawesi Selatan, perlu dilihat bagaimana karakteristik kemiskinan Pangkep sehingga dalam kurun waktu 7 tahun terakhir kemiskinannya tidak mengalami perubahan (stagnan) secara umum.

<sup>2</sup>Tingkat kemiskinan Pangkep adalah 15.10% sementara 15.48% untuk Jeneponto (BPS, Maret 2018). Sepanjang 2010-2017, tingkat kemiskinan Pangkep lebih tinggi dibandingkan Jeneponto. Sementara sebelum 2010, Jeneponto yang memegang posisi terbawah.

Secara relatif, kondisi kemiskinan masyarakat juga dapat dilihat melalui pola distribusi pengeluaran masyarakat. Distribusi pengeluaran rumah tangga per kapita per bulan di wilayah Pangkep yang menceng kanan (*right-skewed*) menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat berada di kelompok pengeluaran yang relatif rendah dibandingkan dengan rata-ratanya. Dari sekian banyak orang yang termasuk dalam kelompok penduduk 40% terbawah di seluruh Indonesia dan merupakan penduduk Pangkep, sekitar 49,703 jiwa hidup di bawah garis kemiskinan (GK) kabupaten 2015 (Rp 251,700). Posisi angka GK tersebut yang berada di antara seluruh distribusi pengeluaran mengindikasikan adanya kerentanan di dalam struktur kelompok penduduk 40% terbawah di Pangkep karena sebagian besar masyarakat hidup di sekitar GK. Jika terjadi guncangan yang menyebabkan perubahan negatif pada pola pengeluaran dan peningkatan garis kemiskinan, maka tingkat kemiskinan akan naik signifikan. Seperti contoh, jumlah penduduk miskin meningkat  $\pm 71$  persen ketika GK dinaikkan  $1 \frac{1}{4}$  kali (Rp 377,550 per kapita per bulan). Ketika GK naik lagi menjadi Rp 503,400 per kapita per bulan ( $1 \frac{1}{2}$  kalinya), jumlah penduduk miskin dari yang tercatat dalam BDT 2015 meningkat menjadi 114,099 jiwa. Jumlah ini hampir sebanding dengan 40% dari total seluruh penduduk di Pangkajene dan Kepulauan.



**Gambar 40. Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2015.**

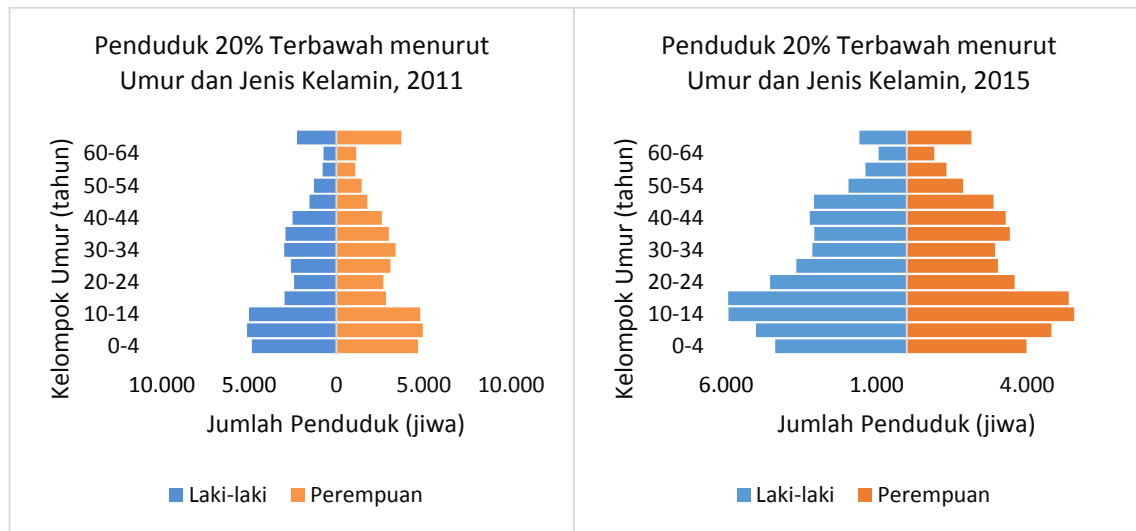
Sumber: BDT 2015 (BPS/TNP2K) dan Data dan Informasi Kemiskinan 2015 (BPS), diolah.

## 3.2 Karakteristik Kemiskinan di Kabupaten

Struktur penduduk miskin<sup>3</sup> di Pangkep dicirikan dengan proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang besar. Kondisi ini sebenarnya merupakan kesempatan strategis bagi Pangkep untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Namun dari tahun 2011 ke 2015 ternyata terjadi peningkatan proporsi penduduk miskin usia produktif. Ini menunjukkan bahwa “bonus demografi” (rasio ketergantungan yang rendah dengan proporsi penduduk produktif

<sup>3</sup>Penduduk miskin mencakup 20% penduduk termiskin berdasarkan data PPLS 2011 dan BDT 2015.

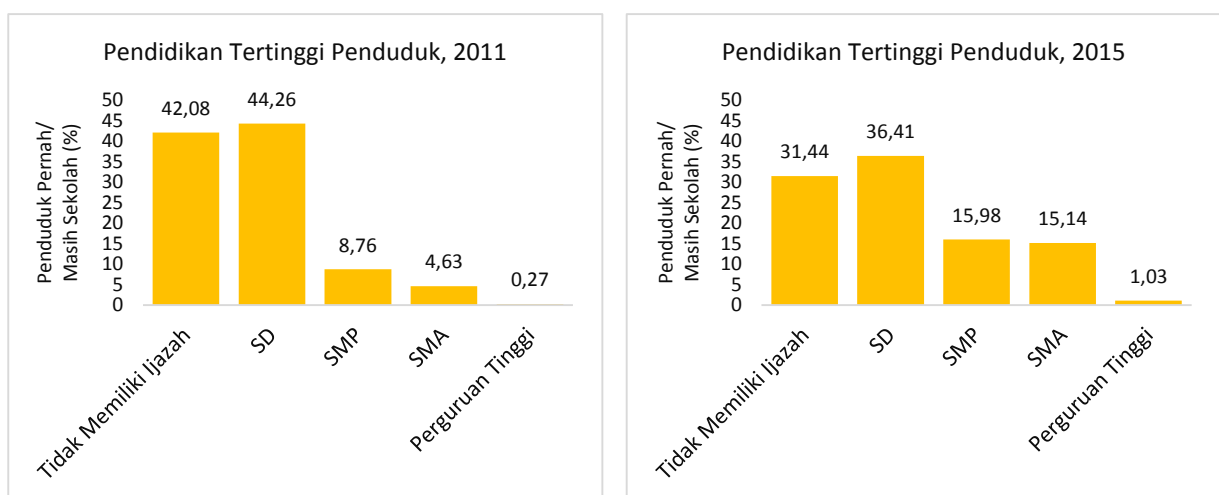
yang besar) di kelompok penduduk miskin terhambat karena tingginya proporsi penduduk miskin usia produktif yang tidak mampu mendapatkan penghasilan yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.



**Gambar 41. Piramida Penduduk 20% Terbawah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2011 dan 2015**

Sumber: PPLS 2011 (TNP2K) dan BDT 2015 (BPS/TNP2K), diolah.

Perubahan karakteristik kemiskinan penting lainnya adalah pergeseran sebaran penduduk miskin di Pangkep menurut tingkat pendidikan. Proporsi penduduk miskin yang pernah/masih sekolah sebagian besar merupakan tamatan pendidikan sekolah dasar (SD) dan bahkan tidak menyelesaikan SD. Namun terjadi pergeseran proporsi dari pendidikan dasar ke menengah. Terdapat 68% penduduk miskin yang pernah/masih sekolah merupakan tamatan SD dan tidak menyelesaikan SD di tahun 2015, dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 86%. Proporsi penduduk miskin yang pernah/masih sekolah dan sudah menamatkan SMP serta SMA meningkat dari 13% di tahun 2011 menjadi 31% di tahun 2015.



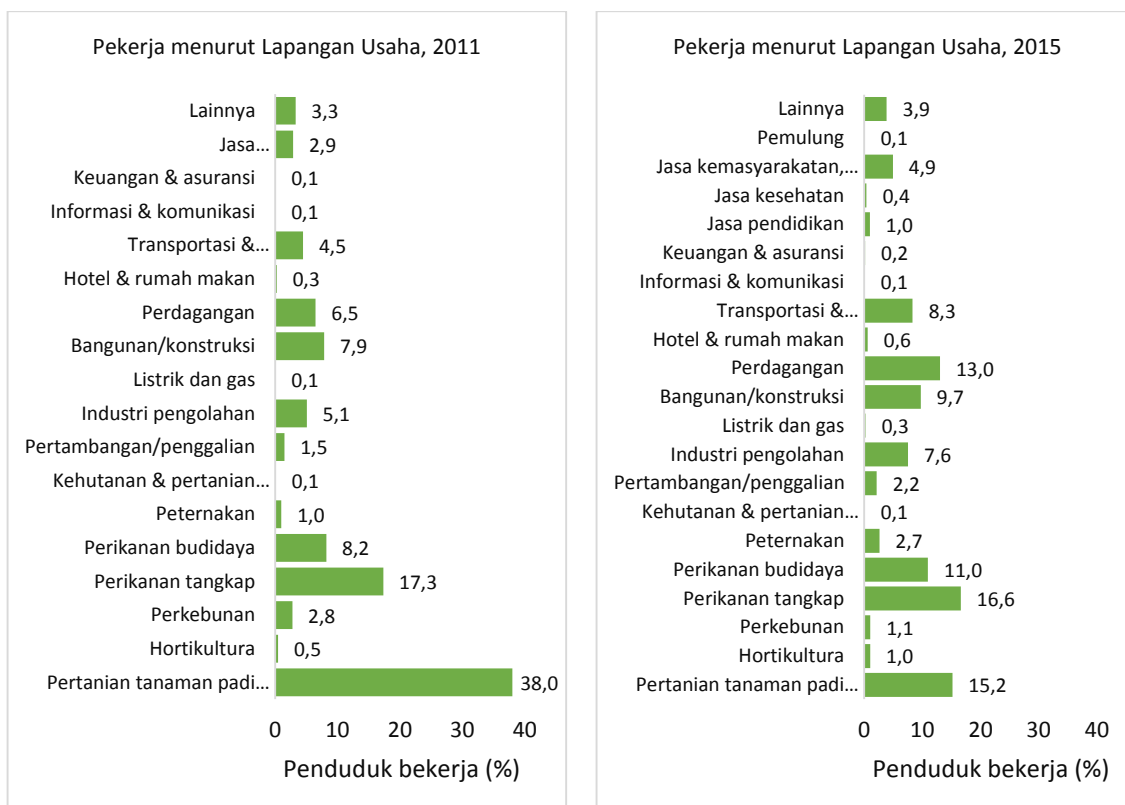
**Gambar 42. Pendidikan Penduduk 20% Terbawah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2011 dan 2015.**

(BPS/TNP2K), diolah.

Sumber: PPLS 2011 (TNP2K) dan BDT 2015

Meskipun terdapat perbaikan di sektor pendidikan, namun perubahan karakteristik penduduk miskin menurut tingkat pendidikan tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan anak dan anak muda di Pangkep perlu mendapatkan perhatian yang cukup. Jika tidak, hal ini berpotensi menghambat upaya penanggulangan kemiskinan jangka panjang. Pangkep perlu membuat sistem penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif agar anak dan anak muda miskin terjamin akses pendidikan dan kesehatannya sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk keluar dari kemiskinan melalui akumulasi pendidikan serta kondisi kesehatan yang lebih baik.

Penyerapan ekonomi terhadap tenaga kerja kelompok miskin di Pangkep yang rata-rata berpendidikan rendah pun akan terus menurun mengingat turunnya kontribusi sektor pertanian yang merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar orang miskin (68%, 2011; 48%, 2015). Sementara itu di sektor industri pertambangan dan manufaktur terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja miskin meskipun hanya sebesar 5% titik poin (15%, 2011; 20%, 2015). Di sektor jasa yang lebih banyak menyerap tenaga kerja berpendidikan dan berketrampilan tinggi, penyerapan tenaga kerja kelompok miskinnya meningkat hampir 2 kali lipat (18%, 2011; 33%, 2015). Peningkatan di sektor industri dan jasa ini belum didukung oleh pengembangan usaha mikro dan kecil bagi penduduk miskin. Sebagian besar penduduk miskin yang bekerja di sektor industri dan jasa masih bergantung pada industri pengolahan skala mikro dan kecil serta jasa informal yang rentan terhadap guncangan dan ketat dalam hal persaingan. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya akses terhadap sumber permodalan dan informasi yang memadai untuk meningkatkan kapasitas sumber daya, kualitas produk, dan jangkauan pemasaran bagi kalangan pengusaha dari kelompok penduduk miskin.



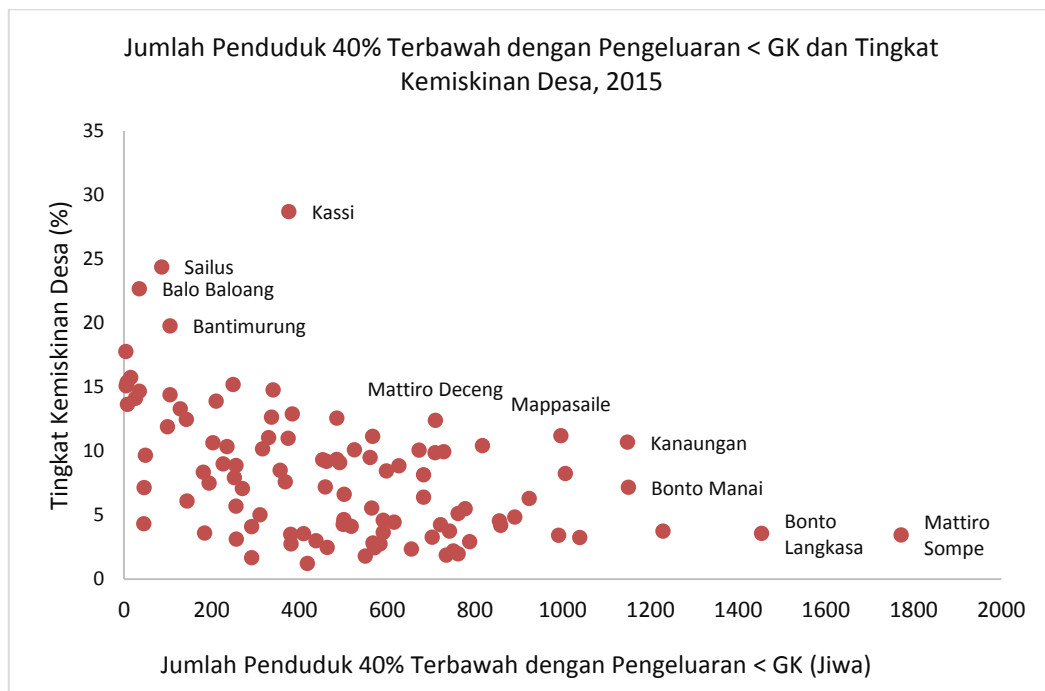
**Gambar 43. Pekerjaan Penduduk 20% Terbawah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2011 dan 2015.**

Sumber: PPLS 2011 (TNP2K) dan BDT 2015 (BPS/TNP2K), diolah.

### 3.3 Karakteristik Kemiskinan di Beberapa Wilayah

Salah satu dilema yang terjadi ketika pembuat kebijakan harus menentukan prioritas wilayah untuk penanggulangan kemiskinan adalah apakah harus fokus terhadap jumlah penduduk miskin atau tingkat kemiskinannya. Dengan menggunakan BDT 2015 untuk menentukan jumlah penduduk 40% terbawah dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan kabupaten 2015 serta data tingkat kemiskinan desa dari Peta Kemiskinan 2015, terlihat bahwa terdapat hubungan negatif antara jumlah penduduk termiskin dengan tingkat kemiskinan di mana desa/kelurahan yang penduduk miskinnya relatif tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang relatif rendah.

Kondisi ini erat kaitannya dengan jumlah penduduk yang menempati suatu desa/kelurahan. Desa/kelurahan yang penduduknya relatif banyak cenderung memiliki tingkat kemiskinan rendah namun jumlah penduduk miskinnya tinggi. Seperti contoh Mattiro Sompe, Bonto Langkasa, Mappasaile, dan Mattiro Deceng, keempatnya merupakan wilayah yang berbentuk kelurahan dan umumnya memiliki sifat perkotaan sehingga biasanya dicirikan dengan jumlah penduduk yang relatif padat. Sementara Bonto Manai dan Kanaungan merupakan 2 dari desa yang berada di Kecamatan Labakkang, kecamatan dengan penduduk relatif terpadat di Pangkep.



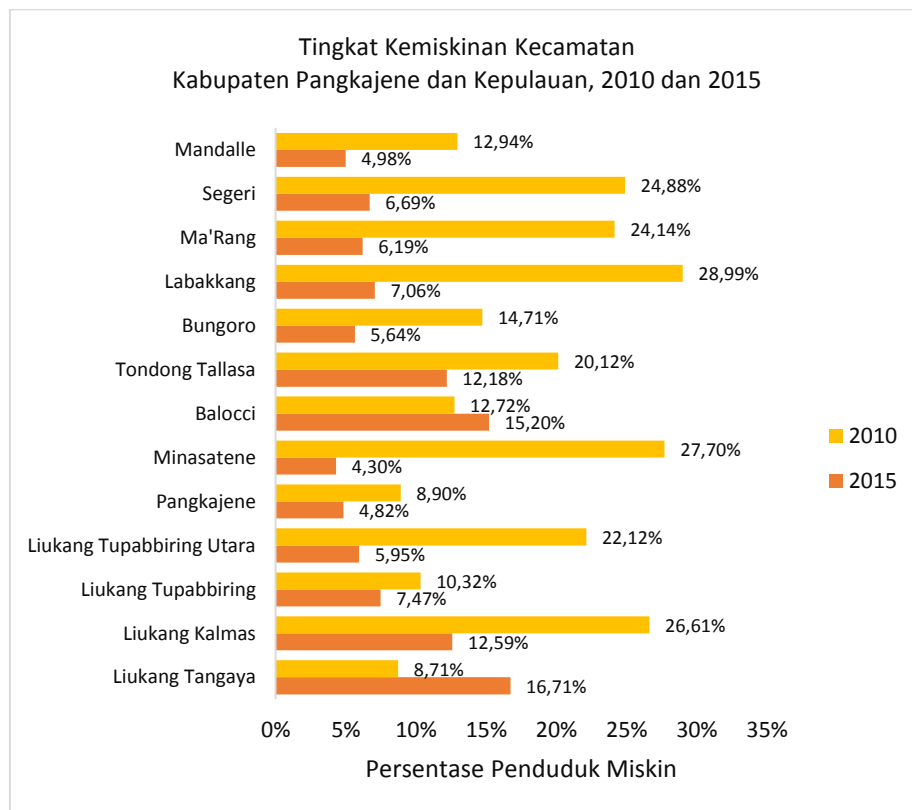
**Gambar 44. Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2015.**

Sumber: BDT 2015 (BPS/TNP2K) dan Peta Kemiskinan 2015 (SMERU), diolah.

Catatan: Jumlah desa=102, Mattiro Bintang (631 jiwa) masih digabung dengan Mattiro Sompe (1141 jiwa) di tahun 2010

Tiga (3) desa/kelurahan dengan tingkat kemiskinan tertinggi namun jumlah penduduk miskinnya relatif rendah adalah Sailus, Balo Baloang, dan Bantimurung. Sailus dan Balo Baloang merupakan desa di wilayah gugusan kepulauan Kecamatan Liukang Tangaya sementara Bantimurung adalah desa yang berada di wilayah dataran tinggi di Kecamatan Tondong Tallasa. Yang menarik adalah Kelurahan Kassi di Kecamatan Balocci, di mana jumlah penduduk miskinnya relatif tidak rendah maupun tinggi namun memiliki tingkat kemiskinan tertinggi.

Selain melalui karakteristik demografi dari penduduk miskin di tingkat kabupaten, tren penurunan kemiskinan serta perlambatan laju kemiskinan di Pangkep sepanjang 2011-2018 dapat digambarkan melalui perubahan tingkat kemiskinan kecamatan tahun 2010 dan 2015. Selama periode tersebut, sebagian besar dari seluruh 13 kecamatan mengalami penurunan angka kemiskinan kecuali Liukang Tangaya dan Balocci. Liukang Tangaya merupakan salah satu kecamatan yang berbentuk kepulauan dan berlokasi paling jauh dari pusat ibukota kabupaten. Wilayahnya justru berbatasan dengan provinsi lain yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), tepatnya Kabupaten Lombok Utara. Sementara Balocci adalah salah satu kecamatan yang berlokasi di dataran tinggi dan berbatasan dengan Kabupaten Maros serta merupakan wilayah ring 1 (terdekat) dari pabrik PT Semen Tonasa Tahap I.



**Gambar 45. Tingkat Kemiskinan Kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2010 dan 2015.**

Sumber: Peta Kemiskinan 2010 dan 2015 (SMERU).

Berdasarkan Peta Kemiskinan SMERU 2015, terdapat 5 dari 10 desa/kelurahan di Pangkep dengan tingkat kemiskinan tertinggi berada di Liukang Tangaya, sementara 2 desa/kelurahan berada di Balocci. Kelima desa/kelurahan di Liukang Tangaya tersebut adalah Sailus, Balo Baloang, Kapoposan Bali, Poleonro, dan Sabaru. Kedua desa/kelurahan di Balocci yang tertinggi tingkat kemiskinannya adalah Kassi dan Tompo Bulu. Sailus, Kapoposan Bali, dan Poleonro merupakan desa di wilayah paling ujung sebelah selatan Pangkep—berbatasan dengan Lombok Utara. Sementara Kassi adalah kelurahan dan ibukota Kecamatan Balocci serta berbatasan langsung dengan Desa Tonasa (lokasi PT Semen Tonasa Tahap I), sedangkan Tompo Bulu terletak di lereng Gunung Balasaraung kawasan Taman Nasional Bantimurung.

**Tabel 8. Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga dari Penduduk 20% Terbawah menurut Kecamatan, 2015**

No.	Kecamatan	PPLS 2011		BDT 2015	
		Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga
1	Liukang Tangaya	4,465	1,0096	1,735	502
2	Liukang Kalmas	837	181	2,661	757
3	Liukang Tupabbiring	6,271	1,255	8,748	2,113
4	Liukang Tupabbiring Utara	3,377	713	4,671	1,206
5	Pangkajene	5,494	1,164	11,214	2,523
6	Minasatene	8,312	1,899	10,980	2,434
7	Balocci	4,560	1,185	3,756	947
8	Tondong Tallasa	3,921	1,033	2,375	711
9	Bungoro	7,822	1,976	10,242	2,522
10	Labakkang	15,281	3,720	16,158	4,008
11	Ma'rang	7,935	2,029	10,564	2,616
12	Segeri	6,026	1,594	5,135	1,296
13	Mandalle	4,857	1,187	4,646	1,132
<b>Total</b>		<b>79,158</b>	<b>19,032</b>	<b>92,885</b>	<b>22,767</b>

Sumber: PPLS 2011 (TNP2K) dan BDT 2015 (BPS/TNP2K), diolah.

Di sisi lain, berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) 2015, bukan wilayah kepulauan maupun pegunungan seperti Liukang Tangaya atau Balocci yang jumlah penduduk miskinnya terbanyak, melainkan wilayah pesisir seperti Labakkang. Meskipun berdasarkan estimasi dalam Peta Kemiskinan SMERU 2015 tingkat kemiskinannya relatif rendah (7.06%), Labakkang menjadi kecamatan dengan penduduk 20% terbawahnya paling banyak (16,158 jiwa; 4,008 rumah tangga) sementara relatif sedikit untuk Liukang Tangaya (1,735 jiwa; 502 rumah tangga) dan Balocci (3,756 jiwa; 947 rumah tangga). Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antara wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan jumlah penduduk miskin terbanyak. Perbedaan karakteristik ini yang kemudian menentukan pilihan-pilihan kebijakan yang efektif bagi penanggulangan kemiskinan.

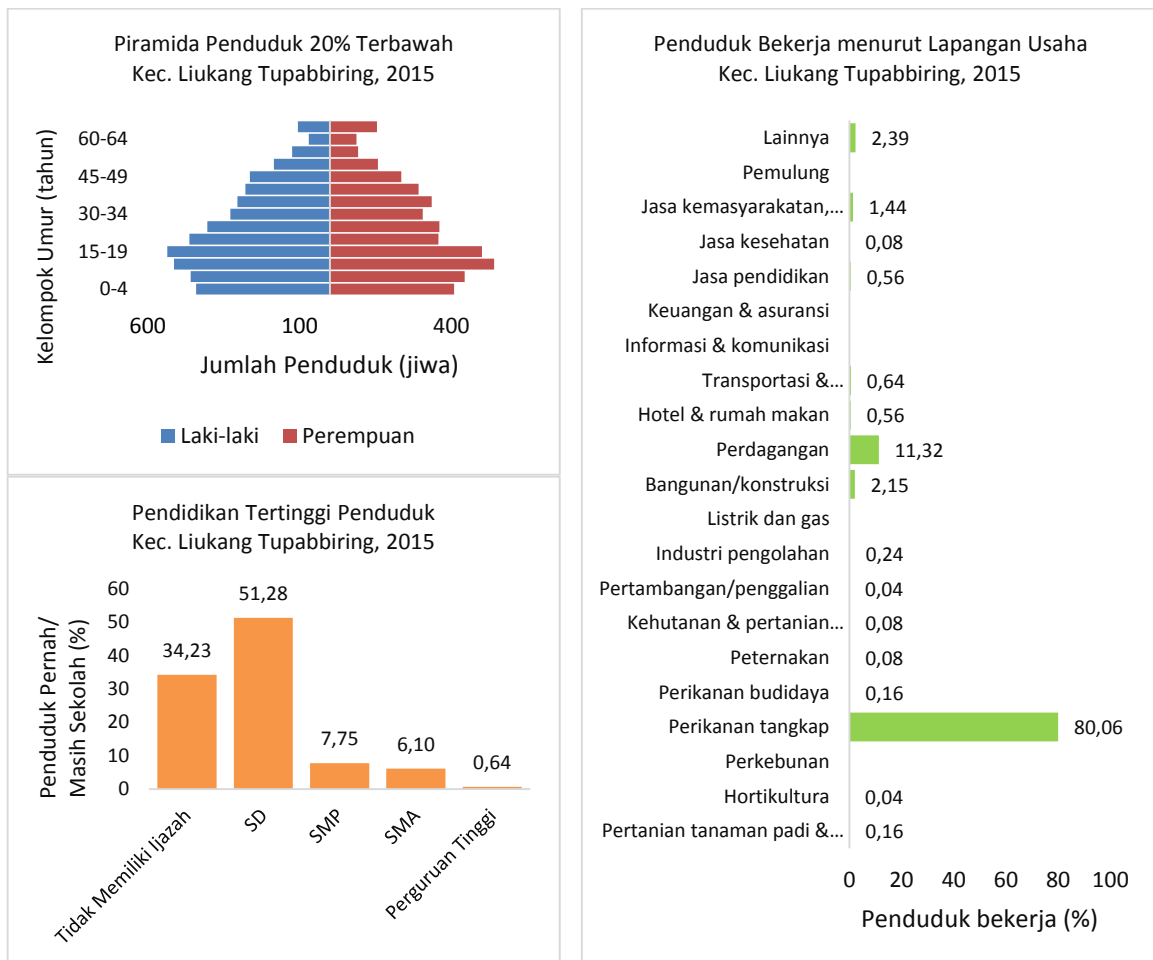
### 3.3.1 Wilayah Kecamatan Kepulauan

Kecamatan Liukang Tupabbiring merupakan wilayah kepulauan yang jaraknya relatif dekat dengan Pangkep daratan. Ibukota kecamatannya, yakni Kelurahan Mattiro Sompe yang terletak di Pulau Balang Lompo, berjarak sekitar 22 kilometer dari ibukota Kabupaten Pangkep (Pangkajene). Luas wilayah Liukang Tupabbiring mencakup sekitar 140 km<sup>2</sup> dengan sebagian besar wilayah terdiri dari perairan dan sekitar 43 pulau. Salah satu aset yang dimiliki oleh Liukang Tupabbiring adalah Kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) Kapoposang yang terletak di ujung sebelah barat kecamatan. Beberapa aktivitas yang ditawarkan oleh TWP ini adalah olahraga air seperti menyelam dan *snorkeling*, memancing, budidaya rumput laut dan melihat penyu bertelur. Waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mencapai TWP Kapoposang dari Maros dan Pangkep masing-masing 7 dan 8 jam dengan menggunakan perahu motor. Dengan *speed-boat*, waktu tempuh dapat dipersingkat menjadi 2-3 jam. Kondisi geografis seperti ini memperlihatkan bahwa distribusi sumber daya untuk mengurangi kemiskinan di wilayah kepulauan seperti di Liukang Tupabbiring memerlukan perlakuan yang berbeda dengan alur distribusi sumber daya untuk wilayah daratan. Keberadaan



alat transportasi laut seperti perahu motor dan kapal yang memadai merupakan faktor pendukung utama bagi masyarakat kepulauan untuk melakukan mobilisasi dan berinteraksi dalam kegiatan sehari-harinya.

Berdasarkan BDT 2015, sebagian besar penduduk 20% terbawah di Pangkep yang tinggal di Liukang Tupabbiring bekerja di sektor perikanan tangkap sebagai nelayan (80%). Selain melaut, 11% bekerja di sektor perdagangan. Dengan faktor risiko alam berupa cuaca yang tidak menentu serta penurunan hasil laut, masyarakat miskin di kepulauan perlu untuk mendiversifikasi pekerjaan mereka ke sektor-sektor yang tidak bertumpu secara langsung pada sumber daya laut. Industri pengolahan ikan, kepiting, cumi, udang, dan lobster dapat memberikan nilai tambah bagi sektor primer perikanan dan kelautan.



**Gambar 46. Piramida, Pendidikan, dan Pekerjaan Penduduk 20% Terbawah Kec. Liukang Tupabbiring, 2015**

Sumber: BDT 2015 (BPS/TNP2K), diolah.

Dilihat dari sisi pendidikannya, lebih dari setengah penduduk 20% terbawah di Pangkep yang tinggal di Liukang Tupabbiring memiliki ijazah SD. Masih ada sekitar 34%-nya yang tidak memiliki ijazah dan hanya sedikit yang memiliki ijazah SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Selain karena *trade-off* antara pendidikan dan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan di wilayah kepulauan seperti di Liukang Tupabbiring ini menunjukkan rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan. Tidak hanya keterbatasan untuk mengakses sekolah secara fisik tetapi juga dalam hal proses belajar-mengajar. Faktor ketersediaan dan kualitas guru serta buku pelajaran menjadi aspek penting bagi sektor

pendidikan di wilayah kepulauan. Selain itu, kualitas jaringan komunikasi seperti sinyal dan internet diperlukan untuk menunjang sistem ujian perolehan ijazah yang saat ini sudah berbasis *online*. Keberadaan jaringan komunikasi dan perlengkapan penunjang lainnya tersebut dapat mengurangi tingkat putus sekolah akibat besarnya biaya transportasi yang diperlukan dan adanya risiko faktor cuaca untuk mengikuti ujian di wilayah daratan.

**Tabel 9. Klasifikasi Kesejahteraan Masyarakat Kel. Mattiro Sompe, Kec. Liukang Tupabbiring**

Ciri-ciri Kesejahteraan	Kelompok Kesejahteraan (Menurut Masyarakat)		
	Sejahtera	Menengah (Kadang Sejahtera, Kadang Tidak Sejahtera)	Kurang Sejahtera (Miskin)
<b>Penghasilan dan pekerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nelayan punggawa dan pabagang (pemilik bagang) bisa sampai memperoleh penghasilan hingga Rp 25 juta/bulan.</li> <li>- Nelayan dengan alat rakitan (pappape) memperoleh penghasilan Rp 500 ribu/hari.</li> <li>- Nelayan pemilik keramba lobster</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghasilan tetap antara Rp 1-3 juta/bulan.</li> <li>- Pekerjaannya sebagai nelayan mandiri (memiliki katinting-perahu kecil), PNS, guru honorer, pedagang</li> <li>- Biasanya memiliki beberapa pekerjaan sekaligus dengan memanfaatkan kondisi perekonomian di lingkungan sekitarnya.</li> </ul>	Tidak punya penghasilan tetap Pekerjaan sebagai buruh harian (sawi), misalnya bekerja pada keramba, buruh nelayan
<b>Pendidikan</b>	Pendidikan anak hingga S1 bahkan S2	Taraf pendidikan anak minimal SMA	Anaknya tidak selesai sekolah karena ikut melaut
<b>Kendaraan bermotor</b>	Memiliki motor bahkan hingga 2-3 unit, meskipun di Pulau keberadaan motor sebagai alat transportasi kurang diperlukan karena kecilnya luasan wilayah kelurahan.	--	--
<b>Rumah</b>	Rumah berukuran besar	Rumah kondisi biasa/sedang, layak huni	Rumah tidak layak huni
<b>Ciri lain</b>	- Punya lahan/rumah lain di luar pulau (Pangkep, Makasar)	--	Tidak ada anak/punya banyak anak Dapat bantuan: PKH, Rastra, KIP
<b>Persentase (2018)</b>	11%	59%	30%
<b>Persentase (2013)</b>	11%	59%	30%

Sumber: FGD Perwakilan Desa/Kelurahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2018.

Berdasarkan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan perwakilan salah satu desa/kelurahan di wilayah kepulauan, yakni Kelurahan Mattiro Sompe, Pulau Balanglombo, Kec. Liukang Tupabbiring, terdapat 3 klasifikasi kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut: sejahtera, menengah (kadang sejahtera, kadang tidak sejahtera), dan kurang sejahtera (miskin). Beberapa karakteristik yang membedakan ketiga kelompok masyarakat tersebut antara lain berkaitan dengan penghasilan dan pekerjaan, tingkat pendidikan, kepemilikan kendaraan bermotor, dan kondisi rumah.

Masyarakat kurang sejahtera (miskin) dicirikan dengan penghasilan yang tidak tetap, dengan jenis pekerjaan berupa buruh harian (sawi) di usaha keramba dan juga buruh nelayan. Secara umum anak dari keluarga miskin biasanya tidak menamatkan sekolah karena ikut melaut untuk membantu penghidupan keluarga. Mereka juga biasanya tidak memiliki kendaraan bermotor dan tinggal di rumah dengan kondisi yang tidak layak huni. Selain itu, ciri-ciri lain adalah keluarga miskin umumnya memiliki banyak anak. Beberapa bantuan sosial yang mereka dapat misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra), serta memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ada juga keluarga miskin lain yang tidak memiliki anak dan umumnya terdiri dari penduduk lanjut usia (lansia) sehingga tidak ada yang bekerja/membantu bekerja untuk mengatasi keterbatasan kondisi keuangan.

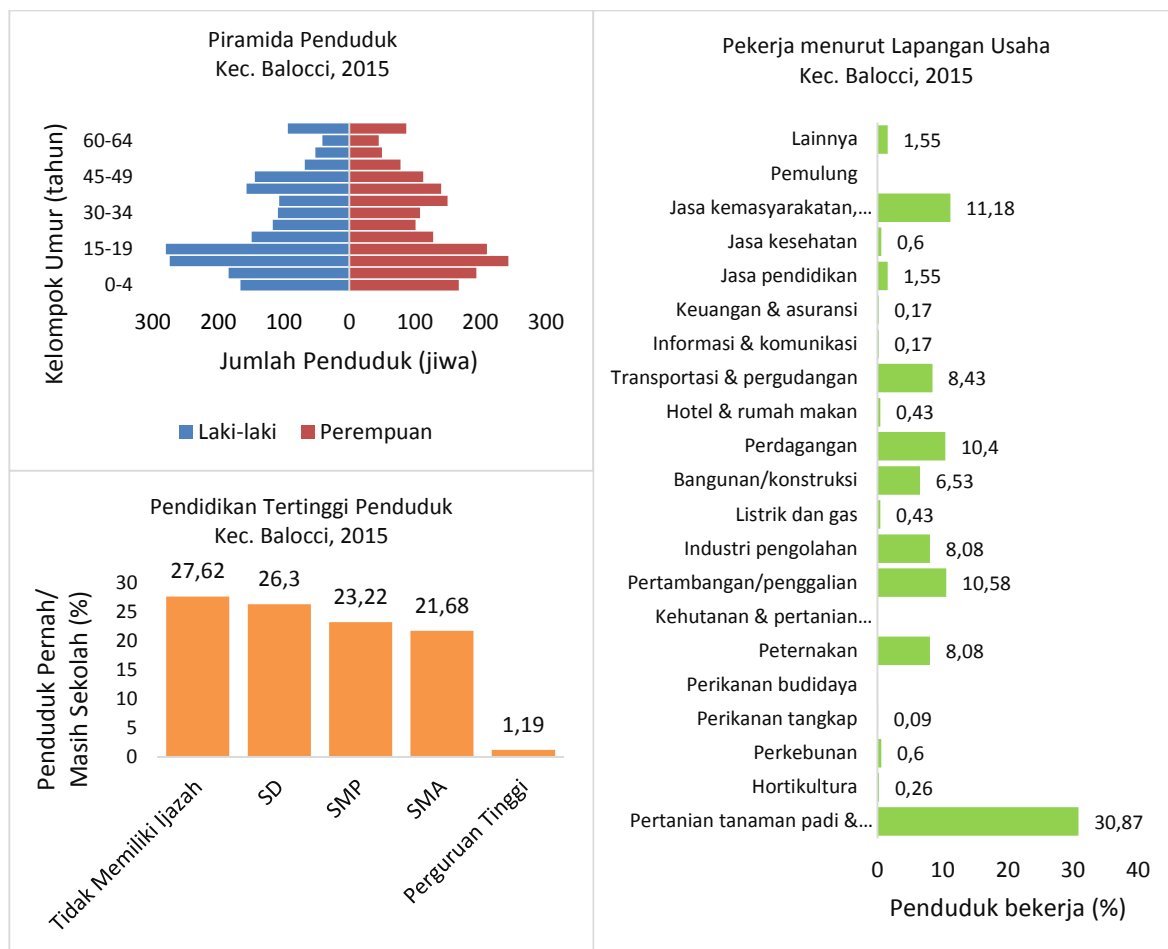
Menurut peserta FGD, tidak ada perubahan persentase di tiap kelompok kesejahteraan selama 5 tahun ke belakang (2013 ke 2018). Di tahun 2015 sempat terjadi sedikit perubahan namun tidak sampai mengubah komposisi di tiap klasifikasi kesejahteraan. Pada tahun 2015, terjadi sedikit penurunan kesejahteraan dan perubahan mata pencaharian yang dialami oleh nelayan (termasuk pemilik bagang kapal) karena menurunnya tangkapan ikan. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya populasi ikan akibat kerusakan terumbu karang karena praktik penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan pukat harimau.

Penurunan kesejahteraan 3 tahun belakangan ini mendorong sebagian masyarakat yang memiliki modal untuk beralih menjadi nelayan keramba lobster. Hal ini juga diiringi dengan adanya program dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pangkep berupa bantuan keramba dan bibit lobster kepada 10 orang anggota kelompok nelayan di tahun 2015. Saat ini ada sekitar 91 nelayan (di luar peserta program) yang telah mengembangkan budidaya lobster dalam keramba. Pemilik keramba umumnya merupakan nelayan yang ada di kelompok sejahtera dan menengah. Ada pula kelompok menengah yang menjadi pengelola keramba di mana mereka yang berada di kelompok sejahtera menjadi pemberi modal. Sementara itu, masyarakat kelompok miskin biasanya adalah para pekerja keramba. Peserta FGD melihat bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan di kelompok miskin seperti yang semulanya bekerja sebagai buruh harian (sawi) kini menjadi nelayan yang memiliki perahu kecil atau dari yang awalnya adalah penjaga/pekerja keramba menjadi nelayan yang memiliki keramba sendiri.

### 3.2.2 Wilayah Kecamatan Pegunungan

Hampir sama dengan karakteristik kepulauan, desa/kelurahan di wilayah dataran tinggi juga menggantungkan hidupnya pada sektor primer sumber daya alam. Bedanya, sumber daya alam di wilayah dataran tinggi berasal dari hutan dan pegunungan. Seperti contoh Kelurahan Kassi, meskipun termasuk dalam kategori desa/kelurahan yang bersifat perkotaan, namun awalnya masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor industri ekstraktif berupa semen, batu kapur, dan marmer selain sektor pertanian padi dan palawija. Ketergantungan terhadap sektor ini memiliki risiko penurunan hasil industri ekstraktif akibat eksploitasi secara besar-besaran di periode waktu tertentu. Seperti Kelurahan Kassi yang merupakan wilayah ring 1 dari PT Semen Tonasa Tahap I di tahun 1960-an. Pada tahun 1976, PT Semen Tonasa membangun pabrik tahap II di Kecamatan Bungoro dan mulai memindahkan sumber dayanya ke Bungoro karena sudah tidak ada lagi sumber alam tanah liat dan kapur yang dibutuhkan untuk industri semen di Balocci. Meskipun sudah tidak ada sumber hasil alam yang dibutuhkan untuk industri besar, namun masyarakat masih memanfaatkan sisa-sisa hasil tambang di bukit batu kapur dengan nilai jual yang relatif rendah. Selain itu, karyawan-karyawan Tonasa Tahap I yang bertempat tinggal di Kassi saat ini memasuki masa pensiun sehingga ada sebagian masyarakat yang kini sudah tidak produktif bekerja. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana manajemen sumber daya alam diperlukan untuk mengatasi potensi kemiskinan jangka panjang. Selain itu, masyarakat miskin juga perlu untuk mendiversifikasi sektor

pekerjaan mereka dalam rangka mencegah risiko penurunan pendapatan akibat adanya kontraksi di sektor industri ekstraktif.



**Gambar 47. Piramida, Pendidikan, dan Pekerjaan Penduduk 20% Terbawah Kec. Balocci, 2015.**

Sumber: BDT 2015 (BPS/TNP2K), diolah.

Jika dilihat dari data terkait mata pencaharian penduduk berdasarkan BDT 2015, hampir setengah penduduk 20% terbawah yang tinggal di Kecamatan Balocci bekerja di sektor pertanian tanaman padi dan palawija (31%), jasa kemasyarakatan dan pemerintahan (11%), dan pertambangan/penggalian (11%). Sektor pertambangan/penggalian yang dimaksud adalah mereka yang bekerja sebagai pemukul dan pengangkut batu di bukit-bukit batu kapur. Kegiatan memukul batu biasanya lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dewasa karena alat pemukul yang digunakan berukuran sangat berat sehingga memerlukan sumber daya tenaga yang kuat. Sementara kegiatan mengangkut batu-batu dari bukit ke mobil pengangkut biasanya dilakukan oleh baik laki-laki dan perempuan dewasa serta anak-anak. Keterlibatan anak-anak dalam kegiatan pertambangan/penggalian batu kapur ini memperlihatkan adanya kasus-kasus putus sekolah akibat partisipasi pekerja anak.

Data terkait pendidikan untuk penduduk 20% terbawah yang tinggal di Kecamatan Balocci menunjukkan bahwa lebih dari setengahnya tidak memiliki ijazah dan hanya sampai pada tingkat SD. Namun demikian, tingkat pendidikan mereka relatif merata, dengan hampir separuhnya

memiliki ijazah SMP dan SMA, bahkan ada sebagian kecil dari masyarakat tersebut yang memiliki ijazah perguruan tinggi.

Berdasarkan FGD dengan perwakilan salah satu desa/kelurahan di wilayah pegunungan, yakni Kelurahan Kassi, Kec. Balloci, terdapat 3 klasifikasi kesejahteraan masyarakat di keluraha tersebut: makmur (mapan), menengah ke bawah, dan prasejahtera (miskin). Beberapa karakteristik yang membedakan ketiga kelompok masyarakat tersebut antara lain adalah penghasilan, pekerjaan, kondisi rumah, kepemilikan kendaraan, lahan, pendidikan, makanan yang dikonsumsi, dan pola kegiatan sehari-hari masyarakat.

**Tabel 10. Klasifikasi Kesejahteraan Masyarakat Kel. Kassi, Kec. Balloci.**

Ciri-ciri Kesejahteraan	Kelompok Kesejahteraan (Menurut Masyarakat)		
	Makmur (Mapan)	Menengah ke Bawah	Prasejahtera (Miskin)
<b>Penghasilan</b>	>7 juta Rupiah per bulan	1.5-7 juta Rupiah per bulan	<1.5 juta Rupiah per bulan
<b>Pekerjaan</b>	Karyawan Tonasa/BUMN, pengusaha, punya alat-alat berat untuk pukul batu, tanah liat, tambang. Memiliki usaha sendiri: jual bahan bangunan, jual barang grosiran, dan berprofesi bidan praktik	PNS (guru, tentara, pegawai), pegawai swasta (karyawan anak perusahaan), pegawai kontrak/harian, petani	Petani penggarap atau buruh tani (yang punya lahan orang kaya), buruh bangunan, buruh tambang galian/ pemukul batu
<b>Kondisi rumah</b>	Ukuran besar, punya rumah di tempat lain misalnya di Makassar dan Pangkep (>1 rumah)	-	Tidak permanen (rumah panggung/ kayu, masih perlu perbaikan), lantai tanah, semen, bambu (rumah panggung). Ada juga yang tidak memiliki rumah (numpang tidur di lahan rumah orang lain)
<b>Kepemilikan kendaraan</b>	Memiliki 2 mobil, 3 motor	Tidak memiliki kendaraan roda empat, memiliki motor	Kendaraan motor bekas/sepeda, motor dicil
<b>Lahan</b>	Luas lahan sawah/ padi 2 ha, punya kebun jagung juga	Luas lahan $\frac{3}{4}$ - 2 ha	Luas lahan <0.75 ha
<b>Pendidikan</b>	Rata-rata S1/sarjana	Anak sudah berpendidikan sampai S1	-
<b>Makanan yang dikonsumsi</b>	-	-	Nasi, ikan kering/ asin, telur, ikan teri, makan daging 1x setahun (saat Idul Adha)
<b>Keseharian</b>	Bergaya mewah (bawa mobil ke sekolah), menggunakan sepatu bermerk, hampir tiap minggu ke mall (Grand Mall di Makassar), rajin sedekah, cukup mampu bersosialisasi dan berpartisipasi pada kegiatan sosial (donator tetap di masjid), sering melakukan umroh	Mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial (pengajian), mampu menyumbang, mampu melakukan kegiatan refreshing 1x dalam 2 bulan (ke tempat-tempat pemandian, pantai)	Belanja pakaian 1x setahun, kadang tidak beli, ada emas tapi hanya dipakai untuk anting, banyak yang tidak memiliki emas/ perhiasan, memiliki kartu berobat tapi ada juga yang belum memiliki KIS (masalah pendistribusian berdasarkan data)
<b>Persentase (2018)</b>	9%	63%	28%
<b>Persentase (2013)</b>	23%	38%	39%

Sumber: FGD Perwakilan Desa/Kelurahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2018.

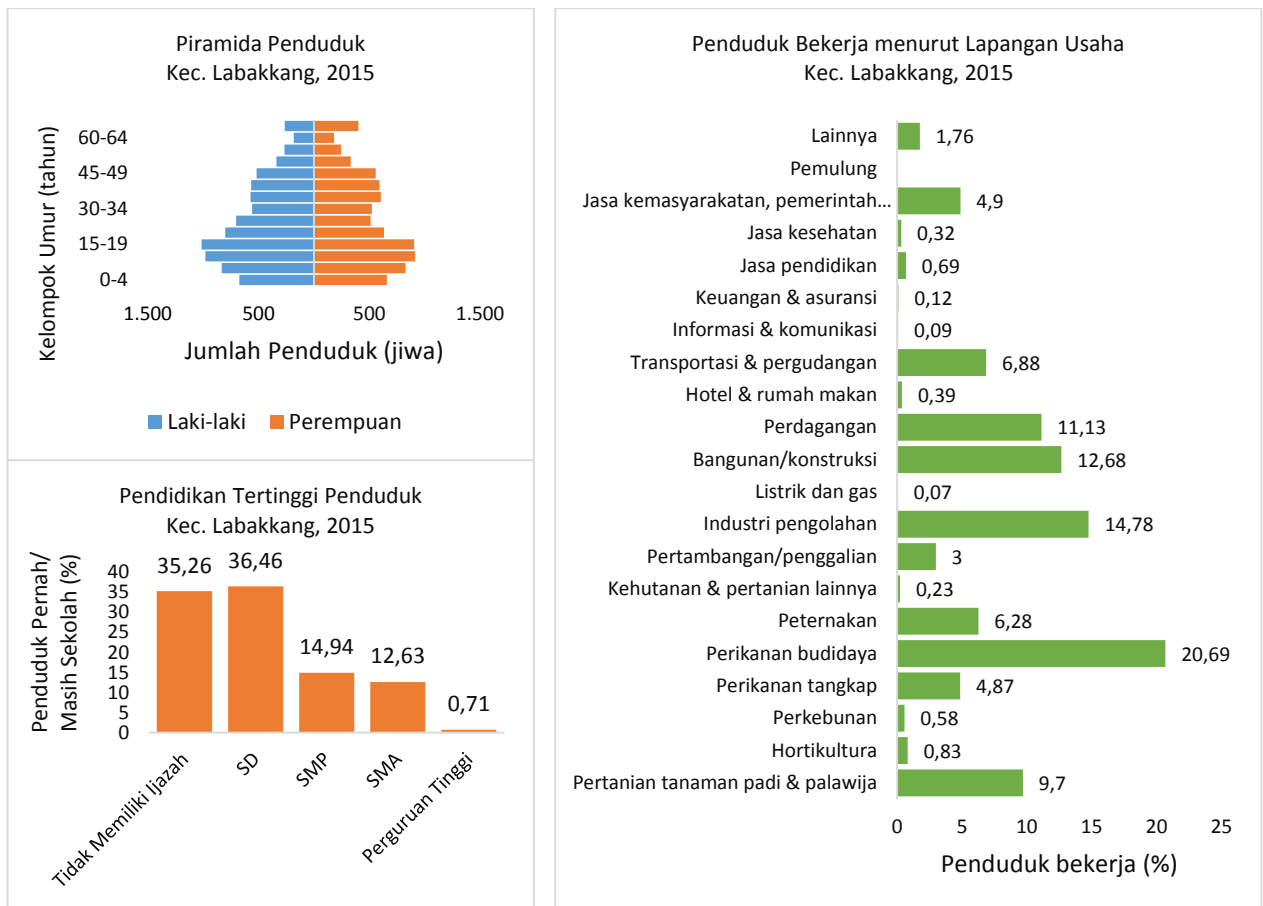
Masyarakat kurang sejahtera (miskin) dicirikan dengan penghasilan sekitar di bawah 1.5 juta Rupiah, dengan jenis pekerjaan berupa petani penggarap/buruh tani yang menggarap lahan orang, buruh bangunan, buruh tambang/galian seperti pemukul batu. Jenis rumah mereka tidak permanen karena umumnya berbentuk rumah panggung/kayu dan berlantai tanah, semen, atau bambu jika rumah panggung. Ada juga dari mereka yang tidak memiliki rumah sehingga harus menumpang di lahan rumah orang yang lebih kaya. Tumpangan ini ada yang diberikan secara gratis (karena kasihan) tapi ada pula yang melalui sistem sewa. Untuk sistem sewa, biasanya mereka akan membayar dengan beras 50 kg per tahun (sehabis panen) sebagai bayarnya. Aset yang mereka miliki biasanya kendaraan motor bekas/sepeda dan luas lahan kurang dari  $\frac{1}{4}$  ha. Ada yang memiliki emas namun hanya sebatas perhiasan untuk dipakai sebagai anting misalnya. Makanan yang dikonsumsi biasanya nasi dengan lauk ikan kering/asin, telur, ikan teri. Jarang sekali makan daging, itu pun setahun sekali pada saat Idul Adha. Untuk berobat, umumnya mereka menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) namun karena masih terdapat masalah pendistribusian akibat kesalahan data, ada pula dari mereka yang tidak memperoleh KIS.

Menurut peserta FGD, terdapat perubahan komposisi penduduk tiap kelompok kesejahteraan selama 5 tahun ke belakang (2013 ke 2018). Namun perubahan yang tampak jelas terjadi adalah penurunan jumlah masyarakat kaya sehingga menyebabkan tingginya kenaikan jumlah penduduk di kelompok menengah. Kondisi ini disebabkan karena pada periode ini, hampir sebagian besar karyawan yang bekerja di Tonasa memasuki masa pensiun. Selain itu terjadi beberapa kasus pengurangan karyawan di beberapa perusahaan seperti anak-anak perusahaan Tonasa dan perusahaan marmer. Umumnya mereka berstatus pekerja kontrak yang sudah tidak bekerja karena habis masa kontrak. Beberapa peserta juga menyebutkan bahwa pekerja-pekerja tersebut menerima insentif atau bonus yang berkurang. Jika sebelumnya insentif dapat sejumlah 6 bulan gaji, kini hanya 2 bulan gaji. Sementara itu di kelompok masyarakat miskin, meskipun terdapat perubahan penurunan, namun penurunannya tidak terlalu tampak dibandingkan dengan di kelompok sejahtera.

### 3.2.3 Wilayah Kecamatan Pesisir

Berbeda dengan wilayah kepulauan dan pegunungan, desa/kelurahan di wilayah pesisir memiliki pekerjaan yang lebih beragam. Seperti contoh Kec. Labakkang yang terletak di pesisir barat dan berbatasan dengan Kec. Ma'rang di sebelah utara, Kec. Bungoro di sebelah selatan dan timur, serta Kec. Liukang Tupabbiring di sebelah barat. Labakkang merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak (45,773 jiwa; 2015) selain ibukota kabupaten Pangkajene (44,490 jiwa; 2015) dan Bungoro (42,556 jiwa; 2015). Lokasinya yang terletak di wilayah pesisir serta berbatasan dengan wilayah ring 1 PT Semen Tonasa Tahap II-V di Kec. Bungoro memberikan magnet bagi penduduk untuk bermukim di wilayah tersebut.

Jika dilihat dari data terkait mata pencaharian penduduk berdasarkan BDT 2015, lebih dari setengah penduduk 20% terbawah yang tinggal di Kec. Labakkang bekerja di empat sektor dengan proporsi tertinggi yakni perikanan budidaya (21%), industri pengolahan (15%), bangunan/konstruksi (13%), dan perdagangan (11%). Beberapa hasil produksi perikanan budidaya di Labakkang adalah bandeng, udang windu, dan rumput laut. Dengan persentase tutupan lahan yang lebih dari 50%-nya digunakan sebagai lahan tambak, Labakkang menjadi salah satu kecamatan dengan produksi tambak terbesar di Pangkep selain Pangkajene dan Ma'rang. Keadaan ini menunjukkan pentingnya kualitas prasarana dan sarana pendukung budidaya tambak seperti jaringan jalan, air bersih, listrik, dan persampahan. Infrastruktur air dan jaringannya menjadi krusial sebab bencana alam seperti banjir dan kekeringan dapat menyebabkan gagal panen. Banjir biasanya terjadi karena dangkalnya sungai dan tidak adanya pengerukan lumpur. Sementara kekeringan terjadi karena sumber air yang diharapkan dari pengairan di Tabo-tabo atau Leang-lorong sudah dalam kapasitas yang minimum ketika musim kemarau.



**Gambar 48. Piramida, Pendidikan, dan Pekerjaan Penduduk 20% Terbawah Kec. Labakkang, 2015.**

Sumber: BDT 2015 (BPS/TNP2K), diolah.

Sementara itu, data terkait pendidikan untuk penduduk 20% terbawah yang tinggal di Kec. Labakkang menunjukkan bahwa sekitar 70%-nya tidak memiliki ijazah dan hanya sampai pada tingkat SD. Kondisi ini menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan penduduk miskin di wilayah pesisir seperti Labakkang. Beragamnya jenis pekerjaan dengan upah yang menjanjikan menyebabkan masyarakatnya secara umum tidak tertarik untuk melanjutkan sekolah. Meskipun demikian, ada dari mereka yang mampu mencapai tingkat SMP (15%), SMA (13%), dan hingga tingkat perguruan tinggi (1%).

Berdasarkan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan perwakilan salah satu desa/kelurahan di wilayah pesisir, yakni Desa Kanaungan, Kec. Labakkang, ada 3 klasifikasi kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut: kaya, sedang, dan miskin. Beberapa karakteristik yang membedakan ketiga kelompok masyarakat tersebut antara lain kondisi rumah, kepemilikan aset, tingkat pendidikan, penghasilan dan pekerjaan, luas lahan, pola makan, kesehatan, dan perilaku belanja.

Para peserta FGD menggambarkan masyarakat kurang sejahtera (miskin) dengan tinggal di rumah yang tidak layak huni. Biasanya berbentuk gubuk atau berdinding gamacca (pelepeh pisang/sagu), berlantai tanah, beratap seng, serta kondisi lain yang menggambarkan diperlukannya bedah rumah. Dibandingkan dengan masyarakat kaya dan sedang, masyarakat miskin umumnya tidak memiliki aset seperti kendaraan bermotor, handphone Android, hewan ternak, lahan, dan perhiasan seperti emas dan berlian. Rata-rata tingkat pendidikan mereka biasanya sampai tingkat SMP karena adanya program wajib belajar 9 tahun, namun ada juga yang mampu mencapai tingkat SMA. Jarang sekali



ada yang berlanjut hingga perguruan tinggi karena biasanya setelah selesai SMA, mereka sudah tidak memiliki biaya untuk melanjutkan kuliah. Dengan ijazah SMA mereka sudah dapat bekerja sebagai penjaga toko di Indomaret atau menjadi pegawai honorer di berbagai perusahaan (jika ada lowongan). Terkadang ada anak yang IQ-nya tinggi namun tidak memiliki biaya kuliah. Meskipun ada program bantuan biaya kuliah (gratis), namun mereka tetap terkendala dengan biaya pendukung seperti biaya transportasi.

Secara umum, masyarakat miskin di Desa Kanaungan tidak memiliki penghasilan yang tetap. Mereka biasanya bekerja sebagai tukang becak, buruh bangunan, atau tukang ojek yang memperoleh motor melalui sistem sewa dengan orang yang lebih kaya. Ada yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan dan ada pula yang bekerja sebagai pengupas jambu mete (biasanya dikerjakan oleh perempuan). Pola makan masyarakat miskin biasanya bergantung pada hasil tangkapan memancingnya atau hasil bantu-bantu keluarga untuk mendapatkan makanan.

**Tabel 11. Klasifikasi Kesejahteraan Masyarakat Desa Kanaungan, Kec. Labakkang.**

Ciri-ciri Kesejahteraan	Kelompok Kesejahteraan (Menurut Masyarakat)		
	Kaya	Sedang	Miskin
<b>Kondisi rumah</b>	Mempunyai rumah besar dan mewah	Mempunyai rumah kayu ukuran 5x7 m <sup>2</sup> → hasil diskusi mengatakan ada yang lebih besar dari itu	Rumah tidak layak huni
<b>Kepemilikan kendaraan</b>	Mempunyai kendaraan seperti mobil, motor	Memiliki aset misalnya motor harga 10 jutaan	Tidak memiliki kendaraan
<b>Kepemilikan alat telekomunikasi</b>	Memiliki HP Android yang 20 juta, emas, dan berlian	Punya HP Android standard harga di atas 1 juta	-
<b>Pendidikan</b>	Pendidikan S1	Pendidikan SMA, S1 (relatif) → tergantung anaknya	Pendidikan SMP, SMA, tidak ada yang lanjut PT
<b>Penghasilan</b>	Pendapatannya 5-10 juta per bulan	Penghasilan cukup 1 juta Rupiah	Tidak punya penghasilan tetap
<b>Pekerjaan</b>	Pekerjaannya rata-rata pengusaha tambak	Pekerjaan petani tambak, buruh tambak, tukang kayu, ASN	Biasanya bekerja jadi tukang becak, buruh bangunan, tukang ojek tapi motornya sewa (dikasih sama orang kaya). Ada yang sama sekali tidak punya pekerjaan. Pekerjaan perempuan kupas jambu mete
<b>Luas lahan</b>	Luas tambak dan sawah minimal 5 ha	Luas tanah 1-2 ha	Tidak punya lahan
<b>Pola makan</b>	Pola makan 3 kali sehari dengan menu yang beragam	Pola makan sederhana → ikan, ayam sekali-sekali, dan daging jika ke pesta	Pola makan seadanya apa yang ada biasa dari hasil memancing dan bantu-bantu keluarga untuk mendapatkan makan



Ciri-ciri Kesejahteraan	Kelompok Kesejahteraan (Menurut Masyarakat)		
	Kaya	Sedang	Miskin
<b>Kesehatan</b>	Berobat ke dokter praktik yang ada di Pangkep, Maros, atau Makassar. Tetapi ada juga yang berobat ke puskesmas dan memiliki BPJS kelas 1	Berobat ke puskesmas/pustu, sekali-sekali ke Kota Pangkajene dan memiliki kartu BPJS kelas 2	-
<b>Perilaku belanja</b>	Belanja barang kebutuhan sehari-hari (pelengkap dapur) di Pasar Pangkajene	Belanja pakaian di Pangkep (Pangkajene) tetapi untuk keperluan sehari-hari di pasar desa	-
<b>Ciri lain</b>	Sebagian memiliki ternak sapi, pada tahun 2018 beberapa orang memiliki bangunan untuk sarang burung walis dan kandang ayam	Punya emas 5 gram	-
<b>Persentase (2018)</b>	10%	67%	23%
<b>Persentase (2013)</b>	5%	56%	39%

Sumber: FGD Perwakilan Desa/Kelurahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2018.

Menurut peserta FGD, terjadi perubahan pada komposisi penduduk berdasarkan kelompok kesejahteraannya. Perkiraan persentase penduduk di kelompok kesejahteraan kaya dan sedang mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir (2013 ke 2018). Kenaikan ini menyebabkan penurunan di kelompok kesejahteraan miskin. Penurunan di kelompok kesejahteraan miskin dan kenaikan di kelompok kesejahteraan sedang terjadi karena sebagian dari mereka bekerja sebagai buruh tani di luar daerah seperti di Gorontalo. Karena berhasil, mereka akhirnya mampu untuk membuka lahan tani di daerah tersebut. Ada pula dari mereka yang berhasil menjadi pengusaha sukses karena perkembangan usaha ternaknya. Mereka bermitra dengan perusahaan ternak ayam untuk membangun kandang misalnya. Sementara untuk peningkatan di kelompok kaya, menurut peserta FGD, terjadi karena adanya peningkatan aset di luar daerah seperti perolehan hasil tani di 2018 setelah mereka membuka lahan baru di luar daerah pada 2013. Selain itu ada pula masyarakat yang berhasil karena peningkatan pada usaha ternak ayam dan usaha burung walis yang mulai berkembang di tahun 2018.

## IV. TINJUAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM

### 4.1 Kebijakan

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan pembangunan daerah Pangkep yang diidentifikasi pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkep 2016-2021. Berdasarkan *gap* antara kinerja pembangunan yang telah dicapai, kondisi saat RPJMD disusun dan apa yang ingin dicapai pada masa mendatang, maka diidentifikasi beberapa urusan terkait kemiskinan yang belum tercapai sesuai target di Pangkep.

**Tabel 12. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Kemiskinan Untuk Penentuan Prioritas Program pada RPJMD Pangkep 2016-2021**

Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang belum tercapai	Permasalahan	Faktor-faktor penentu keberhasilan
<b>Urusan penunjang:</b> Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurangnya lapangan kerja baru dan akses ke lapangan pekerjaan</li> <li>▪ Rendahnya tingkat keterampilan laki-laki maupun perempuan</li> <li>▪ Belum efektifnya kordinasi lintas sektor dan pelaku dalam penanggulangan kemiskinan</li> <li>▪ Kurang efektifnya penanganan sanitasi dan pemenuhan air bersih penduduk miskin khususnya di pulau.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan kewirausahaan dengan pengembangan komoditas unggulan daerah;</li> <li>• Percepatan penciptaan lapangan wirausaha baru</li> <li>• Peningkatan kordinasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor melalui penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan implementasi SKPD yang konsisten serta melibatkan civil society dan dunia usaha di dalamnya</li> </ul>
<b>Urusan penunjang:</b> Kemiskinan	Sebaran penduduk miskin pada wilayah - wilayah terpencil	Perbaikan akses infrastruktur, distribusi pangan
<b>Urusan fungsi lainnya:</b> Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.	Terlambatnya tambahan dana dicairkan karena dianggarkan pada anggaran perubahan	Perlu dianggarkan pada anggaran pokok

Sumber: RPJMD Pangkep 2016-2021

Salah satu tujuan pembangunan Pangkep sesuai RPJMD 2016-2021 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang ditempuh untuk pencapaian tujuan tersebut adalah penguatan kordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis multistakeholder dan partisipatif. Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) no 42 tahun 2010, koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat provinsi dalam rangka penanggulangan kemiskinan dilembagakan dalam wadah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi (TKPK Provinsi), sedangkan pada tingkat kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (TKPK Kabupaten/Kota). Berdasarkan peraturan tersebut, TKPK Provinsi memiliki tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi, sedangkan TKPK Kabupaten/Kota bertugas melakukan hal serupa di tingkat kabupaten/kota.

Tabel 13 memperlihatkan kebijakan umum dan program pembangunan daerah Pangkep pada isu kemiskinan melibatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

**Tabel 13. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Pangkep**

Sasaran	Kebijakan umum	Indikator kinerja	Program pembangunan daerah	Bidang urusan	Perangkat daerah
Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin	Penanggulangan kemiskinan secara terpadu	% peningkatan kualitas perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial	Program perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial	Penunjang	Bappeda
		% Peningkatan kesejahteraan fakir miskin	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial
		-% Jumlah rumah tangga miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan melalui BPJS. -%Jumlah Kunjungan Peserta Pasien BPJS - JKN	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		%Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Penunjang	Bappeda, Dinas Kesehatan
		% Mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta putra/putri Pangkep yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan	Program Bantuan Beasiswa	Pendidikan	Dinas Pendidikan, badan pengelola keuangan daerah

Sumber: RPJMD Pangkep 2016-2021

Pelaksanaan RPJMD setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari rencana kerja. Pada RKPD 2015 dinyatakan bahwa salah satu pencapaian pada 2014 adalah terselesaikannya penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan.

Baik pada RKPD 2016, 2017 maupun 2018, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah. Pada RKPD 2016 dan 2017, arah kebijakan prioritas penanggulangan kemiskinan yaitu:

- a) Mendorong pertumbuhan yang pro rakyat miskin.
- b) Meningkatkan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- c) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan.

Sedangkan pada RKPDP 2018, prioritas penanggulangan kemiskinan berupa penanggulangan kemiskinan secara terpadu yang melibatkan berbagai unsur *Sustainable Development Goals* (SDGs) terkait, yaitu pada bidang pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

**Tabel 14. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkep Tahun 2018  
Terkait Kemiskinan**

Prioritas Pembangunan Nasional	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas*	Sasaran Prioritas Pembangunan
Pendidikan	Pemerataan sarana/prasarana serta tenaga pendidik serta penguatan akses pendidikan tinggi masyarakat	Perbaikan akses dan kualitas pelayanan dan lulusan pendidikan	Penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan berbagai unsur SDGs terkait (bidang Pendidikan)	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan di desa pulau dan desa daratan
Kesehatan	Pemenuhan sarana/prasarana dan tenaga kesehatan khususnya di pulau-pulau serta melembagakan sistem jaminan kesehatan dalam masyarakat	Pengelolaan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	Penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan berbagai unsur SDGs terkait (bidang Kesehatan)	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan di desa pulau dan desa daratan
Perumahan dan pemukiman	Rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pembinaan sanitasi pada lingkungan perumahan kumuh khususnya di pesisir dan pulau-pulau secara terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan	1. Pemenuhan rumah layak huni dan pemukiman bersanitasi 2. Jangkauan layanan air bersih	Penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan berbagai unsur SDGs terkait (bidang air bersih dan sanitasi)	1. Terpenuhinya Infrastruktur perumahan dan pemukiman 2. Kebutuhan infrastruktur Penyediaan air bersih
Penanggulangan kemiskinan	Penguatan kordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis multistakeholder dan partisipatif	Penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan berbagai unsur SDGs terkait	1 Penanggulang an kemiskinan secara terpadu dengan berbagai unsur SDGs 2 Penanganan PMKS secara terpadu	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin dan penyandang PMKS

Sumber: RKPDP Pangkep 2018 (dirangkum peneliti).

Keterangan:\*hanya menampilkan prioritas penanggulangan kemiskinan

Indikasi kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan RKPDP tahun 2018 adalah:

- jumlah SKPD yang dikoordinasikan oleh TKPKD Pangkep untuk program penanggulangan kemiskinan;
- peningkatan kesejahteraan fakir miskin;
- peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan melalui BPJS;
- peningkatan jumlah kunjungan pasien BPJS-JKN
- bantuan beasiswa.

Sedangkan indikasi kegiatan penanganan PMKS secara terpadu berdasarkan RKPD tahun 2018 adalah:

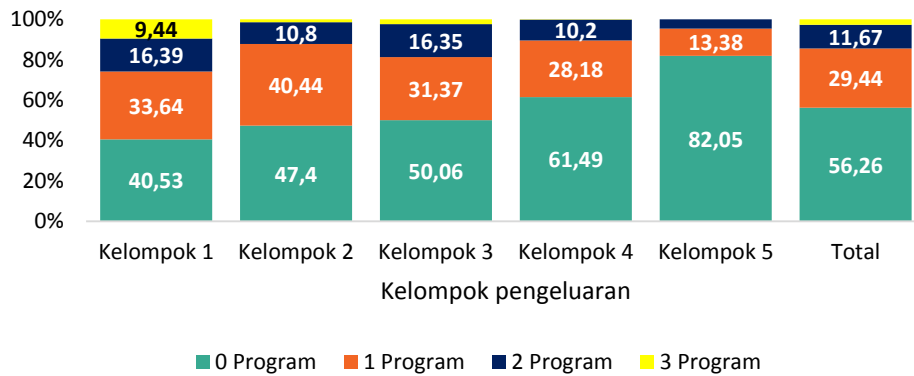
- a) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- b) Pembinaan Lansia dan Anak Terlantar
- c) pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
- d) Terpenuhinya kebutuhan ekonomi PMKS
- e) Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi
- f) penyandang disabilitas

## 4.2 Program

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak terkait, program penanggulangan kemiskinan dan atau peningkatan kesejahteraan di Pangkep terdiri dari program nasional atau dari Pemerintah pusat, program daerah baik provinsi maupun kabupaten, program dari lembaga donor yang dilaksanakan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan program pada skema tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR).

### 4.2.1 Program Nasional

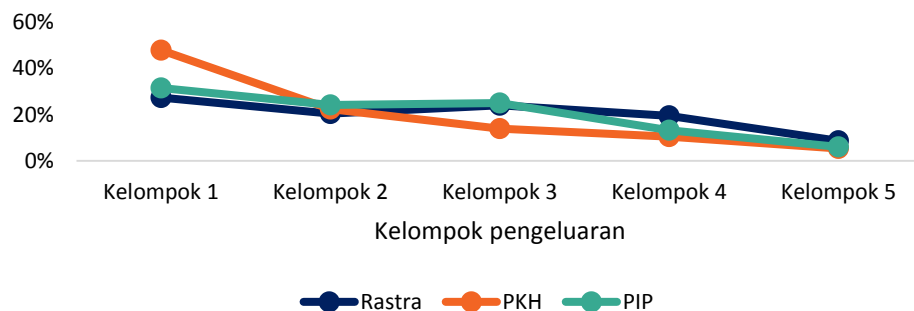
Program nasional berupa bantuan sosial (bansos) untuk pengentasan kemiskinan ditujukan untuk mengurangi pengeluaran pada kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan kualitas hidup, yaitu pada bidang pendidikan, kesehatan, konsumsi pangan (seperti PKH, PIP, Rastra, JKN-KIS) maupun peningkatan pendapatan rumah tangga miskin (seperti KUBE, UEP). Untuk mendalami kondisi bansos yang diterima rumah tangga miskin di kabupaten Pangkep dilakukan analisis terhadap sejumlah data yang dihasilkan dari survei Susenas tahun 2017 oleh BPS. Program bansos pada analisis ini dibatasi pada program Beras Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Level analisis yang digunakan adalah rumah tangga, sehingga setiap jawaban responden akan mewakili seluruh anggota rumah tangga di rumah tangga tersebut. Untuk kepemilikan PIP misalnya, suatu rumah tangga dikatakan menerima PIP apabila minimal terdapat salah satu anggota keluarga yang menerima program tersebut baik di jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, atau SMA/ sederajat. Pada analisis ini rumah tangga dibagi menjadi 5 kelompok besar menurut pengeluaran per kapita. Kelompok pertama adalah rumah tangga dengan pengeluaran per kapita paling sedikit. Kelompok ke dua adalah kelompok pengeluaran menengah kebawah. Kelompok ke tiga adalah kelompok pengeluaran menengah. Kelompok ke empat adalah kelompok dengan pengeluaran menengah keatas dan kelompok ke lima dengan pengeluaran tertinggi.



**Gambar 49. Integrasi Program Bantuan Sosial Menurut Kelompok Pengeluaran (2017)**

Sumber: Susenas BPS (data diolah)

Gambar 49 menyajikan integrasi program bantuan sosial menurut kelompok pengeluaran. Secara umum rumah tangga yang mendapatkan kombinasi dari tiga program bantuan sosial tersebut memiliki persentase paling sedikit di bandingkan kombinasi program lainnya di seluruh kelompok pengeluaran per kapita rumah tangga. Namun kombinasi tiga program yang diterima oleh rumah tangga ditemukan paling besar pada kelompok pengeluaran pertama. Hal ini tentu mengindikasikan hal yang baik dimana kelompok dengan pengeluaran terendah memperoleh persentase kombinasi tiga program paling tinggi. Namun demikian, terlihat bahwa pada kelompok pertama sekalipun terdapat 40.53% keluarga yang tidak menerima bantuan sosial apapun (0 Program). Gambar 50 juga memperlihatkan adanya beberapa keluarga di kelompok dua dan tiga yang masih mendapat kombinasi tiga program. Hal ini mengindikasikan adanya kesalahan target pada rumah tangga yang menerima program bansos. Gambar berikut lebih jelas memperlihatkan persoalan kesalahan target pada setiap program bansos.



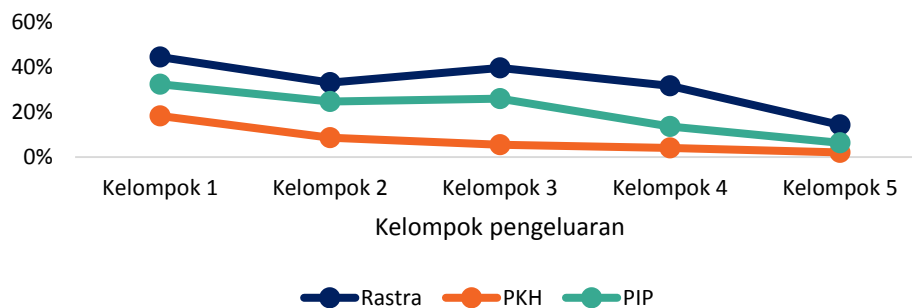
**Gambar 50. Distribusi Program Bantuan Sosial Menurut Kelompok Pengeluaran (2017)**

Sumber: Susenas BPS (data diolah)

Gambar 51 menjelaskan distribusi tiga program bansos (Rastra, PKH, PIP) pada lima kelompok pengeluaran rumah tangga. Persentase PKH di kelompok pertama adalah yang paling besar dibandingkan 2 program bansos lainnya. Persentase ini kemudian terus mengalami penurunan seiring dengan kenaikan pengeluaran kelompok rumah tangga. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pemberian program PKH sudah berada di jalur yang tepat, meskipun pada kenyataannya masih ada rumah tangga pada kelompok lima yang menerima bantuan PKH. Trend program ini lebih baik dibandingkan dengan dua program lainnya. Pada program Rastra dan PIP, persentase pada

kelompok pertama masih jauh dibawah PKH dan distribusinya justru mengalami peningkatan kembali di kelompok pengeluaran ketiga. Dari ketiga program ini, Rastra adalah program yang paling tinggi tingkat salah sarannya.

Temuan ini kemudian terkonfirmasi kembali dari Gambar 51 yang memperlihatkan cakupan penerima program bansos menurut kelompok pengeluaran. Gambar tersebut juga memperlihatkan peluang suatu keluarga mendapat program bantuan di suatu kelompok pengeluaran tertentu. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa peluang keluarga untuk mendapatkan bantuan Rastra dan PIP juga mengalami peningkatan di kelompok pengeluaran tiga, sama seperti gambar sebelumnya. Hal ini, berbeda dengan PKH yang persentase peluang penerimanya terus mengalami penurunan seiring dengan peningkatan kelompok pengeluaran rumah tangga. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa PKH memiliki persentase yang paling rendah dibandingkan Rastra dan PIP, hal ini disebabkan oleh cakupan KH yang memang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan dua program lainnya. Dalam hal cakupan, Rastra adalah program bantuan sosial dengan cakupan paling tinggi dibandingkan program bantuan sosial lainnya



**Gambar 51. Cakupan Program Bantuan Sosial Menurut Kelompok Pengeluaran (2017)**

Sumber: Susenas BPS (data diolah)

#### 4.2.2 Program Daerah

Dalam mencapai visi misi RPJMD Pangkep 2016-2021, terdapat rencana program prioritas yang meliputi program unggulan kepala daerah dan program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

##### a) Program Unggulan Kepala Daerah

Program unggulan kepala daerah ditetapkan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati Pangkep selama kampanye pemilihan kepala daerah dan menjadi prioritas pertama program pembangunan daerah tahun 2016-2021. Program unggulan tersebut meliputi;

- 1) Bantuan irigasi, kolam air, bibit, alat, mesin pertanian (alsintan), alat tangkap untuk petani dan nelayan;
- 2) Bantuan ketersediaan air bersih bagi masyarakat desa dan kelurahan;
- 3) Bantuan penerangan jalan umum desa/kelurahan;
- 4) Bantuan sarana dan prasarana kesehatan;
- 5) Bantuan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) mahasiswa perguruan tinggi;
- 6) Bantuan bedah rumah di desa / kelurahan;
- 7) Bantuan sarana dan prasarana olahraga di desa/kelurahan;

- 8) Bantuan keterampilan dan pelatihan kerja di desa/kelurahan;
- 9) Bantuan pasar desa, badan usaha milik desa (bumdes) dan permodalan;
- 10) Bantuan sarana ibadah dan keagamaan di desa;
- 11) Tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil dan insentif desa;
- 12) Percepatan sarana dan prasarana penerangan telekomunikasi, transportasi, air bersih, kelautan dan perikanan di pulau.

Dari 12 program unggulan daerah tersebut, program bantuan bedah rumah adalah satu-satunya program yang memanfaatkan Basis Data Terpadu (BDT) 2015 sebagai sumber verifikasi data bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program. Program ini merupakan program renovasi rumah bagi rumah tangga miskin yang rumahnya tidak layak huni dengan cara memberikan bahan material untuk renovasi rumah senilai Rp 10 juta dan uang untuk bantuan upah renovasi rumah sebesar Rp 1 juta untuk setiap KPM. Program telah dijalankan sejak 2016. Rata-rata jumlah KPM adalah 20 KPM per kecamatan. Mekanisme program adalah calon KPM yang hendak mengikuti program harus memasukan proposal ke Dinsos atas sepengetahuan kepala desa/lurah setempat. Saluran untuk memasukan proposal ke Dinsos dapat melalui calon KPM yang mengantarkan langsung proposal ke Dinsos, melalui pendamping PKH/KUBE/UEP, kepala desa/lurah dll. Dinsos melakukan verifikasi untuk memastikan keberadaan calon KPM yang bersangkutan dalam BDT dan melakukan kunjungan ke lokasi rumah calon KPM. KPM yang terpilih harus ada dalam BDT dan kondisi rumahnya tidak layak sehingga perlu dibantu. Calon KPM dikukuhkan melalui SK Bupati untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian jika pengajuan proposal oleh calon KPM dilakukan pada 2017, maka jika disetujui proses renovasi rumah akan dilaksanakan pada 2018. Penyediaan material bahan bangunan dilakukan oleh rekanan yang akan menyediakan material untuk KPM, sedangkan bantuan upah langsung diberikan oleh Dinsos kepada KPM. Pengawasan pembangunan dilakukan oleh Dinsos untuk memastikan proses renovasi dilakukan sampai selesai.

Pelaksanaan bedah rumah untuk rumah tangga miskin sejalan dengan salah satu strategi pada RJPMD 2016 yaitu rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pembinaan sanitasi pada lingkungan perumahan kumuh khususnya di pesisir dan pulau-pulau secara terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan. Program lainnya seperti bantuan SPP mahasiswa pada praktiknya tidak mensyaratkan status rumah tangga miskin sebagai penerima manfaat program, kendati pada RPJMD Pangkep 2016-2021, salah satu indikator kinerja peningkatan kualitas penduduk miskin adalah persentase mahasiswa yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan dan hal ini ditegaskan juga pada RKPMD 2018 bahwa penerimaan beasiswa adalah indikator pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan.

Program peningkatan infrastruktur seperti sarana dan prasarana kesehatan, olahraga, telekomunikasi, transportasi, keagamaan lebih ditujukan untuk peningkatan akses layanan publik bagi seluruh masyarakat tanpa memperhatikan kondisi kesejahteraannya. Pada aspek peningkatan kesejahteraan, program-program yang diselenggarakan berupa program hibah untuk peralatan usaha dan pelatihan ketrampilan kerja/usaha.

#### **b) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

Pada program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, berdasarkan RPJMD Pangkep 2016-2021, program penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan adalah program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penanggung jawabnya adalah dinas sosial dan OPD lain yang terkait. Indikator kinerjanya berupa penurunan persentase rasio angka kemiskinan. Angka kemiskinan pada awal



periode RPJMD (2015) sebesar 16,23% dan pada akhir periode RPJMD (2021) ditargetkan turun menjadi 10,3%. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan pada awal periode RPJMD (2015) adalah 84,7% dan pada akhir periode RPJMD (2021) ditargetkan meningkat menjadi 85,55%.

Beberapa OPD seperti dinas pertanian, dinas perikanan, dinas koperasi dan UMKM, dinas tenaga kerja telah menjalankan beberapa program untuk peningkatan kesejahteraan. Secara umum, program-program dari dinas tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. bantuan/hibah peralatan usaha seperti sarana produksi pertanian/peternakan/perikanan (pupuk, bibit/benih tanaman, alat tangkap, hewan ternak, mesin pengolah hasil pertanian dll).
- b. dana untuk modal usaha baik dalam bentuk hibah maupun pinjaman bergulir
- c. pendampingan pengembangan usaha, termasuk konsultasi usaha, bantuan pemasaran berupa menghubungkan wirausaha dengan konsumen, pengurusan perizinan dan sertifikasi usaha
- d. peningkatan kapasitas SDM (seperti pelatihan, sekolah lapang dll)
- e. kegiatan padat karya untuk pembangunan infrastruktur dengan menggunakan tenaga kerja dari masyarakat.
- f. bantuan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan kerja, antara pemberi kerja dengan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Program dari pemerintah daerah melalui OPD terkait yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan, umumnya mensyaratkan penerima manfaat program menjalankan mata pencaharian/usaha tertentu (seperti nelayan, petani, wirausahawan dll), kepemilikan sumber daya (seperti lahan, alat usaha dll) dan beberapa mensyaratkan tergabungnya penerima manfaat dalam kelompok misalnya kelompok tani, kelompok tani wanita, kelompok nelayan. Namun tidak ada penekanan khusus bahwa program ditujukan untuk kelompok miskin dengan kriteria kemiskinan tertentu. Beberapa program peningkatan kesejahteraan memang mensyaratkan penerima manfaat adalah petani kecil/nelayan kecil/wirausaha kecil. Pada kondisi ini memang ada peluang bahwa penerima manfaat adalah masyarakat miskin, meskipun bukan berarti yang paling miskin dalam masyarakat. Di sisi lain, terdapat keterbatasan waktu pelaksanaan program, adanya target program yang harus dipenuhi pada akhir tahun anggaran dan keterbatasan kemampuan pengelola program dalam menyediakan sumber daya program. Pada kondisi demikian, program peningkatan kesejahteraan akan lebih memungkinkan untuk berkembang jika dilaksanakan pada masyarakat yang setidaknya sudah memiliki sumber daya awal untuk berkembang dibandingkan pada masyarakat miskin atau paling miskin yang umumnya memiliki akses terbatas atau bahkan tidak memiliki aset penghidupan (SDM, ekonomi, sosial, fisik).

Meskipun tidak banyak, studi ini mencatat terdapat beberapa program/kegiatan daerah yang dilaksanakan oleh OPD Pangkep dan secara khusus ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan dan berfokus pada masyarakat miskin sebagai penerima manfaat program/kegiatan. Dinas sosial selain melaksanakan program bantuan bedah rumah dan menjadi kepanjangan tangan dari kementerian sosial dalam pelaksanaan bansos, pada 2018 juga sedang melaksanakan pemutakhiran data BDT tahun 2015. Mekanisme update BDT adalah sebagai berikut:

1. Dinsos meminta pihak desa/kelurahan untuk menyediakan SDM sebagai pendata di kelurahan/desa tersebut. Biasanya desa/kelurahan akan menunjuk kaur/staf bidang sosial ekonomi sebagai pendata. Dinsos memberikan setiap pendata sejumlah honor tertentu.
2. Pendataan rumah tangga miskin (RTM) dilakukan menggunakan kuesioner dari Kemensos. RTM yang sudah meninggal/pindah/tidak lagi miskin akan diusulkan untuk dikeluarkan dari BDT. Sebaliknya RTM yang belum ada di BDT akan diusulkan masuk BDT.

3. Keputusan akhir mengenai rumah tangga yang diusulkan untuk masuk/keluar dari BDT dilakukan melalui musyawarah desa/kelurahan.
4. Data hasil update pada tingkat desa/kelurahan direkap dan disampaikan kepada TKSK di tingkat kecamatan, selanjutnya direkap di tingkat kabupaten dan diinput pada sistem SIG-GIS yang terhubung ke Kementerian Sosial. Penentuan hasil update BDT sepenuhnya wewenang pusat. Sampai saat wawancara dilakukan (Oktober 2018) update BDT di Pangkep dilakukan terhadap sekitar 40 ribu nama.

Dinas statistik Pangkep berkoordinasi dengan Bappeda Pangkep juga melakukan pendataan kebutuhan pangan dan non pangan rumah tangga miskin kabupaten Pangkep tahun 2018. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan konsultasi dengan BPS Pangkep. Hasil pendataan akan dipergunakan sebagai basis data rumah tangga miskin di Pangkep, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan program pengentasan kemiskinan yang sesuai karakteristik rumah tangga miskin bersangkutan.

### **Kotak 1 Pendataan Kebutuhan Pangan Non Pangan Rumah Tangga Miskin Kabupaten Pangkep Tahun 2018**

Kegiatan pendataan dilakukan dalam bentuk survei rumah tangga terhadap rumah tangga miskin (RTM) sesuai basis data terpadu (BDT). Sebanyak 30% RTM pada BDT atau 13.813 RTM dari seluruh desa/kelurahan di Pangkep menjadi responden pada survei ini. Sebelum kegiatan survei dilakukan, terlebih dahulu dilakukan musyawarah desa/kelurahan yang melibatkan tokoh masyarakat dan disaksikan oleh kepala desa/kelurahan untuk menetapkan rumah tangga yang akan disurvei. Daftar rumah tangga hasil musyawarah kemudian diperiksa dan disahkan oleh kepala desa/lurah, selanjutnya disampaikan kepada dinas statistik Pangkep melalui camat setempat.

Survei rumah tangga ini menghasilkan informasi mengenai jumlah RTM yang membutuhkan (i) bantuan pangan; (ii) bantuan perumahan; (iii) bantuan bibit tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan alat tangkap perikanan; (iv) bantuan bibit alat/mesin/sarana produksi menengah kecil; (v) bantuan dalam bentuk program pelatihan/peningkatan ketrampilan

#### **4.2.3 Program Tanggung Jawab Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat**

Program dalam skema tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Pangkep berasal dari badan usaha milik negara maupun perusahaan swasta yang beroperasi di Pangkep. CSR adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan/lembaga terhadap masyarakat yang memperoleh dampak langsung/tidak langsung atas kegiatan operasional perusahaan/lembaga. Oleh karena itu prioritas pertama CSR adalah masyarakat yang paling berdekatan/berada pada lingkungan operasi perusahaan/lembaga atau disebut ring 1. Penyelenggaraan program CSR umumnya dilakukan dengan melibatkan dinas setempat sebagai pihak yang membantu melakukan sosialisasi kegiatan ke masyarakat, memberikan rekomendasi jenis kegiatan maupun kelompok masyarakat yang tepat untuk menjadi penerima manfaat, serta membantu masyarakat agar dapat memperoleh akses terhadap kegiatan CSR. Bentuk kegiatan CSR yang dilakukan di Pangkep misalnya adalah pemberian pinjaman modal bagi wirausaha kecil oleh Semen Tonasa. Pada kegiatan ini, dinas koperasi dan UMKM berperan dalam membantu sosialisasi program, membantu para penerima manfaat menyusun proposal usaha maupun memberikan rekomendasi kepada perusahaan yang bersangkutan terkait informasi kelompok masyarakat mana yang dapat menjadi penerima manfaat CSR. Rekomendasi ini terutama bagi masyarakat yang berada di luar ring 1 atau yang tidak berdekatan langsung dengan perusahaan. Sedangkan bagi masyarakat pada ring 1, langsung ditangani oleh semen Tonasa. Kegiatan CSR lainnya misalnya berupa pengembangan budidaya

tambak oleh CSR Bank Indonesia di Bontolangkasa kecamatan Minasate'ne dengan melibatkan dinas perikanan.

Beberapa LSM menjalankan kerjanya di Pangkep pada beberapa bidang terutama layanan dasar. Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia – Indonesia (KOMPAK), misalnya, berupaya membantu pemerintah daerah Pangkep meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan identitas hukum). Pada aspek peningkatan SDM, KOMPAK berupaya meningkatkan kapasitas aparat kecamatan dan desa melalui pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) serta penguatan bagi kelompok disabilitas dan kelompok perempuan. Pada aspek ekonomi, KOMPAK menjalankan program institut ekonomi desa dengan kegiatan berupa pengembangan dan pendampingan badan usaha milik desa (Bumdes). Pada aspek kebijakan dan regulasi, KOMPAK mengambil peran dalam fasilitasi dan dukungan terhadap pengembangan dan revisi berbagai peraturan (Peraturan Bupati dan SK Bupati) terkait dengan (KOMPAK, 2017):

- a. Peraturan Bupati tentang perencanaan pembangunan desa;
- b. Peraturan Bupati tentang penguatan tatakelola desa (pengelolaan keuangan, kewenangan desa, pengadaan barang dan jasa di desa, harga satuan desa, Sistem Informasi Desa, Bumdes dan teknologi tepat guna, percepatan pembangunan kawasan perdesaan);
- c. Rancangan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif; dan
- d. Rancangan Perda mengenai BPD.

'Aisyiyah di merupakan LSM yang bekerja khusus bagi perempuan, termasuk perempuan miskin. Program Aisyiyah yang menonjol di Pangkep adalah bidang kesehatan reproduksi. 'Aisyiyah bermitra dengan program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU)<sup>4</sup> menyediakan layanan pemeriksaan papsmear dan inspeksi visual asam asetat (IVA) secara gratis dan rutin. 'Aisyiyah berupaya agar layanan tersebut dapat lebih mudah diakses perempuan dengan menyediakan layanan hingga pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) atau Puskesmas pembantu (Pustu) terdekat<sup>5</sup>. Kegiatan lainnya adalah penambahan dokter obgyn, pendampingan penderita kanker serviks dan payudara, layanan umpan balik di Puskesmas yaitu meminta saran dan masukan dari pengunjung Puskesmas via aplikasi android. Layanan umpan balik ini sedang diujicobakan pada beberapa puskesmas di daratan dan pulau di Pangkep untuk mendapat masukan terkait kualitas dan layanan faskes dan nakes. Selain itu 'Aisyiyah juga terlibat dalam upaya memberikan edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan<sup>6</sup>.

Para perempuan yang dibina Aisyiyah tergabung dalam kelompok Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA) yang mulai dikembangkan sejak pertengahan 2014 dengan pendanaan program MAMPU. Wilayah dampingan Aisyiyah Pangkep pada periode 2014-2016 sebanyak 2 desa, 4 kelurahan. Sejak 2018 bertambah 1 desa. Aisyiyah juga melakukan perluasan kelompok BSA secara swadaya yaitu tanpa pendanaan MAMPU misalnya di Labakkang, Mattoanging, Minasatene. Pada kelompok BSA

---

<sup>44</sup>Program MAMPU adalah bentuk kemitraan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. MAMPU memfokuskan intervensi pada perempuan miskin dan organisasi perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan miskin.

<sup>5</sup>Informasi lebih lengkap mengenai program 'Aisyiyah pada layanan kesehatan reproduksi perempuan miskin dapat dilihat pada: Widyaningsih, Dyan, dan Elza Samantha Elmira (2018) 'Tema 4: Meningkatkan Status Kesehatan dan Gizi Perempuan.' Laporan tematik Studi *Midline* MAMPU. Jakarta: The SMERU Research Institute.

<sup>6</sup>Informasi lebih lengkap mengenai program 'Aisyiyah pada pengurangan kekerasan terhadap perempuan miskin dapat dilihat pada: Tamyis, Ana Rosidha, Niken Kusumawardhani, dan Fatin Nuha Astini (2018) 'Tema 5: Pengurangan Kekerasan terhadap Perempuan.' Laporan tematik Studi *Midline* MAMPU. Jakarta: The SMERU Research Institute.

terdapat berbagai kegiatan seperti kegiatan keagamaan, penyuluhan kesehatan reproduksi perempuan, penanganan kekerasan terhadap perempuan dll termasuk pemberdayaan ekonomi.

Anggota BSA yang memiliki minat pada pengembangan kewirausahaan dan peningkatan kesejahteraan dapat bergabung pada program Usaha Ekonomi Keluarga 'Aisyiyah (BUEKA). BUEKA mulai terbentuk sejak 2015. Sampai saat ini telah terbentuk 33 kelompok BSA, dan sekitar 6 kelompok BUEKA. Dalam struktur organisasi, BSA ada di bawah ranting (pimpinan setingkat desa), sedangkan BUEKA ada di kampung-kampung. Melalui BUEKA, para perempuan diikuti dalam pelatihan ketrampilan, memfasilitasi pemasaran, memfasilitasi permodalan, dll, termasuk mengurus izin pangan industri rumah tangga (PIRT). BUEKA dikhususkan bagi perempuan usia produktif. Peserta BUEKA diberikan keleluasaan untuk menentukan apakah akan menjalankan usaha individu atau berkelompok dan memilih jenis usaha yang dijalankan. Dalam menjalankan programnya, Aisyiyah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk OPD seperti dinas koperasi dan UMKM, dinas kesehatan, maupun swasta. Kerjasama yang sudah terjalin misalnya memfasilitasi anggota BUEKA agar mendapat bantuan modal usaha melalui skema CSR Tonasa, kerjasama dengan dinas ketahanan pangan untuk pelatihan pembuatan olahan ikan (nugget), kerjasama pelatihan kerja dengan Dinas Tenaga Kerja dll.

### 4.3 Tantangan Program

Berdasarkan wawancara dan diskusi dengan OPD dan LSM, studi ini mengidentifikasi beberapa tantangan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan secara khusus maupun program peningkatan kesejahteraan secara umum. Kendala tersebut antara lain:

1. Keterbatasan anggaran program

Keterbatasan anggaran menjadi kendala klasik sehingga program terkait penanggulangan kemiskinan maupun peningkatan kesejahteraan 'terpaksa' dilaksanakan dalam skala yang terbatas, ataupun kurang memenuhi standar yang ditetapkan. Misalnya pada pemutakhiran BDT yang idealnya dilaksanakan 2x setiap tahun. Mengingat keterbatasan dana, Dinsos Pangkep baru melaksanakan 1x saja. Keterbatasan dana juga menjadi kendala pada soal teknis, misalnya ketiadaan dana untuk memperbanyak kuesioner dan keterbatasan pendata pada tingkat desa/kelurahan. Oleh karena itu desa/kelurahan diharapkan menyediakan dana sendiri untuk pencetakan kuesioner dan meminta pemerintah desa/kelurahan menyediakan pendata dari desa/kelurahan setempat. Keterbatasan pendanaan juga diakui dinas sosial menjadikan supervisi terhadap program hanya bisa dilakukan secara terbatas dan kadang mengandalkan evaluasi program dari pusat. Keterbatasan dana pada pelaksanaan program juga dialami dinas koperasi dan UMKM. Misalnya saja keterbatasan dana pada sertifikasi halal (Rp 20 juta) menjadikan dinas hanya dapat memfasilitasi tiga UMKM pada tahun 2018.

2. Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia untuk pelaksanaan program

Terbatasnya jumlah sumber daya manusia diakui berbagai pihak menjadi kendala program penanggulangan kemiskinan di Pangkep. Program-program bantuan pada dinas pertanian dan dinas perikanan, misalnya, tidak selalu disertai dengan pendampingan kepada penerima manfaat program. Ketiadaan alokasi anggaran program untuk pendampingan dan keterbatasan staf yang dimiliki dinas menjadi alasan mengapa kegiatan pendampingan tidak tersedia atau tersedia dalam kondisi yang terbatas. Hal serupa juga terjadi pada Dinas Koperasi dan UMKM Pangkep. Jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Pangkep sekitar 34 ribu, sedangkan koperasi ada sekitar 300 unit. Jumlah SDM yang tersedia pada dinas koperasi dan UMKM hanya sekitar 20 orang. SDM pada dinas tersebut selain melaksanakan tugas

birokrasi juga diharuskan melaksanakan tugas pembinaan kepada pelaku UMKM. Meskipun setiap tahun selalu ada pelaku UMKM yang dibina, namun jumlahnya masih jauh lebih kecil dibandingkan jumlah pelaku UMKM yang ada. Keterbatasan SDM juga menjadi kendala pada pemutakhiran BDT yang dijalankan dinas sosial. Idealnya pendataan dilakukan oleh pihak yang objektif/netral. Namun keterbatasan SDM (dan juga anggaran) menjadikan pihak dinsos meminta pihak desa/kelurahan yang menyediakan SDM pendata untuk tingkat desa/kelurahan setempat. Kondisi ini menjadikan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang ditunjuk sebagai pendata tersebut tidak bersikap netral ketika mendata masyarakat di desa/kelurahannya pada lingkungan tempat tinggalnya.

3. Belum memadainya data terpadu kemiskinan yang dapat diakses dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Salah satu kritik pada pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan termasuk di Pangkep adalah program yang salah sasaran. Ini tidak terlepas dari keterbatasan pemutakhiran data, sementara disisi lain kondisi masyarakat senantiasa berubah. Ketidakterediaan data yang mumpuni juga mengakibatkan tidak tepatnya jenis bantuan yang diberikan. Hasil FGD dengan perwakilan masyarakat mengungkapkan, ketiadaan pemetaan kebutuhan penerima manfaat program, seringkali menjadikan bantuan alat usaha yang diterima masyarakat tidak sesuai kebutuhan dan justru bantuan yang sebenarnya mereka perlukan tidak tersedia. Akibatnya alat usaha kadang terbengkalai atau justru dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Pada saat pengumpulan data bagi kajian ini sedang dilakukan, pemerintah Pangkep sedang melakukan pemutakhiran BDT dan survei kebutuhan pangan dan non pangan bagi 30% rumah tangga miskin pada BDT. Kedua kegiatan ini menjadi awal yang baik bagi penyediaan data terpadu kemiskinan yang memadai bagi program penanggulangan kemiskinan

4. Belum adanya regulasi afirmatif yang mengatur mengenai upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten Pangkep.

Pengentasan kemiskinan telah menjadi persoalan yang menjadi perhatian pada RPJMD Kabupaten Pangkep 2016-2021 yang kemudian dijabarkan dalam RKPD setiap tahun. Namun demikian, pada tahap pelaksanaan program nampak bahwa program peningkatan kesejahteraan yang dilaksanakan pemerintah daerah belum memberi perhatian yang memadai pada program peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin. Hal ini tidak terlepas dari belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur mengenai bagaimana seharusnya upaya penanggulangan kemiskinan di laksanakan di Pangkep. Belum ada tata aturan yang jelas mengenai hal-hal seperti asas, tujuan, ruang lingkup dan strategi penanggulangan kemiskinan, maupun indikator dan data kemiskinan yang digunakan pada tingkat daerah. Belum adanya regulasi yang jelas ini menjadikan, upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan belum dilaksanakan secara terarah, konsisten dan efisien.

5. Pola pikir masyarakat dan pelaksana program yang menghambat program penanggulangan kemiskinan.

Hasil FGD dengan perwakilan masyarakat dan juga LSM mengungkapkan bahwa pola pikir masyarakat adalah salah satu kendala dalam pelaksanaan program. Pola pikir masyarakat yang dimaksud adalah sikap yang selalu meminta didampingi, kurang inisiatif, mudah menyerah, mengandalkan bantuan. Disisi lain, terdapat kritikan bahwa pelaksana program kadang menjalankan kegiatan sebatas menghabiskan anggaran, menyelesaikan laporan administratif, bahkan memilih lokasi/penerima manfaat berdasar pertimbangan politis. Kendala lain adalah masih adanya cara pandang dari sisi pengambil kebijakan bahwa program pemberdayaan dianggap kurang memberikan manfaat langsung dibandingkan program hibah. Ini tidak terlepas dari kondisi bahwa program pemberdayaan lebih kepada

memberikan dampak jangka panjang pada penerima manfaat namun memerlukan kegiatan yang lebih intensif, serta sumber daya baik waktu, tenaga maupun biaya yang besar. Sebaliknya program hibah relatif tidak memerlukan kegiatan yang intensif dan manfaatnya langsung dapat dirasakan seketika.

6. Kendala geografis

Kondisi geografis kabupaten Pangkep berupa kepulauan dengan biaya transportasi yang tidak murah dan kesulitan jarak serta waktu tempuh menjadikan masyarakat kepulauan kadang kurang dapat mengakses berbagai program yang disediakan dinas terkait. Kendati telah ada beberapa program dari dinas setempat maupun LSM yang berupaya menjangkau masyarakat pada wilayah kepulauan, namun belum semua masyarakat telah terlayani. Sebagai bagian dari solusi, ada kecamatan pada kepulauan yang mendirikan kantor penghubung pada kota kabupaten. Ini untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat kepulauan dengan para pemangku kepentingan di kabupaten.

## V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

### 5.1 Kesimpulan

Secara umum, hasil kajian ini memperlihatkan beratnya tantangan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Pangkep. Kemiskinan di kabupaten ini sangat dipengaruhi oleh:

1. Ketidaksesuaian (*mismatch*) antara sumber utama pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada industri pengolahan, khususnya semen, dengan sumber penghidupan mayoritas penduduknya yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan;
2. Banyaknya hasil produksi yang mengalir keluar daerah (kabupaten), sehingga peningkatan PDRB tidak dinikmati penduduk lokal;
3. Rendahnya tingkat pendidikan mayoritas penduduk, khususnya penduduk miskin dan rentan, sehingga mereka tidak dapat bekerja di sektor industri dan jasa yang tumbuh sejalan dengan pertumbuhan industri semen, dan tidak mampu bersaing untuk mendapat pekerjaan di Makassar –yang menjadi tujuan utama pencari kerja;
4. Pendapatan kebanyakan penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan cenderung menurun karena penurunan kualitas lingkungan –yaitu kerusakan terumbu karang yang diikuti penurunan hasil tangkapan ikan, munculnya banyak penyakit yang menyebabkan kematian ikan/udang di tambak atau gagal panen di pertanian, kekeringan atau banjir di lahan pertanian;
5. Terbatasnya lapangan kerja dan rendahnya daya saing angkatan kerja muda, yang mengakibatkan naiknya tingkat pengangguran pemuda terpelajar. Sementara itu, sebagian penduduk yang bekerja di industri semen memasuki masa pensiun sehingga kesejahteraannya menurun, namun tenaga kerja mudanya justru tidak menggantikan posisi mereka;
6. Rendahnya partisipasi ekonomi perempuan, dan meskipun terjadi peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan, kebanyakan dari mereka terserap di pekerjaan informal yang tidak tetap dan produktivitasnya rendah.

Jika ditelusuri, kondisi kemiskinan ini berakar dari kualifikasi sumberdaya manusia yang mayoritas berpendidikan rendah. Dalam kaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan ini, ketersediaan sarana dan akses ke fasilitas pendidikan bukan merupakan satu-satunya penyebab. Banyak permasalahan lain yang menjadi penyebab, seperti masalah pekerja anak, perkawinan anak, dan rendahnya motivasi untuk melanjutkan sekolah.

Dari sisi sebaran geografis kemiskinan, terlihat adanya variasi persoalan dan karakteristik matapencaharian penduduk miskin dan rentan; dan secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga tipologi: kepulauan, pesisir, dan pegunungan. Walaupun demikian, permasalahan terkait faktor yang memengaruhi kemiskinan di atas ditemukan di ketiga tipologi tersebut –meskipun tingkat keparahan masing-masing faktor berbeda-beda. Secara umum, permasalahan aksesibilitas paling memengaruhi kemiskinan di di daerah kepulauan, sehingga tingkat kemiskinan di kepulauan relatif lebih tinggi. Namun, karena sebagian besar penduduk Pangkep tinggal di daerah pesisir, konsentrasi penduduk miskin terbanyak juga berada di daerah pesisir.

Penanggulangan kemiskinan ini telah menjadi salah satu agenda pembangunan di Kabupaten Pangkep. Berbagai program di sektor terkait –termasuk pendidikan, kesehatan, pertanian dan



perikanan, bantuan sosial, koperasi dan UKM, dan ketenagakerjaan telah dilakukan untuk ikut mengurangi kemiskinan. Namun masih terkendala kurangnya koordinasi, keterpaduan target, terbatasnya cakupan dan sumber daya program, termasuk belum adanya regulasi yang memadai untuk penanggulangan kemiskinan. Selain program penanggulangan kemiskinan yang bersifat langsung, Pangkep juga sedang melakukan pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) serta survei kebutuhan pangan dan non pangan rumah tangga miskin pada 30% rumah tangga sesuai BDT. Upaya ini dapat menjadi landasan bagi perbaikan koordinasi dan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan.

## 5.2 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis di atas, terlihat bahwa kemiskinan di Pangkep merupakan masalah kronis yang membutuhkan upaya jangka panjang untuk mengatasinya. Walaupun demikian, bisa dilakukan upaya-upaya jangka pendek dan terobosan untuk mengurangi kemiskinan dalam jangka pendek dan menengah.

Dalam jangka panjang, upaya peningkatan sumberdaya manusia, khususnya peningkatan lama sekolah dan kualitas pendidikan dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja –baik laki-laki maupun perempuan- akan menjadi kunci pengurangan kemiskinan. Sebagaimana dikemukakan di atas, persoalan ini tidak akan dapat diatasi hanya dengan peningkatan akses ke fasilitas pendidikan dan penurunan biaya pendidikan. Hambatan-hambatan sosial-budaya, termasuk pernikahan anak atau usia dini, pekerja anak, dan rendahnya motivasi belajar perlu mendapat perhatian dan penanganan secara lebih serius. Dalam kaitan ini, program pendidikan gratis di sekolah dasar dan program beasiswa untuk perguruan tinggi perlu dipadukan dan disempurnakan mekanismenya agar mampu meningkatkan motivasi belajar hingga sekolah lanjutan dan perguruan tinggi. Mekanisme pemberian beasiswa untuk perguruan tinggi yang berjalan selama ini, masih kurang mampu memberi kepastian pembiayaan karena diberikan setelah masuk perguruan tinggi dan diberikan tanpa ada prioritas sesuai kondisi ekonomi calon penerima beasiswa. Skema semacam Kartu Indonesia Pintar, yang memberikan jaminan pendidikan gratis dan beasiswa hingga perguruan tinggi bagi anak dari keluarga miskin, misalnya, dapat menjadi salah satu alternatif kebijakan.

Dalam jangka panjang dan jangka menengah juga perlu diperhatikan dan dijaga kualitas lingkungan hidup, agar kesinambungan matapencaharian, khususnya di sektor pertanian dan perikanan secara luas, dapat terus dijaga. Sementara itu, perlu dilakukan upaya untuk menciptakan lapangan kerja baru dan sebisa mungkin meningkatkan aktivitas perekonomian daerah agar peredaran uang tidak keluar ke daerah lain. Selain itu diperlukan adanya regulasi afirmatif dalam kerangka penanggulangan kemiskinan untuk memastikan upaya pengentasan kemiskinan menjadi fokus pemerintah daerah serta berbagai pihak terkait di Pangkep. Keberadaan regulasi ini juga untuk mendukung agar penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan pendekatan yang lebih terarah. Hal ini dimungkinkan karena keberadaan regulasi penanggulangan kemiskinan yang afirmatif akan menyediakan tata aturan yang jelas dan memadai, antara lain meliputi dalam hal asas, tujuan, ruang lingkup dan strategi penanggulangan kemiskinan, maupun indikator dan data kemiskinan yang digunakan pada tingkat daerah oleh berbagai pihak terkait.

Dalam jangka menengah dan pendek, diperlukan keterpaduan program bantuan sosial dan program peningkatan pendapatan agar mampu meningkatkan pendapatan penduduk miskin secara signifikan. Diantara langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah:

1. Adanya BDT dapat dijadikan acuan penetapan target rumah tangga sasaran. Namun perlu dipastikan dan dialokasikan sumberdaya yang cukup untuk melakukan pembaruan data untuk mengurangi kesalahan penargetan.



2. Hasil survai pendataan kebutuhan rumah tangga miskin, yang telah dilakukan pada pertengahan 2018, juga dapat dijadikan acuan dalam penetapan bantuan sosial dan program peningkatan pendapatan. Namun perlu disadari bahwa pemberian modal atau aset usaha saja tidak menjamin bahwa usaha yang dilakukan akan berkelanjutan dan mampu meningkatkan pendapatan secara signifikan. Dalam hal ini, diperlukan program-program pendampingan masyarakat untuk membantu meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pengembangan usaha. Pendampingan ini bisa dilakukan oleh dinas terkait atau oleh lembaga-lembaga nonpemerintah
3. Pengembangan penghidupan penduduk miskin –perempuan dan laki-laki- melalui peningkatan lapangan kerja juga bisa dikaitkan dengan program pengembangan produk-produk unggulan, yang bersifat lokal spesifik. Dalam hal ini, perlu dipastikan bahwa penduduk miskin, dengan kualifikasi yang mereka miliki, dapat terserap pada kesempatan kerja yang diciptakan. Untuk menjamin ini, perencanaan perlu dilakukan secara partisipatoris dengan melibatkan penduduk miskin dan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kualifikasi penduduk miskin setempat.

## DAFTAR ACUAN

- BPS Kabupaten Pangkep . Konsep/Penjelasan Teknis Tenaga Kerja [dalam jaringan] <https://pangkepkab.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab1> [dalam jaringan 27 Oktober 2018]
- BPS Kabupaten Pangkep (2018). Kabupaten Pangkep Dalam Angka 2018. Pangkajene. BPS Pangkep
- BPS Kabupaten Pangkep (2018). Produk Domestik Bruti (PDRB) [dalam jaringan] <https://pangkepkab.bps.go.id/subject/155/produk-domestik-regional-bruto.html#subjekViewTab3> [27 Oktober 2018]
- Direktorat Analisis dan Pembangunan Statistik –BPS. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) [dalam jaringan] <https://ipm.bps.go.id/data/nasional> [27 Oktober 2018]
- IPDS-BPS Provinsi Sulawesi Selatan (2013). Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2013. Makassar. BPS Provinsi Sulawesi Selatan
- IPDS-BPS Provinsi Sulawesi Selatan (2014). Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2014. Makassar. BPS Provinsi Sulawesi Selatan
- IPDS-BPS Provinsi Sulawesi Selatan (2015). Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2015. Makassar. BPS Provinsi Sulawesi Selatan
- IPDS-BPS Provinsi Sulawesi Selatan (2016). Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2016. Makassar. BPS Provinsi Sulawesi Selatan
- IPDS-BPS Provinsi Sulawesi Selatan (2017). Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2017. Makassar. BPS Provinsi Sulawesi Selatan
- IPDS-BPS Provinsi Sulawesi Selatan (2018). Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2018. Makassar. BPS Provinsi Sulawesi Selatan
- Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2021.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Sirusa BPS (2018). Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak. [dalam jaringan] <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=478> [27 Oktober 2018]

Sirusa BPS (2018). Rasio Jenis Kelamin. [dalam jaringan] <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=87> [27 Oktober 2018]

Sirusa BPS (2018). Rasio Ketergantungan. [dalam jaringan] <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=95> [27 Oktober 2018]

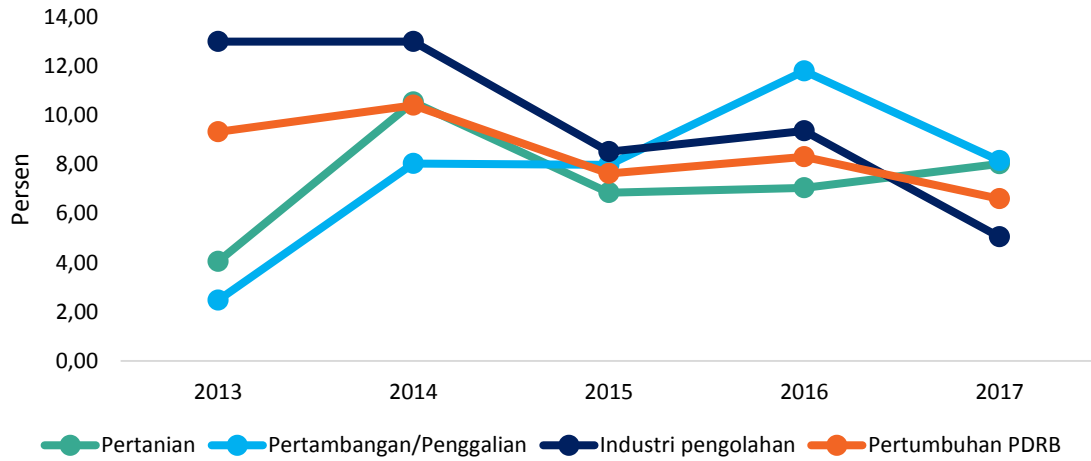
Sirusa BPS (2018). Sanitasi Layak. [dalam jaringan] <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=variabel/view&id=15701> [27 Oktober 2018]

Suryahadi, Kusumawardhani, Izzati (2018), Effectiveness of Social Assistance Programs in Indonesia, Jakarta. SMERU Research Institute Working Paper

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1

Gambar A1. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pangkep Menurut Lapangan Usaha



Sumber: BPS (data diolah)

## LAMPIRAN 2

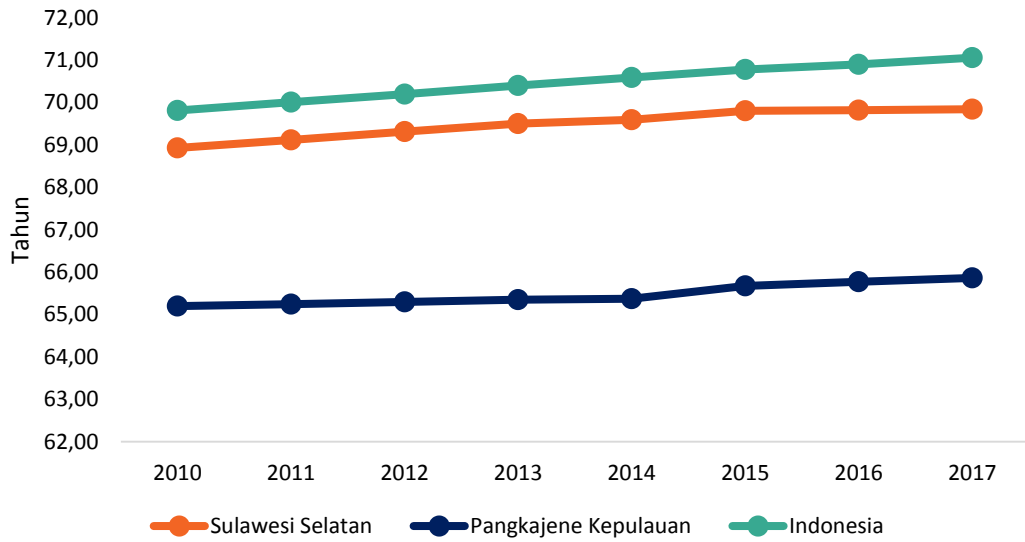
**Tabel A1. Rata-rata PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota (2013- 2017)**

Kabupaten/Kota	Rata-rata Pertumbuhan PDRB 2013-2017	Rata- rata PDRB 2013-2017 (Miliar Rupiah)	Rata-rata PDRB Per Kapita 2013-2017 (Rupiah Per Tahun)
<b>Kabupaten</b>			
1. Kep.Selayar	8.19	2728.99	21104843.68
2. Bulukumba	7.16	6809.85	16665307.53
3. Bantaeng	7.74	4094.57	22441920.17
4. Jeneponto	7.56	5150.50	14555159.34
5. Takalar	8.80	4960.71	17388977.20
6. Gowa	7.65	10460.04	14540210.26
7. Sinjai	7.34	5435.29	22969261.05
8. Maros	7.18	11073.47	32807400.11
9. Pangkep	8.46	13383.71	41562203.68
10. Barru	6.82	3694.39	21739451.28
11. Bone	8.32	16159.75	21826126.10
12. Soppeng	7.16	5227.61	23243052.56
13. Wajo	6.77	10926.91	27900848.60
14. Sidrap	7.77	6649.42	23080369.92
15. Pinrang	7.80	9700.04	26569038.48
16. Enrekang	6.65	3655.20	18386241.64
17. Luwu	7.72	7466.25	21419351.37
18. Tana Toraja	7.16	3443.69	15114442.29
19. Luwu Utara	7.60	6156.06	20414151.70
20. Luwu Timur	5.19	14264.81	52130845.09
21. Toraja Utara	8.29	3812.21	16976717.04
<b>Kota</b>			
1. Makassar	7.92	89629.03	62019824.57
2. Pare Pare	6.88	3871.25	28096934.21
3. Palopo	7.15	4165.64	24756857.88
<b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>	<b>7.39</b>	<b>252919.37</b>	<b>29818980.46</b>

Sumber: BPS (data diolah)

### LAMPIRAN 3

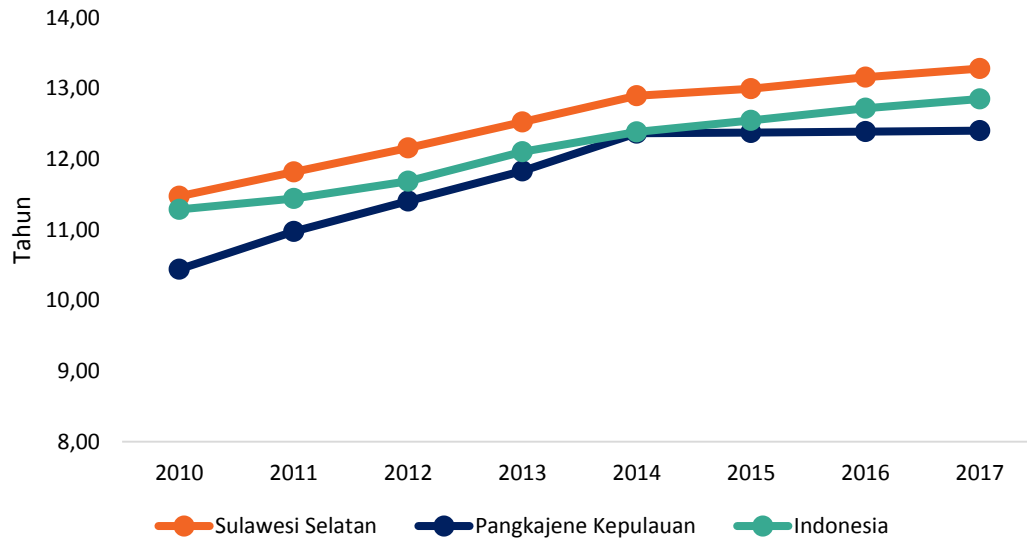
Gambar A2. IPM (Angka Harapan Hidup)



Sumber: BPS

## LAMPIRAN 4

Gambar A3. IPM (Harapan Lama Sekolah)

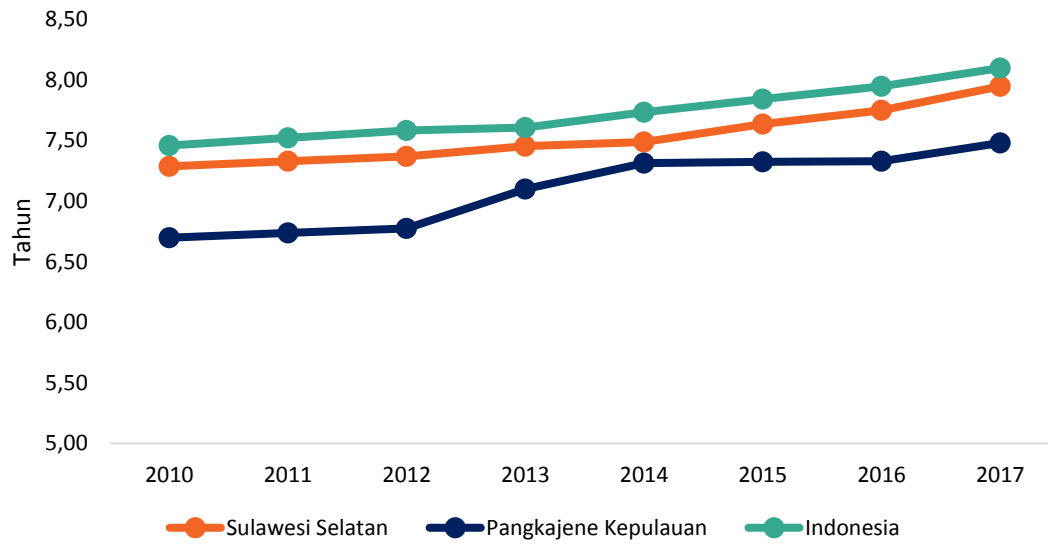


Sumber: BPS



## LAMPIRAN 5

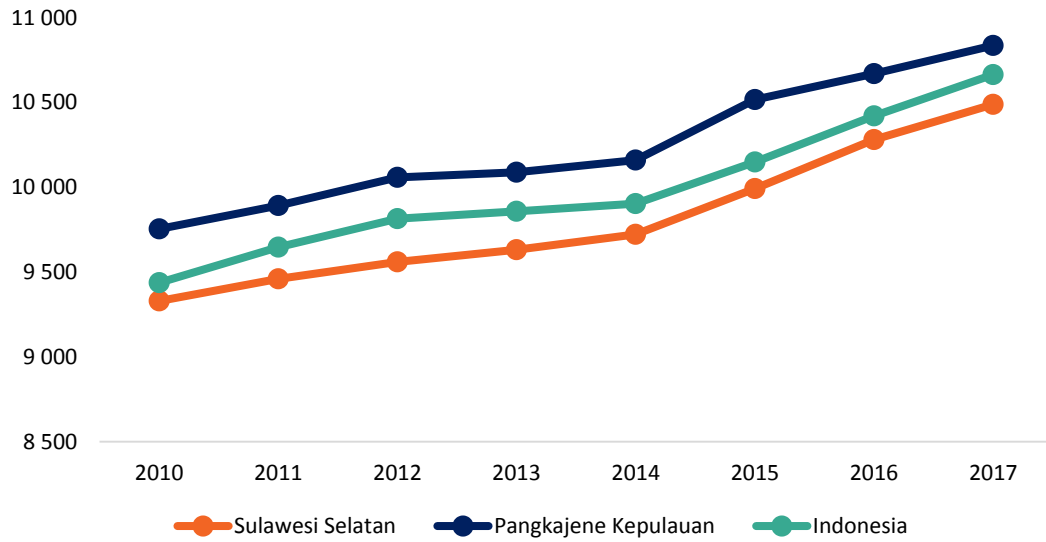
Gambar A 1. IPM (Rata-rata Lama Sekolah)



Sumber: BPS

## LAMPIRAN 6

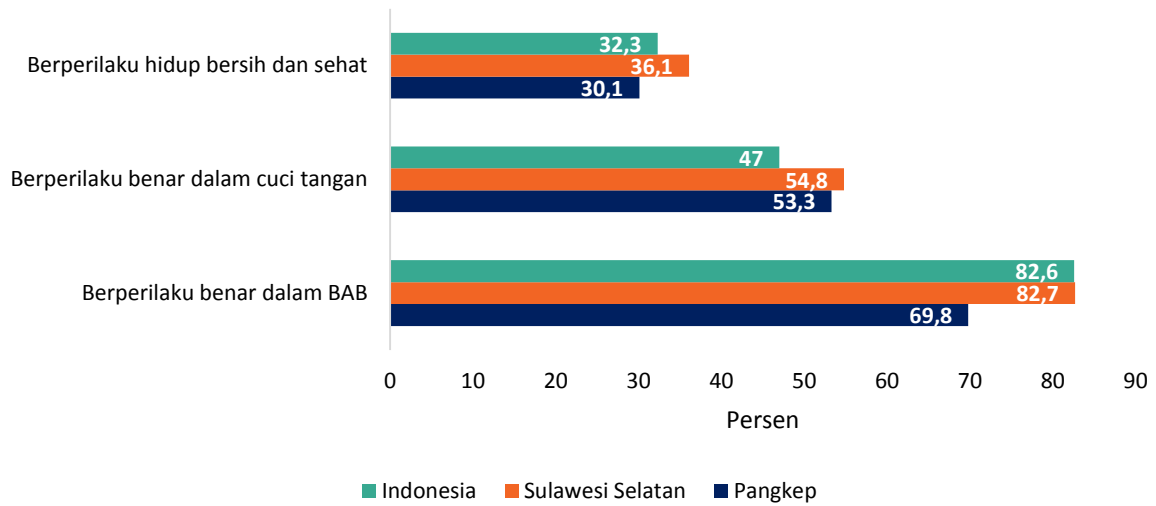
Gambar A 2. IPM (Pengeluaran Per kapita)



Sumber: BPS

## LAMPIRAN 7

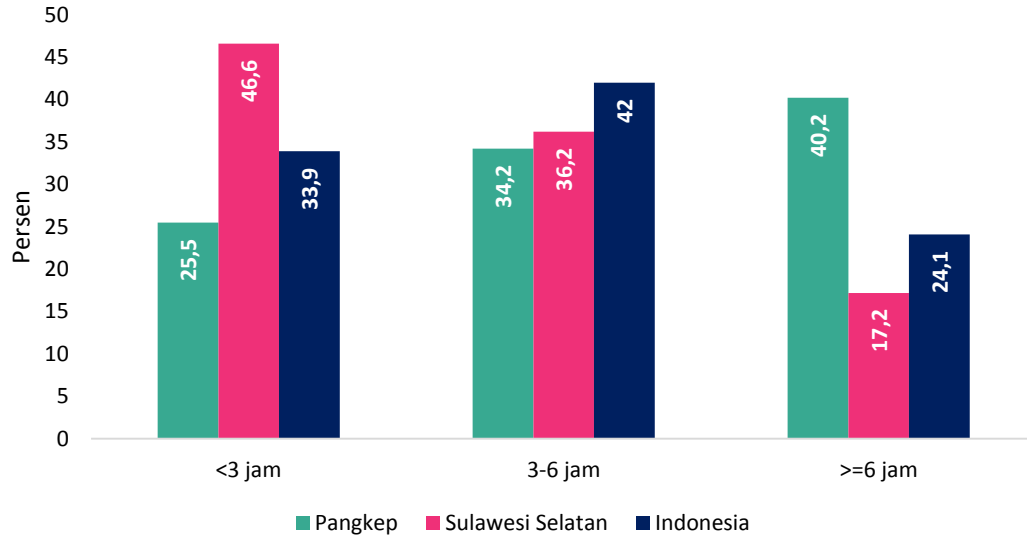
Gambar A 3. Perilaku Hidup Sehat (2013)



Sumber: Riskesdas 2013

## LAMPIRAN 8

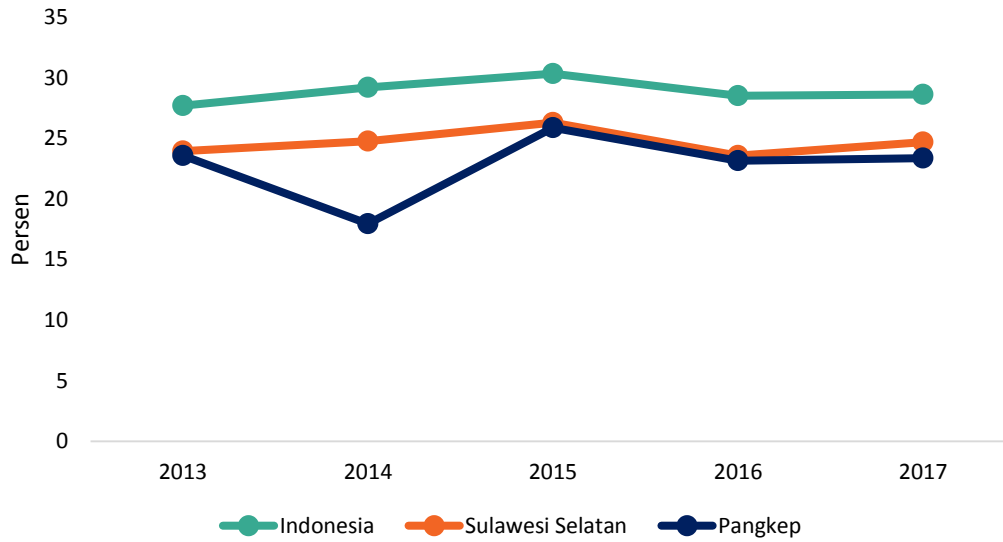
Gambar A 4. Perilaku Sedentari



Sumber: Riskesdas 2013

## LAMPIRAN 9

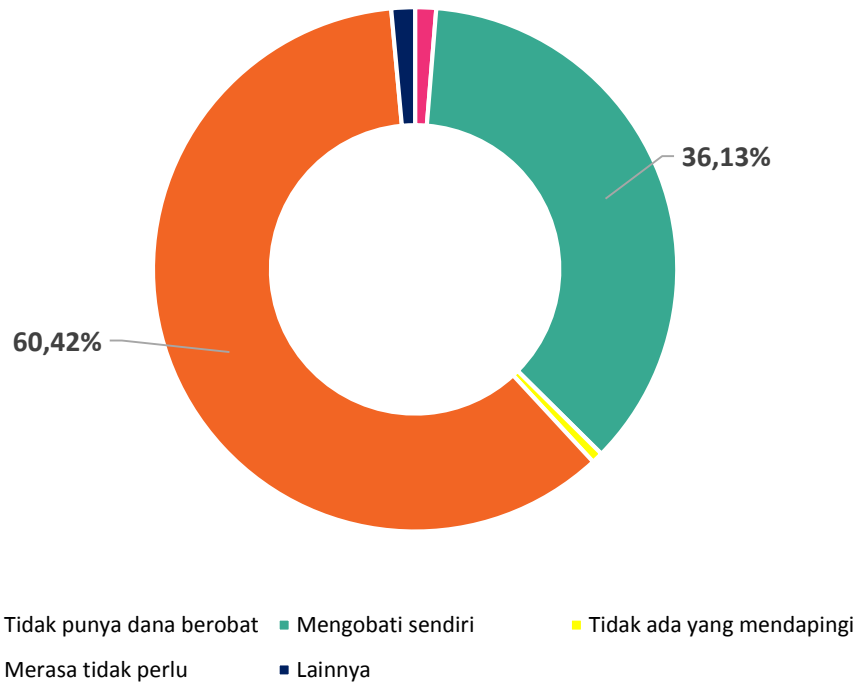
**Gambar A 5. Penduduk yang Pernah Memiliki Keluhan Kesehatan Dalam Sebulan Terakhir Kabupaten Pangkep (2017)**



Sumber: BPS (Data diolah)

## LAMPIRAN 10

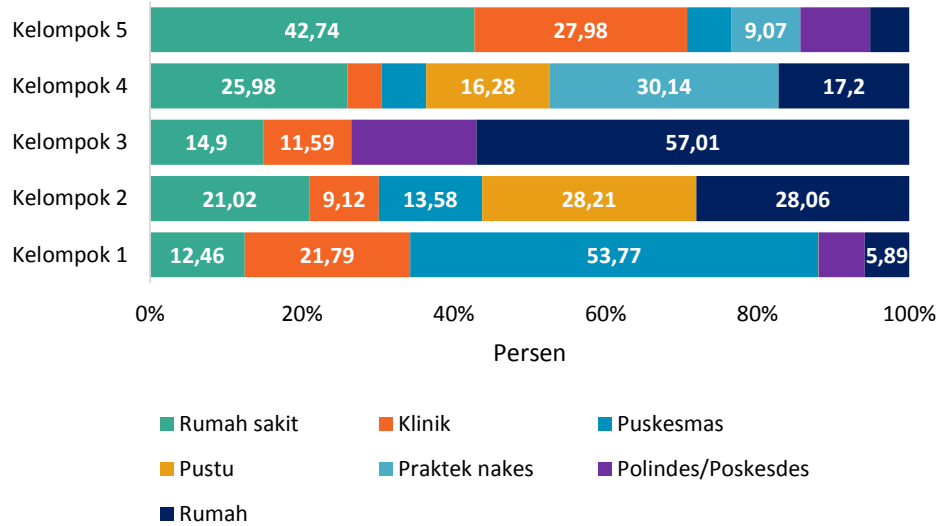
Gambar A9. Alasan Tidak Berobat Kabupaten Pangkep 2017



Sumber: BPS (Data diolah)

## LAMPIRAN 11

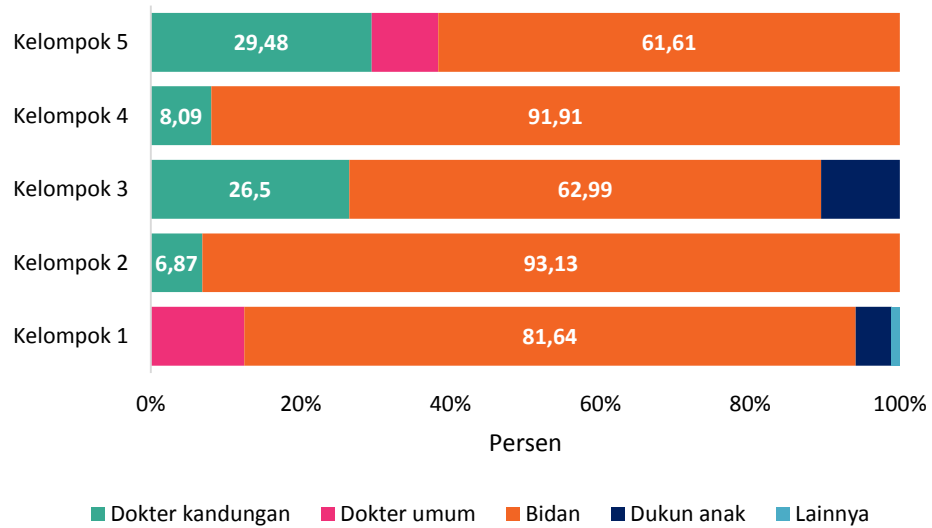
**Gambar A 6. Tempat Melahirkan Perempuan yang Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Pangkep (2017)**



Sumber: BPS (Data diolah)

## LAMPIRAN 12

**Gambar A 7. Penolong Proses Melahirkan Perempuan yang Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Pangkep (2017)**



Sumber: BPS (Data diolah)



## LAMPIRAN 13

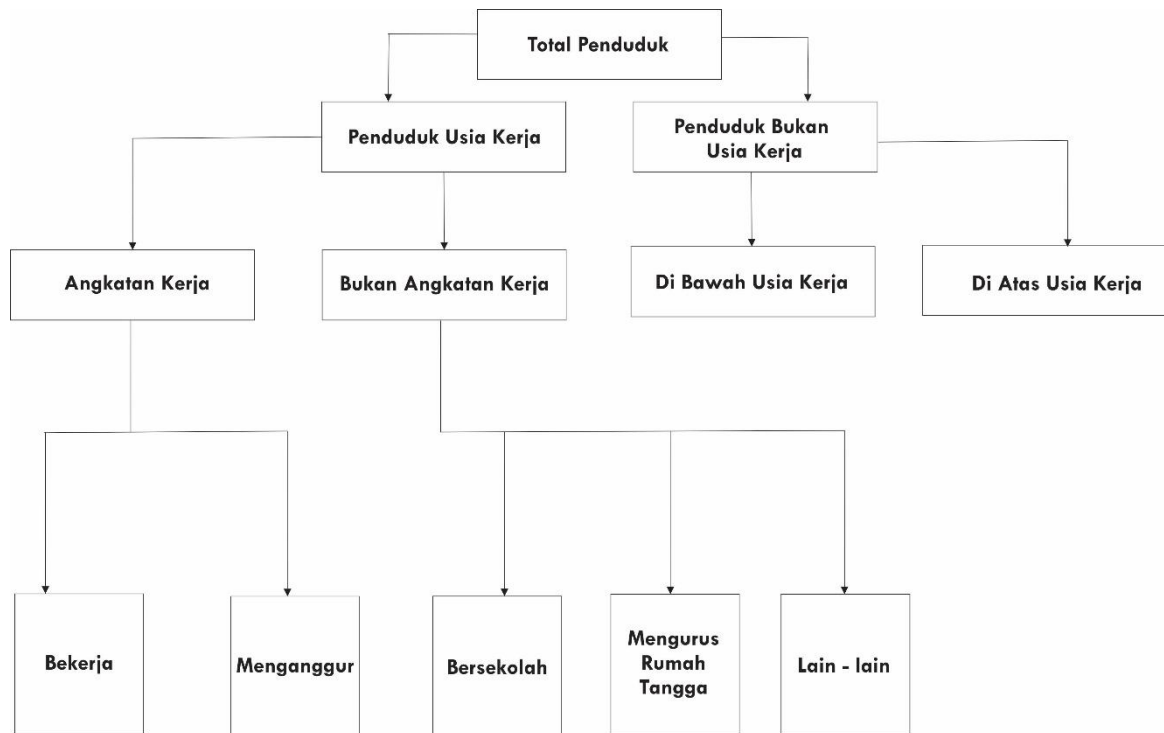
**Tabel A2. Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan Kabupaten Pangkep (2017)**

KECAMATAN	Fasilitas Kesehatan				
	Rumah Sakit	Puskesmas	Posyandu	Klinik	Poskesdes
Liukang Tangaya	0	2	39	0	13
Liukang Kalmas	0	2	18	0	8
Liukang Tupabbiring	0	2	18	0	7
Liukang Tupabbiring Utara	0	1	18	0	10
Pangkajene	1	2	34	5	4
Minasatene	0	2	34	0	9
Bolocci	0	1	19	0	3
Tondong Tallasa	0	1	24	0	3
Bungoro	0	2	35	1	8
Labakkang	0	3	58	1	8
Ma'rang	0	2	36	0	8
Segeri	0	2	33	1	4
Mandalle	0	1	20	0	4
<b>Kabupaten Pangkep</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>386</b>	<b>8</b>	<b>89</b>

Sumber: BPS (Pangkajene dan Kepulauan dalam angka, 2018)

## LAMPIRAN 14

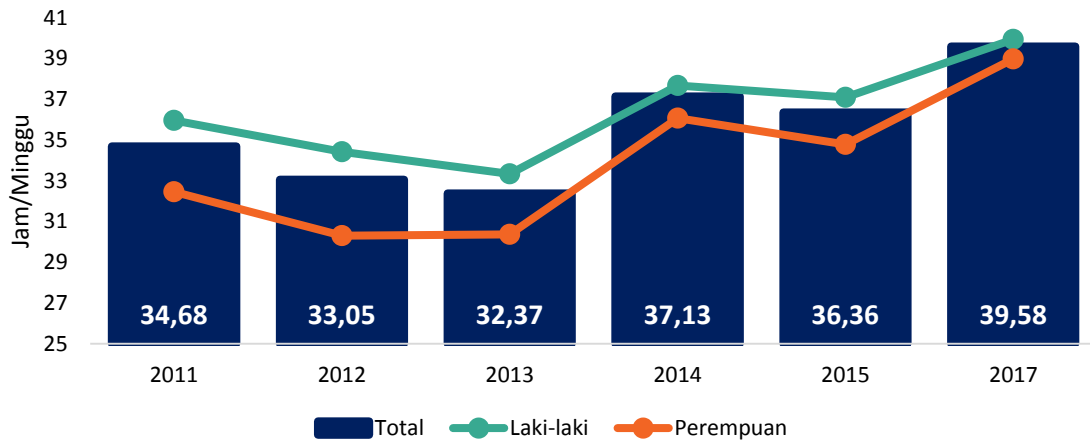
Gambar A12. Bagan Tenaga Kerja Indonesia



Sumber: BPS

## LAMPIRAN 15

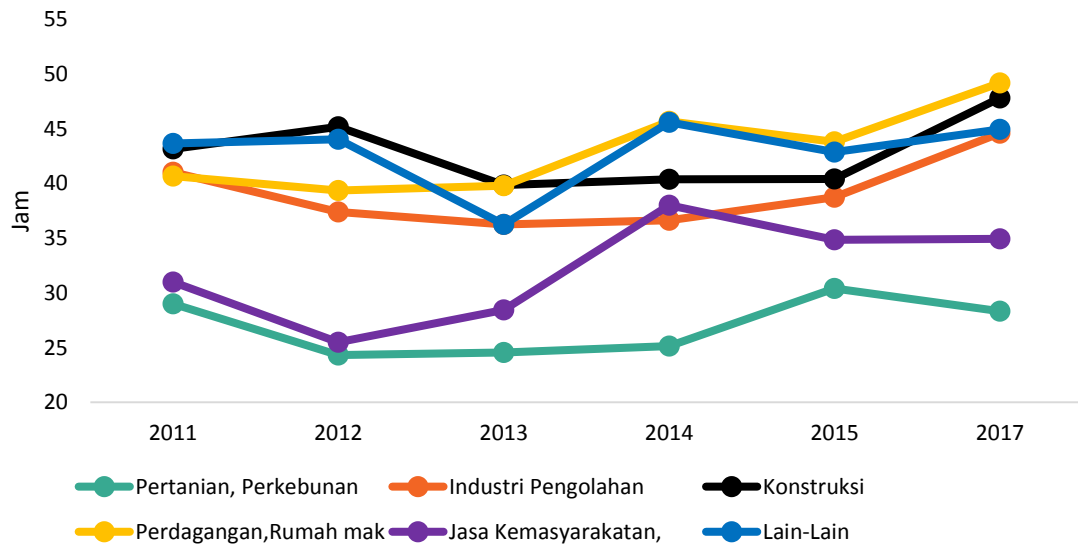
Gambar A13. Rata-rata Lama Bekerja Menurut Jenis Kelamin (2017)



Sumber: Sakernas BPS (data diolah)

## LAMPIRAN 16

Gambar A14. Rata-rata Lama Bekerja Menurut Jenis Lapangan Usaha



Sumber: Sakernas BPS (data diolah)

## LAMPIRAN 17

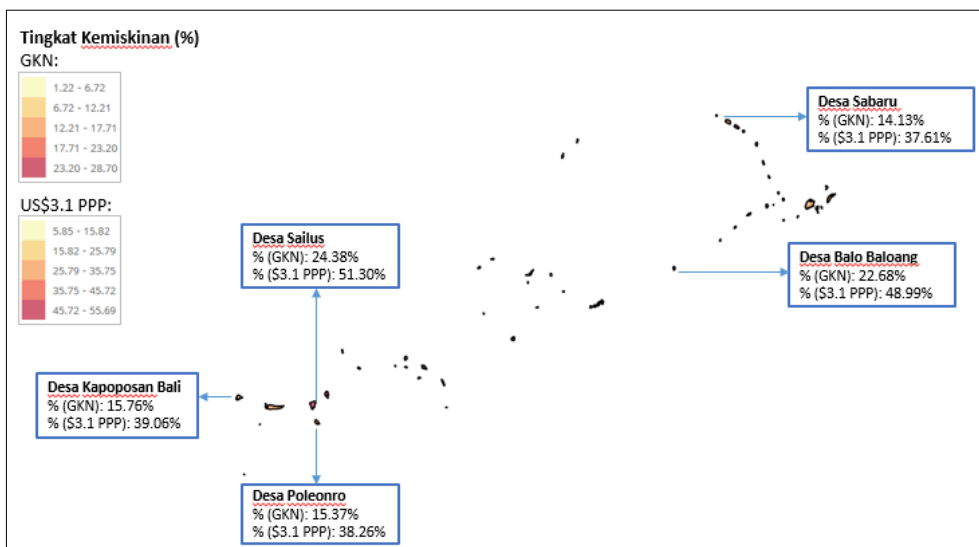
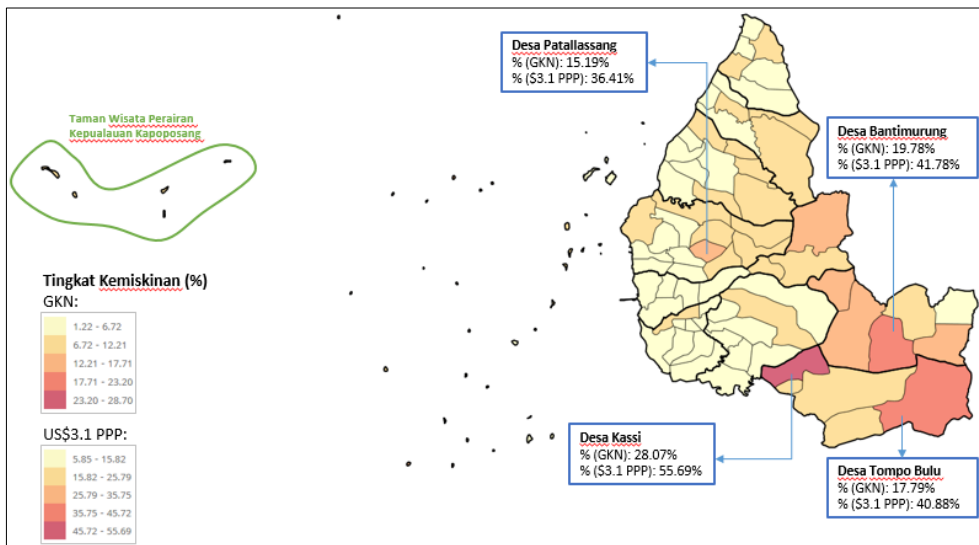
**Tabel A3. Gambaran Umum Rumah Tangga Kabupaten Pangkep (2013 dan 2017)**

Kategori	2013	2017	Keterangan
Status kepemilikan rumah (milik sendiri)	89.01%	85.10%	Turun
Jenis atap terluas (seng)	87.62%	94.86%	Naik
Jenis dinding terluas (tembok)	24.65%	31.33%	Naik
Jenis lantai terluas (papan/kayu)	58.94%	53.00%	Turun
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN	95.82%	94.58%	Turun
Jenis bahan bakar untuk memasak (gas elpiji )	83.39%	92.76%	Naik
Jumlah anggota rumah tangga (3-6 orang)	75.45%	69.88%	Turun

Sumber: Sakernas BPS (data diolah)

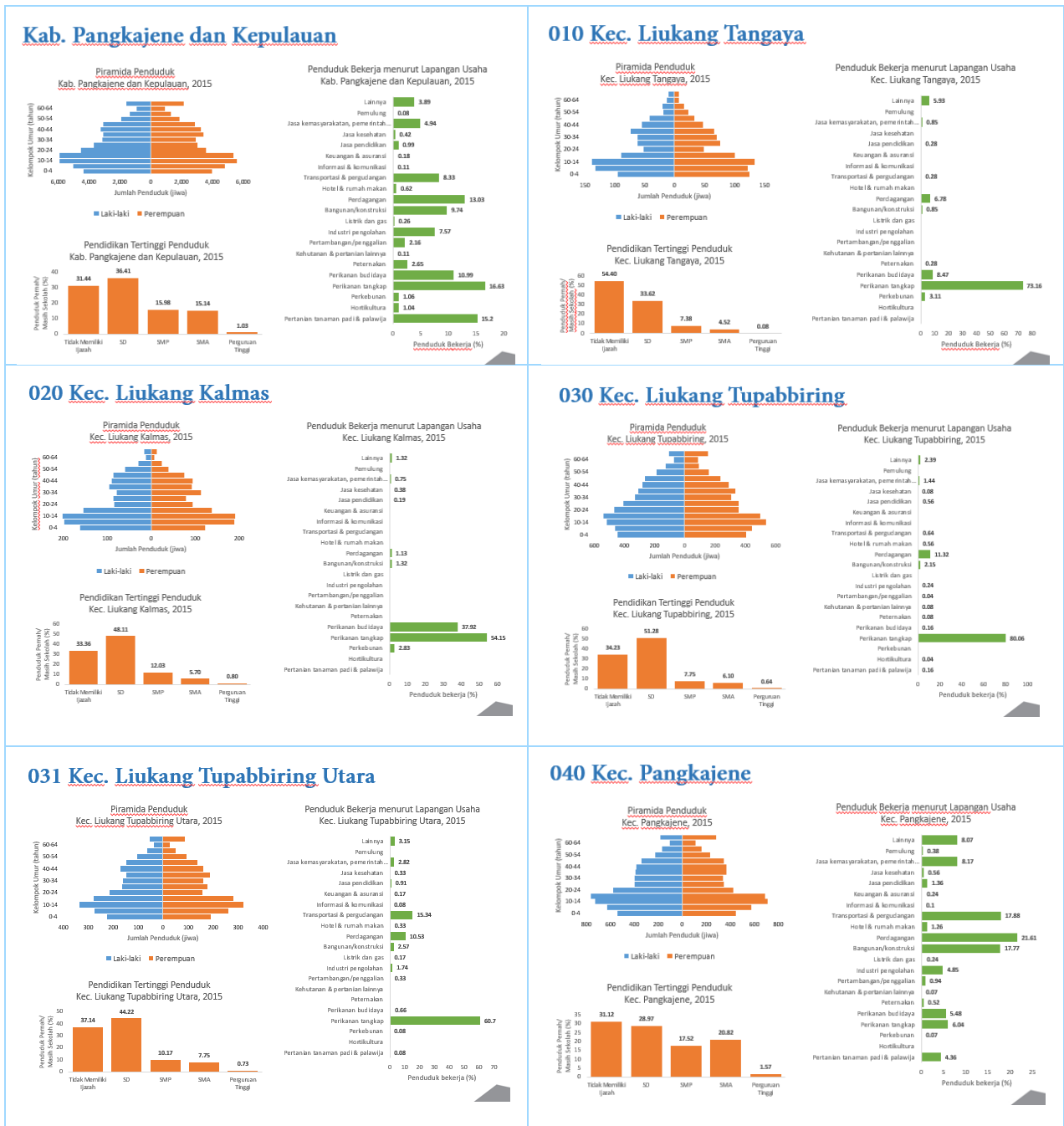
# LAMPIRAN 18

## Gambar A15. Persebaran Kemiskinan di Tingkat Desa (2015)

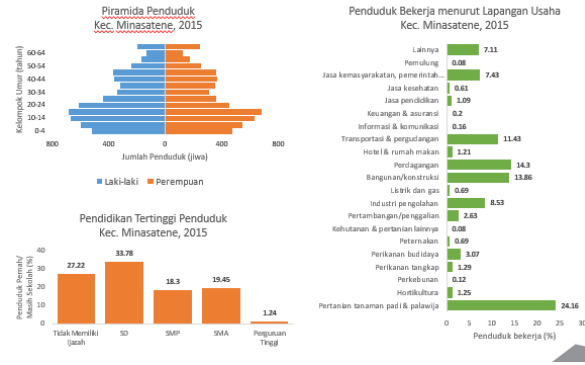


# LAMPIRAN 19

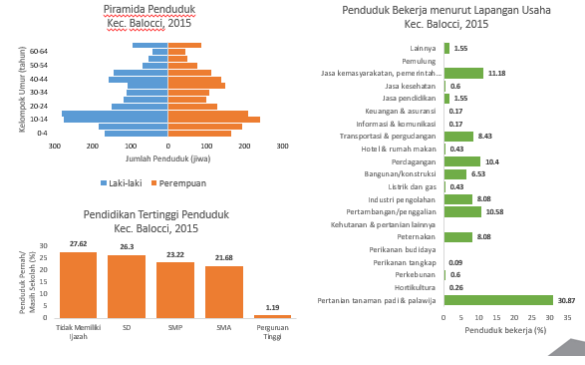
Gambar A16. Karakteristik Penduduk 20% Terbawah menurut Kecamatan (2015)



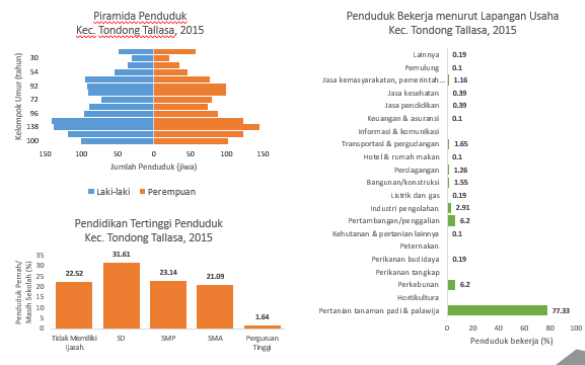
### 041 Kec. Minasatene



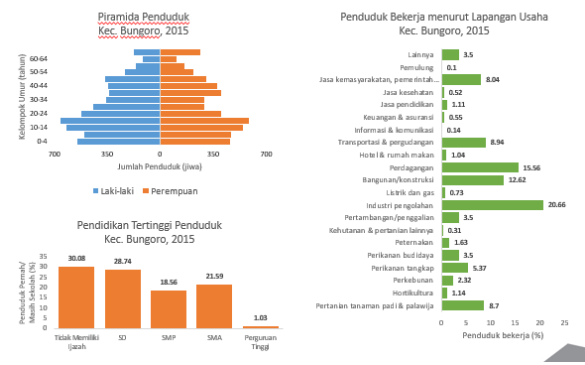
### 050 Kec. Balocci



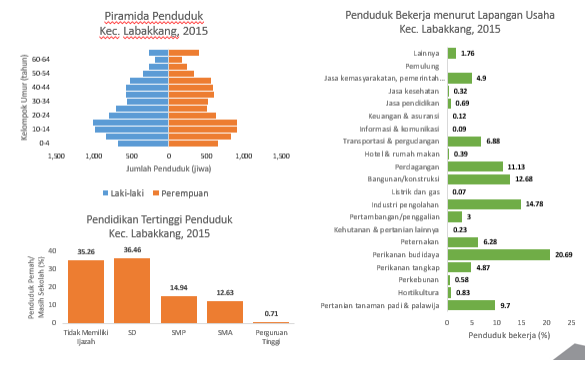
### 051 Kec. Tondong Tallasa



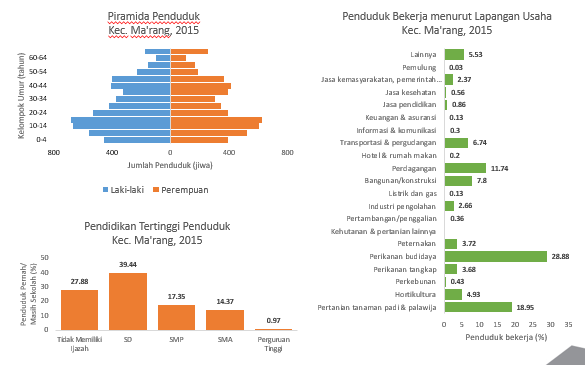
### 060 Kec. Bungoro



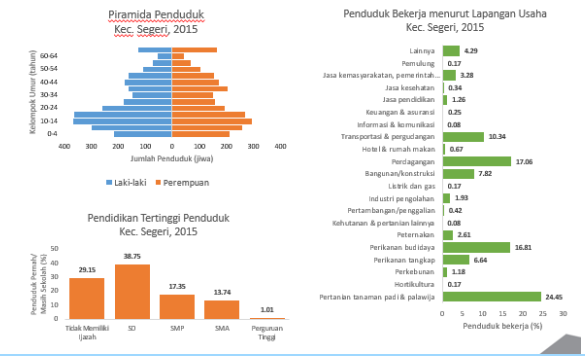
### 070 Kec. Labakkang



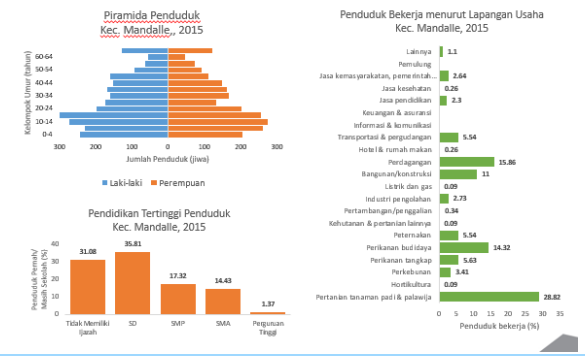
### 080 Kec. Ma'rang



### 091 Kec. Segeri



### 092 Kec. Mandalle





## **The SMERU Research Institute**

Telepon : +62 21 3193 6336

Faksimili : +62 21 3193 0850

Surel : [smeru@smeru.or.id](mailto:smeru@smeru.or.id)

Situs web : [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id)

Facebook : [@SMERUInstitute](https://www.facebook.com/SMERUInstitute)

Twitter : [@SMERUInstitute](https://twitter.com/SMERUInstitute)

YouTube : [The SMERU Research Institute](https://www.youtube.com/channel/UC...)